

**Seminar Sejarah Lokal
Topik II**

**DINAMIKA MASYARAKAT
PEDESAAN**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL**

1982

VIII.11

ktorat
aan

Seminar Sejarah Lokal
Topik II

0905
SEM
S

DINAMIKA MASYARAKAT

PEDESAAN



DAFTAR ISI

- 1. Pergolakan di Paulohy (Teluk Elpaputih)**
oleh : R. Z. Leirissa, MA.
- 2. Membangun Prasarana Untuk Merangsang Penulisan
Sejarah Lokal Demi Integrasi Nasional.**
oleh ; Sediono M. P. Tjondronegoro
- 3. Dari Subsistensi Ke Perdagangan Desa Pantai
Maribaya ; 1950 - 1978**
oleh ; A. M. Djulianti Suroyo
- 4. Aspek Historis Dari Pembangunan Pedesaan
di Jawa Tengah.**
oleh ; Soegijanto Padmo.
- 5. "Wong Cilik " Problema dan Dinamika Surakarta Abad 19**
oleh ; Suhartono
- 6. Gerakan Protes Masyarakat Pedesaan di Aceh Terhadap
Militerisme Jepang ; Kaus Bayu Pandaan.**
oleh ; Muhammad Ibrahim.

PERGOLAKAN DI PAULOHY (TELUK ELPAPUTIH)

1836 - 1837

I Oleh : R.Z. Leirissa, MA

Teluk Elpaputih terletak di pesisir selatan Seram Barat. Di sekitarnya terdapat desa-desa (negeri-negeri) Latu (Islam), Hoaloy (Islam), Paulohy (Kristen), Samasuru (Kristen), Makariki (Kristen), dan Amahay (Kristen dan Islam). Sejak pertengahan abad ke-19 sejumlah suku (clan) di pedalaman teluk itu telah dipindahkan ke pesisir pula sehingga sampai kini ada pula desa-desa Mani, Sahulau, Liang (dekat Samasuru - Paulohy), Rumasosial, Waraka, Apisano, (dekat Makariki), Jalahatani dan Souhuku (dekat Amahay). Untuk jelasnya lihat peta yang dilampirkan.

Analisa mengenai pergolakan di desa Paulohy dalam tahun-tahun 1836-1837 akan menggunakan gagasan dari Smelser (collective behaviour)¹. Ternyata sebagian besar dari pergolakan di Seram Barat dalam paroh pertama abad ke-19 dapat digolongkan dalam apa yang dinamakan Smelser "hostile outburst"². Determinan-determinan untuk pergolakan jenis ini yang dibicarakan di sini adalah cleavages dalam masyarakat yang menimbulkan structural conduciveness bagi suatu pergolakan tertentu, kemudian hambatan-hambatan melalukan peran dengan wajar sebagai determinan structural strain. Selanjutnya akan diperlihatkan bahwa hasutan-hasutan dan desas-desus merupakan generalized believe yang memang khas dalam pergolakan jenis ini. Peristiwa yang meletuskan pergolakan serta penggerakan massa untuk menentang kepala desa serta reaksi kepala desa dan pihak-pihak yang mendukungnya (pemerintah) akan menyusul pula. Dengan demikian diharapkan dapat muncul suatu penjelasan yang mantap mengenai peristiwa di tahun 1836-1837 tersebut.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa data yang dipakai dalam makalah ini adalah sebagian (kecil) dari data yang kami kumpulkan dalam rangka penelitian pergolakan di Seram Barat dalam abad ke-19.³ Sebab itu kepada pihak-pihak yang memungkinkan

penelitian itu kami mengucapkan banyak terima kasih.

II

Dalam kenangan rakyat Maluku, pulau Seram dinamakan pulau Ibu (Nusa Ina). Bentuk pulau ini memang nampaknya seperti merangkul pulau-pulau lainnya di Maluku Tengah (Ambon, Haruku, Saparua, Nusalaute atau kepulauan Ambon-Uliase). Selain itu banyak penduduk Ambon-Uliase menganggap dirinya berasal dari salah satu tempat di Seram. Dan dalam abad-abad yang lalu pulau ini memang merupakan sumber makanan (sagu) bagi kepulauan tersebut.

Namun dalam struktur penjajahan di abad ke-17 sampai bagian pertama abad ke-20, Seram menduduki posisi marginal. Sistem pemerintahan yang dibangun penjajah di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, bertujuan melancarkan monopoli rempah-rempahnya. Untuk Maluku Tengah cengkeh menjadi pusat segalanya. Cengkeh hanya diusahakan di kepulauan Ambon-Uliase saja. Seram, khususnya Seram Barat, direbut VOC dari kerajaan Ternate⁴ dan digunakan sebagai garis perlawanan terhadap "perdagangan gelap" cengkeh, dan sebagai tempat mendapatkan bahan-bahan kayu untuk bangunan dan perkapalan. Selama itu di daerah ini tidak pernah terdapat pejabat-pejabat administrasi pemerintahan (kecuali di Saway untuk menghadapi bajak laut⁵ dan di Luhu untuk mengawasi perkebunan sagu milik pemerintah). Baru dalam pertengahan abad ke-19 diusahakan untuk menjadikan Seram beberapa afdeeling dengan status yang sama seperti di kepulauan Ambon-Uliase. Sebelum itu wilayah Seram Utara bagian Barat termasuk dalam keresidenan Hila (di pulau Ambon), Seram Barat dalam keresidenan Saparua, dan Seram Timur dalam keresidenan Banda.

Kecuali kunjungan-kunjungan dinas yang dilakukan sewaktu-waktu, tidak ada hubungan langsung antara ibukota keresidenan-keresidenan tersebut dengan Seram. Bila muncul pergolakan-pergolakan (yang sangat sering terjadi) maka para pejabat Belanda mengirimkan suatu "Kommissie" yang terdiri atas beberapa kepala

desa di Ambon-Uliase yang mereka percaya, untuk membuat laporan dan meleraikan keadaan. Perlu ditambahkan bahwa laporan-laporan komisie-komisie ini merupakan dokumen-dokumen yang paling berharga dalam Arsip Nasional RI di Jakarta.

Ada dua istilah yang sering digunakan untuk melukiskan masyarakat Seram, yaitu Patasiwa (Seram Barat), dan Patalima (di sebelah timurnya). Di sini akan diuraikan mengenai Patasiwa karena menyangkut masalah yang sedang dianalisa. Orang-orang Patasiwa di Seram Barat terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu Alune (di sebelah Timur Laut) dan Wemale (di bahagian lainnya dari Seram Barat). Secara antropologis mereka berbeda. Clan-clan Wemale biasanya bersifat matriloal, sedangkan Alune patriloal. Ini membawa akibat yang luas seperti yang dibahas oleh van Wouden dalam disertasinya di tahun 1935.⁶ Ciri-ciri pokok dari kebudayaan Wemale dibahas dengan seksama oleh Jensen⁷ sebagai hasil penelitian dalam rangka Frobenius Expedition di Seram tahun 1933. Dan sebelumnya seorang antropolog lainnya, yaitu Duyvendak⁸ sudah membuat satu disertasi mengenai upacara inisiasi di kalangan Patasiwa.

Berdasarkan analisa-analisa itu dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan dan persamaan antara masyarakat pedalaman yang belum dipengaruhi unsur-unsur asing dalam abad ke-19, dan masyarakat pesisir yang sudah lama dipengaruhi unsur-unsur asing. Menurut Jensen⁹ clan Wemale dinamakan Nuru atau Luma dan bisa bersifat endogam ataupun exogam.¹⁰ Setiap clan terdiri atas sejumlah descent group yang dinamakan Luma-inai (Luma = rumah, Inai = ibu, karena matriloal). Keseluruhan clan tersebut dikepalai oleh seorang Lumalatu yang secara termurun dipilih dari suatu Luma-inai tertentu dan yang berdiam dalam rumah pusaka clan yang bersangkutan.¹¹

Menurut Van Wouden ada pengelompokan clan-clan sehingga terbentuk sejumlah tribe. Tetapi mengenai hal ini ia kurang jelas karena sumbernya memang langka.¹² Beberapa kelompok masyarakat Wemale yang bisa disebut tribe adalah (sekitar Teluk El-

paputih): Mani, Liang, Sahulau, Waraka, Apisano, Souhuku, dll. yang dalam pertengahan abad ke-19 dipindahkan ke pesisir di teluk itu. Selain itu ada beberapa clan yang telah menetap sehingga bisa dinamakan desa (negeri), yaitu Somit, Watui, Ahiole, Waraloin, dsb. Di abad ke-19 kelompok-kelompok itu menguasai tribe-tribe yang ada disekitarnya.

Penduduk pesisir yang berdiam dalam desa-desa (negeri) sebagian besar rupanya berasal dari pedalaman juga. Sebab itulah mitos-mitos, legenda-legenda, serta sistem sosial yang ada di pedalaman banyak yang bisa kita jumpai kembali dalam masyarakat pesisir ini. Terutama mitos tentang penciptaan manusia pertama (Nunusaku), mitos tentang asal-usul ubi-ubian (Hainuwele), dsb. nampak pula di sini.¹³ Upacara-upacara inisiasi merupakan bagian penting pula dari masyarakat pesisir sekalipun mereka sudah beragama Islam atau Kristen. Dan struktur sosio-politik yang dinamakan Saniri juga mencakup masyarakat pesisir (lihat bagian ke IV).

III

Struktur masyarakat desa Paulohy sesungguhnya tidak berbeda dengan yang terdapat di desa-desa lainnya di pesisir Seram Barat. Di sini akan dibahas beberapa cleavage yang laten sebagai struktural conduciveness dari gerakan-gerakan yang bersifat "hostile" tsb. Di satu pihak ada sejumlah pejabat yang lebih banyak merupakan alat kekuasaan pemerintah (jajahan) sekalipun mengandung unsur-unsur primordial juga. Di lain pihak terdapat sejumlah pejabat desa yang merupakan bagian integral dari sistem budaya pedalaman. Tergolong pada jenis pejabat pertama adalah kepala desa yang di teluk Elpaputih dinamakan Orangkaya. Selain itu ada pula sejumlah Kepala Soa yang menguasai bagian-bagian dari desa. Sebenarnya Orangkaya berasal dari salah satu Soa juga dan sering pula merangkap sebagai kepalanya. Kekuasaan Orangkaya dan Kepala soa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi semua negeri di Maluku Tengah (Staatsblad

1824/19a). Keenam soa di desa Paulohy adalah Laturiu (soa pertama), Kaihema (soa kedua), Kuripuny (soa ketiga), Kakiyai (soa keempat), Separowey (soa kelima) dan Tamaela (soa keenam).

Sekalipun para Kepala Soa sangat terikat pada sistem pemerintahan jajahan, tetapi secara intern mereka sesungguhnya adalah kepala dari clan (Lumalatu), dan keluarga-keluarga yang terdapat dalam setiap Soa adalah bagian dari clan itu (Lumai-inai). Namun karena pengaruh Kristen maupun Islam semua clan pesisir bersifat patrilokal dan Patrilineal. Istilah lain untuk Lumalatu adalah Ma-ina-uma (Ama = Bapak, Ina = Ibu, Uma = Luma). Penyatuan unsur bapak dan ibu dalam satu tokoh menandakan bahwa tokoh itu mewakili kesatuan kelompoknya (Nuru/Luma).

Masih tergolong dalam pejabat-pejabat desa yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial adalah Marinyo Negeri atau pesuruh dari Orangkaya. Selain itu terdapat pula seorang guru sekolah (guruw midras) di setiap desa yang biasanya bukan penduduk asli negeri itu. Kemudian ada Marinyo Sekolah (Pesuruh Sekolah), Tuagama (penjasa pereja di negeri-negeri Kristen).

Hanya guru desa yang menerima gaji sebagai imbalan tugas-tugasnya. Orangkaya mendapat jatah kwarto (pekerja) dari antara penduduk negerinya (berlilir).

Pejabat-pejabat desa yang tidak menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan penjajahan adalah pertama-tama para Mauwen atau pemuka dalam upacara inisiasi. Mereka juga dianggap sebagai orang yang paling tahu dan paling berhak mengenai masalah kebudayaan dan agama suku. Sebab itu pengaruh mereka kadang-kadang sangat besar. Praktis setiap clan mempunyai seorang Mauwen. Para Mauwen ini dikoordinir dalam suatu desa oleh Mauwen Besar ("Mauwen Elake). Selain itu ada pula pejabat-pejabat yang dinamakan kapitan (malesi) yang berfungsi sebagai pemimpin perang (di pedalaman sebagai pemimpin pengayauan).

Dalam masyarakat posisiran ini polarisasi antara para Mauwen dan para Orangkaya dan Kepala Soa merupakan kenyataan yang laten. Dalam situasi-situasi tertentu, terutama apabila me-

ngangkut masalah adat-istiadat, para mauwen dengan mudah mengarahkan masyarakat desa untuk melawan para Orangkaya dan Kepala Soa yang dilihat sebagai simbol kekuasaan asing. Situasi konflik itu makin meningkat terutama karena adanya larangan-larangan untuk mengadakan upacara inisiasi (kakehan). Alasannya adalah bahwa upacara-upacara ini selain membangkitkan aggrisiifitas di kalangan pemuda, juga berkaitan dengan pengayauan.¹⁴ Situasi inilah yang memungkinkan timbulnya pergolakan di Paulohy dalam tahun 1836-1837.

IV

Sebelum melanjutkan determinan-determinan lainnya dalam pergolakan ini, ada baiknya dibentangkan dulu institusi Saniri yang memainkan peranan penting terutama pada tingkat penyelesaian pertikaian (Social control). Desa-desa pesisir dan pedalaman, serta tribe-tribe Seram Barat (Patasawa) mempunyai suatu sistem khas untuk menyelesaikan perselisihan antara desa/tribe yang terutama diakibatkan pengayauan. Institusi ini dinamakan Saniri (pertemuan). Ada tiga pusat pertemuan, masing-masing menyangkut masyarakat yang berdiam sekitar (1) Sungai Sopalewa (Baralewa (Barat Laut, Alune), (2) Sungai Eti (Barat Daya, Wemale), (3) Tala (Tenggara, Wemale).¹⁵ Sebenarnya sebelumnya masih ada satu pusat pertemuan lagi, yaitu antara penduduk sekitar sungai Uli (Timur Laut, Wemale) tetapi dalam abad ke-19 mereka rupanya tidak terlibat dalam pengayauan.¹⁶ Pertemuan atau Saniri dilakukan di tempat-tempat tertentu dari waktu-ke-waktu dan dengan izin dari pemerintah Selain itu dari waktu-ke-waktu pula (sekitar sepuluh tahun sekali) ketiga Saniri itu mengadakan Saniri Besar untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara ketiga wilayah itu.

Setiap wilayah (aliran sungai) dikepalai oleh seorang Kepala Saniri atau Inama (Ina, Ama, unsur penyatuan dalam diri pemimpin). Dan setiap wilayah (aliran sungai) dibagi lagi dalam empat bagian masing-masing dengan kepalanya sendiri (salah satu

bagian itu langsung di bawah Kepala Saniri). Masing-masing kepala, seperti halnya Kepala Saniri, mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam Saniri. Selain itu para pejabat ini bersifat termurun dalam clan-clan tertentu dari desa-desa tertentu. Kecuali Kepala Saniri, kebanyakan pejabat lainnya berdiam di desa-desa pedalaman. Ini sebabnya pemerintah kolonial menganggap Kepala Saniri sebagai alatnya untuk menguasai pedalaman. Pengangkatan dan pelepasan Kepala Saniri dilakukan per surat pengangkatan seperti halnya para Orangkaya dan Kepala Soa. Ia juga diberi semacam pakaian kebesaran. Di sini tidak perlu dikemukakan proses Saniri (penyelesaian pertikaian) karena tidak langsung mengenai permasalahan yang dibahas dalam makalah ini.¹⁷

V

Kembali pada pergolakan di Paulohy, Pada tahun 1832 diadakan suatu Saniri Tala (daerah Paulohy termasuk ke dalamnya). Masalahnya sebenarnya adalah persengketaan Watui (pedalaman) dengan beberapa desa dan tribe pesisir. Saniri ini dihadiri oleh Asisten Residen Saparua, Engelhart. Pada saat itu para Mauwen Paulohy dipimpin Mauwen Besarnya, Lukas Niyai, meminta agar mereka diizinkan mengadakan upacara inisiasi bagi para pemuda Paulohy. Permintaan ini ternyata ditolak oleh Engelhart.¹⁸ Tidak lama sesudah itu Engelhart memerintahkan Orangkaya Paulohy untuk membuka jalan baru di sekitar desa itu. Dalam proses itu dua di antara rumah upacara inisiasi (tutue) harus dibongkar. Ini membangkitkan amarah penduduk terhadap Orangkaya. Dan ia pula disalahkan penduduk dalam masalah ijin upacara inisiasi yang ditolak Asisten Residen tersebut.¹⁹

Sejak itu mulai muncul perasaan menentang Orangkaya yang makin lama makin meningkat. Memang dokumen-dokumen yang dipakai di sini tidak berhasil mengungkapkan bagaimana proses tuduh-menuduh dan desas-desus serta hasutan-hasutan yang timbul itu. Tetapi hal itu bisa kita simpulkan dari situasi kemudian dan beberapa peristiwa yang ada sangkut-pautnya. Upamanya perintah

Orangkaya untuk membangun gereja baru ditentang oleh penduduk. Masalah leverantie kayu yang menjadi kewajiban penduduk juga mulai macet. Lebih-lebih lagi instruksi yang datangnya dari Engelhart untuk membuang semua tengkorak yang tergantung di baleu (balai desa).²⁰ Keadaan ini dengan sendirinya membangkitkan apa yang oleh Smelser dinamakan "generalized belief" dan per-sebarannya yang dilakukan melalui desas-desus dan hasutan.

Keresahan hati ini makin meningkat lagi ketika pada tanggal 10 Oktober 1836 Orangkaya Paulohy memerintahkan beberapa soa untuk mengambil kayu lagi pembangunan rumah-rumah desa (sesuai instruksi pula).²¹ Di tengah-tengah pekerjaan ini pada tanggal 4 Nopember 1836 sejumlah pemuda Paulohy tiba-tiba muncul dari hutan. Dengan berteriak-teriak memaki-maki Orangkaya mereka menyerbu rumah Orangkaya dan merusak perabotan rumahnya yang terdiri dari satu meja besar, enam buah kursi, sebuah jala, sebuah perahu pengangkut (arombay), setengah lusin gelas henever, beberapa kayu kain berharga (patola dan uti-uti), dll. Kelompok pemuda ini juga menyerbu kebun-kebun Orangkaya yang terletak di Hoale, Hunutawy, Epe, Nary, Leuw dan menebas sekitar 400 pohon sagu.²²

Dua hari kemudian kelompok ini kembali ke hutan bersama keluarga mereka. Para pemimpin kelompok ini adalah "epala Soa Markus Kakiayi, Mauwen Besar Lukas Niayi, serta "epala Bicara (juru bicara) Mezak Laturiu, serta beberapa pemuda lainnya.²³ Tempat yang mereka pilih sebagai "markas" adalah hutan dekat Laulohy yang bernama Umeputy.²⁴

Setelah mengadakan perundingan, mereka mengajukan tuntutan kepada Asisten Residen Engelhart. Yang diminta adalah pemecatan Orangkaya dan menggantikannya dengan orang lain. Sebagai alasan mereka menyebut sejumlah "kejahatan" Orangkaya berupa penyalahgunaan kekuasaan seperti menyita milik desa, tidak membayar upah leverantie kayu yang diterimanya di Ambon, paksaan pada penduduk untuk menyumbangkan sebagian dari sagu mereka, pengrusakan kebun negeri di Waimeten sehingga menimbulkan permusuhan antara Paulohy dan Amahay Islam, dan lain-lainnya.²⁶

Dalam suatu kesempatan Markus Kakiayi sendiri menyurat pada Engelhart untuk menguatkan tuduhan tersebut.²⁷

Pendeknya banyak masalah yang menyangkut tugas sebagai Orangkaya. Tidak pernah disinggung masalah pokok yang disebut di atas. Yang diinginkan memang hanya satu, yaitu pemecatan Orangkaya yang dianggap biangkeladi permasalahan pokok tersebut.

Perlawanan ini berlangsung cukup lama, Yaitu dari Nopember 1836 sampai Mei 1837. Dari waktu ke waktu para pemimpin di Umeputi turun ke Paulohy sehingga makin banyak penduduk yang memihak pada mereka. Malah suku-suku (tribe) yang berada sekitar Paulohy dapat mereka tarik untuk menentang Orangkaya juga, seperti orang-orang Mani, Wasya dan Samahu. Dengan kekuatan ini mereka mulai menyerang tribe-tribe di sekitar Paulohy yang memihak pada Orangkaya sehingga mulai berjatuh korban-korban.²⁸ Keadaan sedemikian menakutkan Orangkaya sehingga akhirnya ia melarikan diri ke Makariki, desa yang letaknya agak jauh dari Paulohy.²⁹ Dalam laporannya kepada Asisten Residen Engelhart, Orangkaya Paulohy membentangkan bahwa sikap orang-orang Paulohy sudah berulang kali terjadi, antara lain di masa ayahnya menjadi Orangkaya, selain itu juga di masa tiga Orangkaya lainnya. Katakanya: "Paulohy sudah meninggalkan azama kami orang-orang sara-ny serta anak-anak midras dan pakardjaan Gubernemen."³⁰

VI

Dalam menghadapi permasalahan ini mula-mula Asisten Residen Engelhart mengambil langkah-langkah rutin seperti yang selalu dilakukan para Asisten Residen bila muncul situasi serupa. Segera setelah menerima surat pertama dari Orangkaya Paulohy pada bulan Nopember yang melaporkan peristiwa tanggal 4 Nopember itu,³¹ ia mengirim suatu "Kommissie" yang terdiri atas Raja Nolot dan Raja Tuhaha (di pulau Saparua) untuk memeriksa situasi dan melaporkannya. Ia juga memberi perintah rahasia agar biang keladi kerusuhan itu ditangkap.³²

Komisie tersebut memang berhasil ke Umeputy, tetapi mereka

mendapat keterangan-keterangan yang sengaja diputar-balikan. Dikatakan pada mereka bahwa biang keladinya adalah Kepala Soa lain yang sebenarnya memihak pada Orangkaya.³³ Pada kesempatan ini pula Kommissie menerima surat-surat dari Kakiyai dan pengikut-pengikutnya yang membentangkan mengapa mereka menentang Orangkaya dan menuntut agar Asisten Residen memecatnya. Engelhart menjawab surat mereka via Orangkaya Samasuru.³⁴ Ia minta agar mereka kembali ke Palohy se sehingga masalahnya bisa diperiksa dengan tenang. Sudah tentu mereka tidak setuju.

Karena menghadapi jalan buntu, maka Engelhart mengambil jalan tipu muslihat. Kembali dikirmnya suatu "Kommissie" yang kini terdiri dari Raja Nolot dan Fati Itawaka (pulau Saperua) dengan tugas menghubungi Umeruti dan memberi tahukan bahwa tuntutan mereka yaitu pemecatan Orangkaya diterimanya. Mereka diajak ke Baileu (balai desa) Paulohy untuk menyaksikan upacara pemecatan itu. Upacara ini benar-benar diadakan sekalipun tidak dihadiri Orangkaya yang masih berada di Makariki. Tetapi Kakiyai yang tidak mau menghadirinya, memberi syarat bahwa perlawanan akan dihentikan bila Orangkaya dan ayahnya sudah dikenakan hukuman buang keluar Maluku Tengah. Sementara itu mereka terus saja melakukan upacara-upacara kecil dalam desa Paulohy yang melambangkan perlawanan.³⁵

Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi Asisten Residen untuk meminta bantuan Kepala Saniri Tala untuk menyaksikan perselisihan ini. Kepala Saniri mengadakan perjalanan ke Elpaputi, berbicara dengan semua pihak. Tetapi pekerjaan meleraikan ini memang memakan waktu yang lama karena membutuhkan serangkaian musyawarah sesuai kebiasaan setempat. Sayangnya kita tidak memiliki dokumen-dokumen mengenai proses musyawarah ini karena tidak pernah dilaporkan oleh Kepala Saniri kepada Asisten Residen. Hanya pada bulan Januari 1837 ia pernah menyurat pada Engelhart di mana ia membenarkan tuduhan Kakiyai dan kawan-kawannya bahwa Orangkaya Paulohy telah melakukan serangkaian tindakan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya sebagai Orangkaya.³⁶

Namun demikian, pada bulan Mei 1837 Kepala Saniri berhasil juga. Sebab itu Asisten Residen Engelhart lalu mengirim suatu "Kommissie" lagi untuk menyaksikan upacara penyelesaian/perdamaian. "Kommissie" kali ini terdiri dari Raja Nolot (pulau Saparua), dan Raja Sena (pulau Seram Tengah). Utusan ^Aepala Saniri, yaitu Kapitan Makuresi, dan ^Aommissie tersebut menemui Markus Kakiayi serta kawan-kawannya di hutan dan melakukan serangkaian perundingan terakhir. Dalam suatu pertemuan yang dihadiri semua Mauwen dan para pemimpin lainnya, penduduk Paulohy memutuskan untuk menerima perintah ^Aepala Saniri untuk mengadakan perdamaian. Sebab, tulis Raja Nolot dan Raja Sepa dalam laporannya, "^Aepala Saniri ada seakan Ibu dan Bapak pada mereka itu, tyada bawleh lawan titahnya."³⁷

Upacara perdamaian dilakukan di Baileu Paulohy (tanpa dihadiri Orangkaya yang masih berada di Makariki), dengan pimpinan Kapitan Makuresi yang menjabat sebagai Utusan resmi dari ^Aepala Saniri.³⁸

VII

Sebagai epilog perlu dikemukakan di sini, bahwa perdamaian pada bulan Mei 1837 itu tidak dihadiri oleh Markus Kakiayi. Bersama sejumlah pengikutnya ia tetap berkeliaran di kalangan tribe sekitar Paulohy.³⁹ Pada tahun 1847 ia merencanakan suatu perlawanan baru.⁴⁰ Kemudian dalam tahun 1855 ia terlibat dalam suatu peperangan antara tribe-tribe itu di bawah pimpinan Mani dan Sahulau melawan pemerintah. Perlawanan ini memakan waktu yang cukup lama, dan pemerintah harus mengerahkan ekspedisi militer untuk mengatasinya.⁴¹ Dalam peperangan yang berkobar di tahun 1857-1858 itu, Markus ^Akakiayi tertangkap. Ketika itu ia sudah menjadi Mauwen Besar. Penangkapan itu dimungkinkan oleh perantara-an Pati Latu, yang dalam Saniri menjabat Utusan ^Aepala Saniri (Siwaleta) dan menguasai wilayah selitar Elpaputih.⁴² Dalam tawanan Markus ^Akakiayi memberi keterangan-keterangan mengenai keadaan kakehan kepada Belanda.⁴³ Setelah itu ia dijatuhi hukuman

mati. Vonnisnya dilaksanakan di Saparua dan jenazahnya tidak dikembalikan ke ^Faulohy tetapi dimakamkan di suatu tempat di bawah tembok benteng Duurstede (onder het placis van het fort Duurstede")⁴⁴. Maksudnya agar kelak tidak timbul suatu kultus di antara penduduk Elpaputih mengenai Kakiayi.

Akibat yang kedua dari peperangan ini adalah diturunkannya sejumlah tribe ke pesisir Elpaputih. Sebenarnya usaha ini sudah dijalankan sejak tahun 1820-an. Beberapa di antara tribe itu memang sudah mulai membangun negeri-negerinya di pantai ketika itu. Tetapi usaha ini senantiasa dihalang-halangi oleh Schulau yang pernah bisa menandingi kekuasaan Kepala Saniri di wilayah itu. Dengan dikalahkannya Schulau pada tahun 1858, dan dipindahkannya tribe ini ke pesisir pula, maka penghalang itupun lenyap. Beberapa tahun kemudian sejumlah pensiunan pegawai Hindia Belanda mencoba membuka perkebunan coklat di sekitar desa-desa baru itu. Ternyata orang-orang pedalaman ini (alifuru) sangat sudah menyesuaikan diri sebagai buruh perkebunan yang dalam tahun 1860-an makin meningkat jumlahnya.

VIII

Perlawanan di ^Faulohy antara 1836-1837 merupakan kejadian yang menarik. Struktur "hostile outburst" seperti itu kemudian banyak berulang, tidak saja di ^Faulohy tetapi hampir di semua desa di wilayah Seram Barat. Terutama sejak pada tahun 1862 sistem monopoli cengkeh di Ambon-Uliase dihapuskan, dan ditingkatkannya usaha-usaha membuka perkebunan swasta di pesisir Seram Barat. Perlawanan-perlawanan sejak tahun 1860-an itu malah makin lama makin meningkat intensitasnya sehingga banyak kemungkinan berubah menjadi perlawanan yang bersifat normatif.

Tetapi sekalipun sejak tahun 1860-an bentuk-bentuk collective-behavior di Seram Barat makin meningkat dalam jumlah dan intensitas, tetapi tidak satupun dari perlawanan-perlawanan itu yang mencakup keseluruhan Seram Barat. Malah tidak ada yang mencakup satu "aliran sungai" sekalipun. Ini memang menimbulkan

masalah untuk memulih salah satunya dari perlawanan-perlawanan ini untuk mewakili yang lainnya. Lebih-labih lagi bila diingat bahwa perlawanan-perlawanan ini baru berakhir pada awal abad ke-20.⁴⁵

Berbeda dengan "hostile outburst" seperti di Paulchy, peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi sebelumnya mempunyai struktur yang sedikit berlainan. Ini terutama nampak dalam peristiwa perselisihan antara Kairatu dan Kamariang (di daerah Tala) antara 1821 sampai 1823 tetapi yang berkepanjangan sampai 1828. Dalam hal ini pihak-pihak yang konflik adalah pihak yang memihak pada Kepala Saniri (Kamariang) dan yang menentangnya (Kairatu). Konflik diakhiri sama sekali dengan dipecatnya Kepala Saniri pada tahun 1828 dan dikenakan hukuman dibuang keluar Maluku.⁴⁶ Ini jelas menunjukkan bahwa cleavage yang menimbulkan conduciveness berlainan dengan struktur peristiwa Paulchy. Beberapa peristiwa lainnya yang terjadi di Kamariang (1834),⁴⁷ kemudian sebelumnya di Maibobo (1822)⁴⁸ juga memperlihatkan bahwa kita harus mencari cleavages lain yang sebenarnya memang ada di semua desa (negeri) pesisir.

Kedua di daerah Sopalewa sebelum tahun 1860-an juga tidak jauh berbeda dengan konflik Kairatu-Kamariang (1823-1828). Di sana pun strukturnya berintikan keinginan Kepala Saniri untuk mempertahankan kekuasaannya.⁴⁹ Malah daerah yang sebelumnya sangat dipengaruhi Raja Jailolo sampai tahun 1828 ini,⁵⁰ lebih rendah dari pada daerah Tala (dan daerah Eti). Salah satu masalah yang menonjol di tahun-tahun 1830-an adalah pertentangan Kepala Saniri dengan penguasa-penguasa dari "Negeri Sembilan" (pesisir daerah keempat di Seram Barat yang berpusat pada Sungai Uli).⁵¹ Terutama yang diperebutkan adalah wilayah Maloan yang terkenal karena ekspor berasnya serta perdagangan pada umumnya. Mungkin sekali tidak termasuk daerah ini dalam struktur Saniri (Saniri Tiga Air) justru disebabkan karena menonjolnya aspek perdagangan, sehingga aspek-aspek kultural lain, seperti upacara inisiasi dan sikap anti unsur-unsur asing yang melekat padanya, tidak bisa lagi berumbuh di sini.

Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahwa perlawanan-perlawanan di Seram Barat sejak tahun 1860-an mempunyai struktur yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Maulohy. Di sini konflik utama adalah antara unsur-unsur sosial-budaya yang asli dan yang asing. Kedua, sebelum tahun 1860-an struktur konflik sangat berbeda dan cleavages yang menimbulkan konflik (conducivehess) harus dicari dalam struktur sosial-budaya setempat

Catatan-catatan

1. Neil J. Smelser, Theory of Collective Behaviour, New York: Free Press.
2. ibid., 222-269.
3. "Inventarisasi Arsip Ambon di Arsip Nasional RI Jakarta 1979" (naskah ketikan).
4. R.Z. Leirissa, "Local potentates and the competition for cloves in early seventeenth century Ternate", Proceedings Seventh IAHA Conference, Bangkok 1977, 310-332.
5. R.Z. Leirissa, "Raja Jailolo", Makalah pada Kongres Sejarah Nasional ke-III di Jakarta (1981).
6. F.A.E. van Wouden, Types of Sosial Structure in Eastern Indonesia, The Hague: Martinus Nijhoff, 1968 (cetakan pertama 1935).
7. A.E. Jensen, Die Drie Ströme. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1948.
8. J.Ph. Duyvendak, Het Kakean Genootschp van Seram, Amelo: 1926.
9. Jensen, op.cit., 59, 74, 75.
10. Menurut van Wouden clan Wemale bersifat exogam saja. Bahan-bahan yang digunakannya memang sangat minim. Van Wouden, op.cit., VI.
11. Jensen, loc.cit.
12. van Wouden, loc.cit.
13. Jensen, loc.cit.
14. Sebenarnya upacara pengayauan tidak hanya disangkutkan pada inisiasi saja karena ada sejumlah upacara lainnya yang memerlukan upacara pengayauan.
15. Nama-nama sungai itu ada di peta.
16. W.K.H. Feuilleteau de Bruyn, "Aanteekeningen over het kakian-verbond" 1916 (naskah Leiden).
17. Duyvendak, loc.cit. Aanteekeningen, loc.cit. Beberapa dokumen di Arsip Nasional RI Jakarta ada yang membahasnya juga. Surat dari Orangkaya Paulohy dalam lampiran Surat Asisten Residen Saparua kepada Gubernur Ambon 15 Desember 1836, 103.

18. Surat dari Orangkaya Paulohy dalam lampiran Surat Asisten Residen Saparua kepada Gubernur Ambon 13 Desember 1836, 103.
19. Ibid.
20. Ibid.
21. Surat dari Orangkaya Paulohy kepada Asisten Residen Engelhart, Paulohy 12 Nopember 1836.
22. Ibid.
23. Surat para Kepala Soa Paulohy yang dilampirkan pada surat dari Orangkaya Paulohy pada Engelhart 12 Nopember 1836.
24. Ibid.
25. Surat Orangkaya Paulohy 12 Nopember 1836.
26. Surat penduduk Paulohy kepada Engelhart 12 Nopember 1836 dan 16 Nopember 1836.
27. Surat Markus Kakiayi kepada Engelhart 12 Nopember 1836.
28. Surat Engelhart 13 Nopember 1836, 103.
29. Ibid.
30. Surat Orangkaya Paulohy kepada Engelhart, Makariki 26 Desember 1836.
31. Surat Orangkaya Paulohy, 12 Nopember 1836.
32. Surat Engelhart 13 Desember 1836.
33. Laporan Raja Nolot dan Raja Tuhaha, 17 Nopember 1836.
34. Surat Engelhart 13 Desember 1836.
35. Laporan Raja Nolot dan Pati Itawaka, 9 Januari 1837.
36. Surat Kepala Saniri Exentus Pesureron kepada Engelhart, 12 Januari 1837.
37. Laporan Raja Nolot dan Raja Sepa, 2 Juni 1837.
38. Ibid.
39. Besluit Gubernur Ambon 28 Januari 1842.
40. Surat Asisten Residen Saparua pada Gubernur Ambon, 18 April 1847.
41. Politiek Verslag 1857 dan Politiek Verslag 1858.
42. Kort Verslag April 1858.
43. Keterangannya antara lain dimuat dalam bukunya E.W.A. Ludeling, Schets van de Residentie Amboina, 's Gravenhage 1808, 67-78.

44. Politiek Verslag 1859.
45. F.J.P. Sachse, Seram, Encyclopaedisoh Bureau, 1922. ;
46. Berdasarkan Besluit Gubernur Ambon tertanggal 15 Juli 1828, 20^kepala Saniri Tala itu dibuang ke Manado (Lota?), dan selanjutnya tidak akan diangkat Kepala Saniri lagi karena institusi ini dianggap menghalangi kepentingan penjajahan. Tetapi ternyata tanpa adanya Kepala Saniri keadaan makin resah, sehingga pada tahun 1831 putera Kepala Saniri yang dibuang ini diangkat menggantikan ayahnya. Dialah yang menangani masalah Paulohy. Atas permintaannya pada tahun 1848 ayahnya yang sudah tua itu dibebaskan kembali (Besluit Gubernur Ambon tertanggal 29 April 1848, 3). Puteranya menjadi Kepala Saniri sampai tahun 1852 (Besluit Gubernur Ambon 4 Juli 1852, 2).
47. Surat Asisten Residen Saparua 14 Nopember 1834, 105. Proces Verbal 18 Nopember 1834, dll. dokumen.
48. Ini menyangkut penempatan Zendeling pertama di Kaibobu (Akersloot) yang ditentang oleh penduduk. Sebelum ditempatkan pada tahun 1822, penduduk Kaibobu (tempat kedudukan Kepala Saniri) sudah menolaknya. Komarahan penduduk diarahkan pada Raja Kaibobu yang dianggap biang keladi penempatan Zendeling tsb. Surat Akersloot di Piru 23 Juli 1822. Surat Raja Kaibobu 23 Juli 1822, Surat Asisten Residen Hila pada Pej. Gubernur 29 Juli 1822, 2. Laporan Portero Ferdinandus 6 Agustus 1822, Surat Asisten Residen Hila 20 Nopember 1822, Besluit 25 Nopember 1923, 1, dan lain-lainnya.
49. Surat Gubernur Ambon 19 Februari 1833; Surat "omandan Saway 27 Nopember 1834, Surat Gubernur Ambon 2 Maret 1835; Surat Asisten Residen Hila 5 Mei 1835; Surat Gubernur Ambon 11 Agustus 1835; dll. Masalah "alcanini berkepanjangan dan tidak terbatas pada masa jabatan satu "epala Saniri saja. Masalah baru sekitar 1860-an masalah ini bisa diputuskan secara administratif, yaitu "alcan secara definitif masuk wilayah Hatuwe ("Negeri Sembilan") karena Hatuwe termasuk wi-

layah administratif Wahay, sedangkan kedudukan Kepala Saniri berada dalam wilayah Karesidenan Hila. ^femisahan inilah yang menghilangkan jejak dalam buku-buku yang ditulis kemudian yang tidak mengetahui dengan pasti kedudukan "Saniri Sungai Uli" dan wilayah Maoloan. Malah istilah Maoloan di masa Sachse (lihat catatan nomor 45) tidak jelas lagi. Dalam penelitian 1933 (lihat Jensen) nama ini sudah tidak ada suatu saniri tersendiri masih ada.

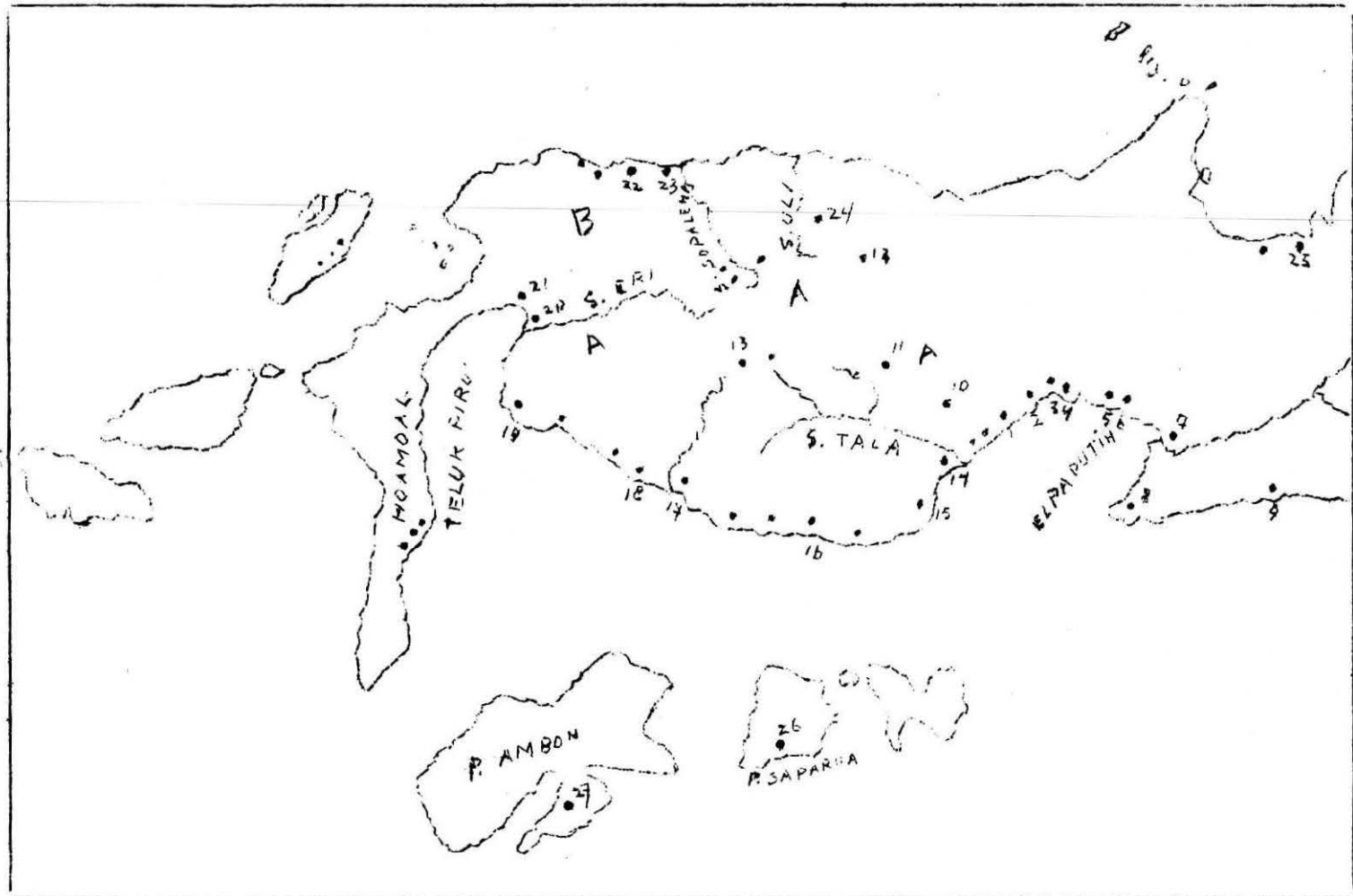
50. Leirissa, "Raja Jailolo", loc.cit.

51. Lihat catatan nomor 49.

SERAM BARAT

1. Paulohy
2. Jamasuru
3. Mani
4. Sahulau
5. Waraka
6. Apisano
7. Makariki
8. Amahay
9. Sepa
10. Somit
11. Watui
12. Ahicle
13. Honitetu
14. Sanahu
15. Latu
16. Kamariang
17. Kairatu
18. Hatusua
19. Kai'chu
20. Eti
21. Piru
22. Nuniali
23. Lisabata
24. Maloan
25. Saway
26. Saperua
27. Amben

A. Wemale
B. Alunc



Seminar Sejarah Lokal

Topik : II .

MENDANGULI PRASARANA UNTUK MENDASAR PENULISAN
SEJARAH LOKAL DEMI INTEGRASI
NASIONAL

Oleh

Sediono M.P. Tjondronegoro

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
S E M I N A R S E J A R A H L O K A L
1982

MENDIRIKAN PRASARANA UNTUK MFRANGSANG PENULISAN
SEJARAH LOKAL DEMI INTEGRASI
NASIONAL

Oleh

Sediono M.P.Tjondronegoro *

I. PENDAHULUAN

Raymond Aron,¹ seorang sejarawan Perancis terkenal pernah menulis -bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris- sbb.:

" In order to know what he is in history man must discover that he belongs to a collectivity which shares a history common to several collectivities. Society and its history represents the environment in which each realizes himself, an environment inflicted upon him, and which he judges. "

Dan ARON menarik kesimpulan bahwa Manusia sebenarnya adalah su-
byek dalam sejarah tetapi juga turut menentukan jalannya sejarah.
Pernyataan seperti dikutip di atas sengaja kami pilih, oleh kare-
na ahli sejarah Perancis yang terkenal itu dengan jelas melihat
kaitan antara manusia, masyarakat (collectivities) dan seja-
rah. Dan dalam pada itu ARON menghayati bahwa manusia dalam hi-
dup bermasyarakat bukan saja dihadapkan dengan berbagai alter-
natif, tetapi harus bertindak dan memilih di antara alternatif,
sehingga hukum eksistensi inilah yang membuat variasi dalam se-
jarah .

Manusia "mewujudkan diri dan kelompoknya" (self realiza-
tion) dengan perbuatan-perbuatan seperti dilemukakan di atas
dan dalam artian itu dapat dikatakan membuat sejarah .

Masyarakat dan kebudayaan kita sebelum masa kemerdekaan
telah mengalami penindasan dan tekanan-tekanan belaka sehingga
mudah dibayangkan bahwa pilihan alternatif pada masa penjaja-
han jauh lebih terbatas dibandingkan dengan masyarakat yang hi-
dup dalam kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Inilah merupa-
kan salah satu keadaan terpenting yang menghambat pertumbuhan se-
jarah lokal .

* Gurubesar Sosiologi pada Institut Pertanian Bogor .

1 Raymond Aron (1936), Introduction a la Philosophie de l'His-
toire. Edisi Inggris, hal. 319.

Sejarah Nasional pun tidak diberi kesempatan untuk berkembang oleh karena tentu perkembangan seperti itu akan membahayakan sistem penjajahan .

Dalam prasaran pendek ini penulis tidak bermaksud mendalami sejarah lokal atau membedakan antara penulisan sejarah Nasional dan sejarah Lokal oleh karena penulis sendiri bukanlah seorang sejarawan, walaupun di bidang yang lebih ditukuni, ialah sosiologi, ilmu sejarah sangat membantu dalam memahami masalah dan menafsirkan keadaan .

Penulis lebih bermaksud mengupas masalah pengembangan sarana dan prasarana untuk merangsang penulisan sejarah lokal yang selama beberapa abad terakhir telah terbengkalai. Selanjutnya perlu difahami juga faktor-faktor apa yang diperlukan untuk melakukan rekaman sejarah lokal yang berfaedah untuk penulisan sejarah Nasional .

II. KESADARAN SEJARAH

Apabila kita artikan kesadaran sejarah sebagai suatu kemampuan bangsa untuk mengenal (mengidentifikasi) diri dalam pertumbuhan mengikuti kronologi, maka mungkin memang kesadaran seperti itu belum terlalu kuat. Satu sebab utama ialah karena dalam beberapa abad yang telah silam kepulauan Indonesia menjadi daerah jajahan bangsa asing, sehingga setiap usaha mengidentifikasi diri sebagai bangsa mendapat tantangan dari pihak penguasa asing secara systematis .

Akan tetapi di samping itu tampaknya juga ada kelemahan - kelemahan tertentu yang melekat pada kebudayaan dan masyarakat suku bangsa-suku bangsa di Indonesia, yaitu bahwasanya kebiasaan merakan dalam bentuk tulisan yang dapat disimpan berabad-abad kurang meluas dan diterapkan. Akibatnya ialah bahwa warisan sejarah lebih banyak dituturkan dari pada diteruskan dalam bentuk buku. Juga sebelum zaman penjajahan bangsa kita yang berada pada fase " semi literacy " mengakibatkan miskinnya warisan sejarah tertulis kita, dari generasi yang terdahulu kepada generasi yang berikutnya .

Pusat-pusat kerajaan kita dahulu benar meninggalkan prasasti dan tulisan-tulisan di atas daun lontar, akan tetapi pada umumnya terjemahan dan/atau transkripsi ke dalam bahasa yang lebih dapat dijangkau oleh khalayak pembaca masih sangat kurang dilakukan .

Satu faktor penghambat lain dalam penyebaran luasan sejarah adalah masyarakat feodal, yang -dimanapun juga- lebih mementingkan perkembangan kebudayaan, termasuk kegiatan kaum sastrawan atau leterati di pusat kerajaan (Negara Agung) .

Memang "sejarah tutur" lebih khas untuk masyarakat petani , dan penyampaiannya dalam bentuk seperti ceritera rakyat (legenda), pantun dan nyanyian sering sudah tercampur dengan perlambangan (symbolism) yang mencerminkan sikap dan falsafah hidup .

Betapapun juga menarik dan indah bentuk-bentuk demikian , sebenarnya fakta dan tafsiran sudah tercampur baur sehingga pada dasarnya sudah berlawanan dengan cara-cara penulisan sejarah yang "obyektif" .

Kesadaran yang timbul akibat perbauran fakta dan penafsiran tadi, disatu pihak melemahkan kesadaran akan waktu (kronologi) dan dipihak lain perlambangan turut mencampuri citra sesuatu kejadian faktual. Fakta semakin didesak oleh lambang yang biasanya terlepas dari 'saat' atau 'masa' dalam pengertian (dimensi) waktu, sedangkan untuk sejarah kronologi itulah sangat penting .

Suatu kejadian sejarah hanya dapat dipahami dalam kronologi tadi . Analisa sejarah pada hakekatnya bertolak dari fakta sebagaimana direkam dan dihayati secara kronologi .

Memang suatu fakta sejarah untuk berbagai lapisan masyarakat dapat difahami dan ditafsirkan berbeda, menurut pandangan hidup masing-masing lapisan. Justru tugas sejarawan yang obyektif adalah memahami pola-pola penafsiran seperti itu untuk dapat melakukan rekaman yang 'obyektif', seyogyanya tanpa bias kepada salah satu lapisan .

Demikian sebenarnya cara penulisan sejarah obyektif menggambarkan peranan yang dimainkan berbagai kelompok masyarakat sehingga pendekatan seperti ini lebih erat kaitannya dengan sejarah sosial.

Untuk ilmu sosiologi sejarah dalam perspektif demikianlah yang sangat membantu dan berfaedah, justru karena manusia mempunyai naluri hidup dalam kelompok (collectivity) .

Ini tidak berarti bahwa pendekatan sejarah lain tidak ada . Sebaliknya tampaknya sejarah 'cara mempelajari sejarah' yang dikenal adalah justru berdasarkan mengkisahkan tokoh-tokoh dan peribadi-peribadi yang sebagai individu memainkan peranan yang menonjol. Sejarah kaisar-kaisar dan raja-raja sebagai penguasa dengan segala keanehan masing-masing jauh lebih banyak mengisi halaman-halaman dalam buku sejarah dunia dari pada 'sejarah rakyat', 'sejarah kelompok' dsb.

Bahan dasar untuk penulisan sejarah tokoh-tokoh relatif lebih mudah diperoleh, bahkan tidak jarang sastrawan yang merekam kehidupan tokoh-tokoh diberi imbalan untuk pekerjaannya, sehingga perhatiannya adalah 'sentris' pada tokoh tersebut. Biografi atau otobiografi merupakan sumber yang umum dimanfaatkan dalam pendekatan ini.

Kesadaran sejarah lebih dapat dipupuk dengan sejarah tokoh-tokoh yang mengabdikan pada rakyat dan negaranya; tokoh seperti itu dapat dilihat sebagai eksponen dari pada kelompok yang lebih besar. Sejarah yang mempelajari tokoh dalam segi-segi kepribadiannya mungkin semakin kurang penting apabila kita ingin mengembangkan sejarah lokal .

Karena pertimbangan-pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah lokal yang ingin kita kembangkan mungkin lebih dekat kepada sejarah sosial dari pada kepada sejarah tokoh-tokoh dan kepribadian mereka semata-mata .

III. REKAMAN SEJARAH

Dari pokok-pokok pengarahan yang diberikan oleh Panitia Pengarah Seminar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran akan perlunya sejarah sosial sudah lebih menonjol. Misalnya sub-thema yang disarankan hampir semua mengandung segi kemasyarakatan sebagai yang kami kemukakan : (a) stratifikasi sosial dan pola kepemimpinan lokal; (b) dinamika masyarakat pedesaan; (c) pendidikan se -

bagai faktor dinamisasi sosial, dan (d) komunikasi antar daerah , antar sukubangsa dan pembauran .

Agaknya peranan tokoh-tokoh dalam masyarakat kecil (community) dan besar (society) sudah cukup diperhatikan sejarawan dan direkam tanpa ada rangsangan yang khusus. Memang rekaman sejarah dalam masyarakat feodal lebih cenderung berpusat pada penguasa. Jasa-jasa kaum sastrawan dan literati yang merekam biografi penguasa lebih dirasakan di pusat-pusat kerajaan dahulu kala .

Merekam sejarah dengan berpijak pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak memang merupakan pendekatan yang lebih mutakhir, dan tidak mengherankan apabila di negara kita kekurangan inilah yang sangat dirasakan setelah bangsa kita dijajah selama beberapa abad .

Selama rekaman dilakukan oleh penulis-penulis di pusat juga terdapat bias penafsiran ke pusat. Bahkan kadang-kadang orang asing yang berasal dari luar lingkungan kebudayaan sendiri lebih mampu menulis dan menafsirkan secara obyektif .

Di kepulauan Nusantara kita dahulu kala kelihatannya juga tidak dikenal pusat-pusat kaum literati lain di luar pusat kerajaan yang merekam sejarah dengan pandangan yang 'bukan pusat' . Seperti di benua Eropah misalnya dalam abad pertengahan dikenal biara-biara sebagai pusat penampungan dan pemeliharaan ilmu. Bahkan kebiasaan merekam beberapa jenis statistik, misalnya registrasi kelahiran dan kematian, dilakukan oleh biarawan-biarawan sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di lingkungan masyarakat biasa. Tradisi asing ini juga dikenal di Indonesia, dan sampai sekarang missie atau zending masih bekerja di daerah-daerah yang relatif terpencil (Irian Jaya, Flores, Timor Timur dsb) .

Mereka karena itu mengetahui keadaan setempat lebih baik dari pada penguasa-penguasa di daerah yang berpusat di kota kecil . Di kalangan sementara birokrasi asing pada zaman penjajahan telah timbul kebiasaan juga untuk menulis sejarah setempat, sebagai pelengkap laporan-laporan dinas yang harus ditulis oleh pamong tersebut .

Mereka umumnya memang sudah diberi latihan di lingkungan universitas sebelum dikirim ke Hindia Belanda .

Kebiasaan seperti itu masih kurang tampak di kalangan birokrasi kita setelah zaman kemerdekaan, dan mungkin memang latar belakang banyak penguasa daerah dewasa ini tidak mengandung kepekaan untuk merekam sejarah di lingkungan mereka melakukan tugas .

Sejarah lokal yang berniat merekam 'sejarah sosial' daerah, sebagai mana dikemukakan dalam empat sub-thema di atas memang membutuhkan lebih banyak latihan dari pada yang dimiliki rata-rata birokrat di daerah sekarang. Berarti sementara ini bukan merekalah yang dapat diandalkan sebagai perekam sejarah lokal .

IV. PENGEMBANGAN SARANA

Dapat dipertanyakan siapakah yang dapat disertai perekaman sejarah lokal yang tidak mempunyai bias yang terlalu kuat pada penguasa semata-mata ?

Jawabannya rasanya tidak terlalu sukar, dan perlu kita cari di dalam gugus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lain dari pada zaman penjajahan sekarang kita telah memiliki guru-guru sekolah lanjutan yang tersebar jauh dari pusat dan peminat-peminat terhadap sejarah, guru-guru sejarah di kalangan guru tingkatan itulah yang tampaknya paling dekat dengan 'perekam sejarah' lokal yang kami bayangkan. Kedudukan sosial mereka sedikit di 'ketepian' tidak sepenuhnya mempunyai bias ke pusat, dan cukup hidup di tengah-tengah masyarakat untuk dapat menghayati kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak .

Pengembangan sarana seperti dikemukakan di atas mungkin juga tidak dapat dilakukan sekaligus dan serentak, tetapi harus secara bertahap mengingat dana dan sarana serta tenaga pelatih yang terbatas . Apabila pada tingkat Kabupaten belum dapat dimulai menyiapkan perekam-perekam sejarah di kalangan guru sekolah lanjutan mungkin dapat dimulai di tingkat propinsi. Dari masa ke masa pengertian 'lokal' (yang kami artikan sebagai tingkat sub-Nasional) masih dapat diperinci sehingga akhirnya memang dapat menjangkau daerah pedesaan .

Pada tahun 1960-an beberapa Propinsi telah mulai dengan menulis monografi daerah dan itu sebagai pangkal tolak -walaupun belum dapat disamakan dengan penulisan sejarah lokal- sudah merupakan usaha awal yang perlu di sokong .

Beberapa Propinsi di wilayah Indonesia yang mempunyai latar belakang sejarah yang agak menentukan dalam pertumbuhan bangsa dan budaya kita mungkin dapat didahulukan dan diberi prioritas yang lebih tinggi dari pada Propinsi lain yang mungkin sekarang mempunyai bobot ekonomi yang besar tetapi dalam artian integrasi sosial (kesadaran nilai dan budaya etc) kurang artinya .

Usaha ini sedikit mengingatkan kita pada kebutuhan angkatan bersenjata Amerika Serikat dalam perang dunia kedua untuk mengerti masyarakat-masyarakat kecil di daerah Pasifik, akhirnya turut merangsang diadakannya studi-studi anthropologi. Seri Human Relations Area Files merupakan sumber rekaman yang kaya dan sangat menambah pada pengetahuan mengenai kebudayaan dan masyarakat yang tergolong sederhana dan belum mempunyai landasan industri .

Sudah dijelaskan bahwa salah satu tugas penting ilmu sejarah adalah menemukan kebenaran, dan sejarah masyarakat manusia memerlukan kesadaran akan kepentingan masa silam sebagai subyek studi untuk lebih dapat menghayati "self realization" manusia pada zamannya. Perilaku manusia dan fungsi kebudayaan kontemporer lebih dapat kita mengerti setelah menyelami masa yang silam itu . Justru, karena menurut Raymond Aron, sejarah tidak beranggapan bahwa garis tradisi diwariskan secara linear dan bahwasanya masyarakat manusia dapat mengadakan 'pilihan' antara beberapa alternatif merekam sejarah sangat bermanfaat untuk mengikuti liku-liku pertumbuhan masyarakat dalam berbagai aspeknya .

Untuk lebih merangsang penulisan sejarah lokal dapat diselenggarakan lomba penulisan sejarah di tingkat Nasional. Berbagai musea yang sudah ada dapat diberi subsidi untuk memelihara dan mengembangkan koleksi, terutama buku dan dokumen tertulis lain. Lambat laun penulisan sejarah regional berdasarkan tulisan sejarah lokal dapat diseminarkan untuk menemukan titik-titik temu secara obyektif.

Dalam hal ini ada pra anggapan bahwa sejarah Nasional dan sejarah Lokal dapat ditulis secara simultan sambil mengadakan saling penyesuaian melalui dialog yang obyektif dan konstruktif .

Semakin sejarah lokal dapat dipercepat penulisannya semakin cepat pula penulisan sejarah Nasional dapat diberi umpan balik . Akan tetapi di samping itu sejarah lokal juga mempunyai kehidupan sendiri dan sesuai dengan lambang negara kita BHINEKA TUNGGAL IKA kehidupan itu harus dihormati. Proses ini perlu dirangsang dan ada kalanya dialog akan mengalami saat-saat kritis akibat perbedaan tafsiran. Namun demikian dialog ini sendiri mengandung kekayaan sejarah yang tak terhingga, sambil merangsang generasi-generasi berikut untuk menghormati proses mencari kebenaran melalui sejarah yang direkam pada tingkat Nasional maupun Lokal .

V. KESIMPULAN

- Sebagai telah digariskan oleh Panitia dalam penentuan sub - thema dapat disetujui bahwa dalam penulisan sejarah lokal tekanan diberikan kepada 'sejarah sosial' ,
- Dalam membangun sarana untuk rekaman sejarah lokal seyogyanya prioritas diberikan kepada guru-guru sekolah lanjutan yang mengajar sejarah ,
- Kepada mereka dapat diberikan latihan-latihan khusus untuk mencari format penulisan yang dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu ,
- Penulisan sejarah Lokal pada tingkat sub-Nasional dapat dimulai pada tingkat Propinsi atau Kabupaten, tergantung dari pada potensi tenaga yang tersedia ,
- Dalam memilih Propinsi/Kabupaten kriterium "sumbangan kepada kebudayaan bangsa" dapat dipakai sebagai salah satu tolok ukur atau kriterium ,
- Tenaga-tenaga yang merekam sejarah dapat diberi rangsangan melalui lokakarya dan perlombaan berhadiah ,
- Dialog antara tingkat Nasional dan Lokal perlu dipelihara untuk mencapai kebenaran dan tingkat kejujuran yang tinggi dalam merekam sejarah .

SUMBER ACUHAN :

- BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DAERAH (1965)
 Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah Djawa Barat, Tahun
 1945 - 1965. Bandung
- GEERTZ, C. (1965)
 The Social History of an Indonesian Town. Cambridge, Mass.,
 The M.I.T. Press
- GRAAF, H.J. de dan Th.G.Th. Pigeaud (1974)
 De Eerste Moslimse Vorstendommen op Java; Studiën over de
 staatkundige geshiedenis van de 15e en 16e eeuw.
 'sGravenhage, Martinus Nijhoff
- KARTODIRDJO, Sartono (1973)
 Protest Movements in Rural Java. Singapore, Oxford U.P.
- POERWOKOESOEMO, Soemartono (1960)
 Monografie Kabupaten Wonosobo, Daerah Kedu, Propinsi Jawa
 Tengah. Djakarta, Djawatan Pertanian Rakjat Pusat .
- ARON, Raymond (1962)
 Introduction to the Philosophy of History. Boston, Beacon
 Press.
- SEMINAR Pengembangan Kebudayaan Dalam Rangka Pembangunan
 Nasional. Jakarta, Juli, 1978 (Laporan LIPI)

ooooooooLEoooooooo

SEMINAR SEJARAH LOKAL

TOPIK : II

DARI SUBSISTENSI KE PERDAGANGAN
DESA PANTAI MARIBAYA : 1950 - 1978

oleh :

dra. A.M. Djulianti Suroyo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

DARI SUBSISTENSI KE PERDAGANGAN

DESA PANTAI MARIBAYA : 1950 - 1978

Pengantar

Tulisan ini merupakan hasil penelitian awal sejarah pedesaan masa kini. Sebagai penelitian awal baru dapat mengungkapkan secara deskriptif perkembangan suatu desa pantai, dengan terutama menyoroti satu aspek saja, yaitu aspek sosial ekonomis.

Dengan menonjolkan aspek sosial ekonomis ini kami mencoba menampilkan dinamika masyarakat pedesaan, dalam menghadapi alam yang harus mereka taklukkan dan manfaatkan, untuk mempertahankan hidup mereka. Dinamika ini menampilkan diri pada ketajaman mereka untuk memilih alternatif-alternatif dari berbagai usaha, baik usaha tani maupun usaha non tani, yang dapat menguntungkan, atau yang terjangkau oleh kemampuan modal mereka. Bahwa orang-orang desa mempunyai kepekaan akan permintaan pasar yang sedang banyak dicari. Bahwa mereka dapat mencoba usaha baru yang memberi harapan, atau menghentikan usaha lama yang merugikan. Bahwa mereka cukup hati-hati dan penuh perhitungan untuk memanfaatkan fasilitas atau kesempatan yang diberikan pemerintah. Mereka terbuka dengan pengaruh luar, namun juga mempunyai kepribadian untuk mempertahankan lingkungan dan milik masyarakat mereka yang dipandang baik.

Desa yang dipilih untuk penelitian adalah desa yang sepiintas lalu sangat biasa. Tiada sesuatu yang menonjol di bidang sosial budaya, misalnya mempunyai tradisi wayang atau ketoprak yang mendalam, atau kesenian Islam yang tinggi. Tidak pula menonjol di bidang sosial politik, misalnya pernah menjadi pusat gerakan tertentu, atau pusat suatu pemberontakan. Bahkan juga tidak sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menonjol seperti pusat kerajinan tangan, batik atau pelabuhan nelayan sekalipun. Namun dari tipe desa yang tidak istimewa ini ternyata mengandung dinamika kehidupan yang cukup unik, bagaimana mereka menanggapi tantangan alam, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Desa Maribaya juga menunjukkan salah satu tipe desa pantai, yaitu desa yang berbatasan dengan pantai, atau yang dipengaruhi ekologi pantai.

Anggapan umum bahwa desa di pantai adalah desa nelayan ternyata tidak seluruhnya benar. Justru sebagian besar desa di pantai adalah desa tambak, kemudian desa nelayan, dan desa pertanian menempati jumlah terkecil¹. Desa Maribaya merupakan desa pertanian, meskipun terdapat sedikit pertambakan.

Penelitian awal yang menghasilkan tulisan ini menggunakan metode wawancara, dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara mengenai masalah-masalah yang ditanyakan. Selain itu juga dilengkapi dengan pengamatan lapangan, serta acuan dari beberapa bahan pustaka.

Asal Usul Nama Desa Maribaya

Dari orang-orang tua yang masih mengenal legenda asal usul nama desa ternyata terdapat beberapa versi. Di sini kami kemukakan hanya 2 versi sebagai pembanding.

Versi I : Pada jaman dahulu di daerah ini terdapat 3 orang penguasa yang saling bersaing untuk menjadi penguasa tunggal. Mereka bernama Karnadita, Saralingga dan Patrajiwa, yang saling berperang satu sama lain. Akhirnya Karnadita dapat dikalahkan dan diasingkan di desa lain. Karena Karnadita senang makan asinan, maka desa tempat ia diasingkan dinamakan Pengasinan. Sungai yang dipakai sebagai batas desa tersebut dinamakan Sungai Patrajiwa, menurut nama sang Patrajiwa. Akhirnya Patrajiwa juga dikalahkan, hingga Saralinggalah yang menjadi pemenang. Karena peperangan tersebut, rakyat mengungsi ke tempat yang aman, dan tempat tersebut diberi nama Maribaya (Jawa : mari seka bebaya, lepas dari bahaya). Saralingga diakui rakyat sebagai pemimpin mereka dan menjadi pendiri desa (cikal bakal) Maribaya. Kini Pengasinan merupakan salah satu dukuh dari desa Maribaya, sedang sungai Patrajiwa merupakan batas desa sebelah Selatan.

Versi II : Alkisah, seorang utusan dari Majapahit akan menyerahkan senjata keramat bernama Kudi Crenceng Agung kepada seorang penduduk bernama Empu Kasan (dalam versi lain bernama mbah Somo-do). Karena Kasan tidak di rumah, maka Kudi tersebut ditanam di dalam tanah. Tempat tersebut kemudian dinamakan desa Kramat

(kini menjadi Kecamatan Kramat). Setelah Empu Kasan kembali, ia dapat menemukan senjata tersebut, berkat tanda yang diletakkan di atasnya, yaitu sebuah kendang.

Suatu hari ketika Kasan bersemadi, seorang wanita cantik datang menggodanya, namun Kasan tetap teguh bersemadi. Kemudian datang serombongan perahu bajak laut. Demi dilihatnya wanita tersebut, mereka menanyakan siapakah wanita cantik itu. Kasan menjawab bahwa itu ibunya. Bajak laut menjadi marah dan menantang adu kesaktian. Bajak laut dengan golok saktinya menyuruh pohon kelapa meliukkan batangnya ke bawah untuk dipetik buahnya. Dan benar batang kelapa tersebut meliuk ke bawah. Kasan memetik kelapa muda dan diberikan kepada 39 orang bajak laut. Ternyata ke 39 orang tersebut mati setelah meminum air kelapa muda. Seorang yang belum meminumnya mohon ampun kepada Empu Kasan agar diselamatkan. Kasan memperbolehkan ia berlayar. Tetapi perahunya kemudian dihempaskan ombak kembali ke pantai, namun ia selamat. Tempat tersebut kemudian diberi nama Maribaya, lepas dari bahaya.

Terlepas dari benar tidaknya legenda asal usul nama desa tersebut, dapatlah disimpulkan beberapa hal penting. Di satu pihak, desa ini ternyata mempunyai tradisi lokal yang kuat, di mana para tokoh berasal dari desa sekitar, bukan dari utusan suatu kerajaan besar di luar desa (versi I). Hal ini menunjukkan identitas desa sebagai suatu kesatuan masyarakat yang mandiri. Di pihak lain, dalam versi II, nampak adanya hubungan dengan pusat kekuasaan yang lebih besar, pusat kebudayaan besar, yaitu Majapahit, dalam bentuk senjata pusaka yang diberikan kepada Empu Kasan hingga ia menjadi lebih sakti. Dengan demikian desa juga mempunyai hubungan dengan kekuasaan yang lebih besar atau dengan peradaban besar. Redfield menganalisa hubungan ini dari segi interaksi kebudayaan. Bahwa kebudayaan masyarakat tani, atau masyarakat desa di sini, suatu masyarakat asli yang akrab dengan alam, disebut dengan istilah "kebudayaan kecil" (Little Tradition), selalu mengadakan interaksi dengan "kebudayaan besar" (Great Tradition) dari suatu pusat kerajaan atau agama besar, dan mengadakan akulturasi, hingga terciptalah tradisi agama di desa-desa, atau kesenian kraton seperti gamelan yang digemar di desa.² Konsep hubungan masyarakat petani dengan kekuasaan politik yang lebih besar lebih lanjut dijelaskan oleh

Wolff dari segi hubungan struktural. Bahwa suatu masyarakat petani (di Jawa dapat disamakan dengan desa) selalu merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar, dan mempunyai kedudukan di bawah dari kekuasaan negara, di mana kekuasaan tersebut dapat menuntut berbagai hal, misalnya pajak.³ Namun teori ke dua antropolog tersebut perlu dikaji dengan fakta sejarah. Apabila kita menerima teori bahwa tradisi desa sebagai "tradisi kecil", maka akulturasi dengan "tradisi besar" akan sangat tergantung kepada tanggapan masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa Maribaya tidak menampakkan pengaruh yang kuat, baik dari kebudayaan kraton, maupun kebudayaan Islam yang mendalam. Mungkinkah hal itu disebabkan letaknya yang jauh dari pusat kerajaan besar seperti Demak atau Mataram? Demikian pula ceritera mengenai hubungan pusat dan desa, seperti tercermin pada penyerahan senjata sakti dari Majapahit kepada Empu Kasan (versi II), tidak pula mengakibatkan hubungan sub ordinasi yang nyata. Kiranya ceritera tersebut lebih untuk memperoleh karisma dari kebesaran Majapahit, guna mempertinggi kedudukan dan wibawa tokoh lokal. Meskipun kewajiban membayar pajak, tenaga kerja dan upeti dari desa-desa kepada raja di sebagian besar daerah di Indonesia menunjukkan kebenaran teori Wolff. Hal lain dari legenda tersebut adalah bahwa persaingan, pertentangan dan peperangan antara tokoh-tokoh desa dapat terjadi, baik pada jaman dahulu, maupun waktu-waktu kemudian. Hal ini lebih menguatkan pendapat, bahwa desa bukanlah tempat yang selalu tenteram, aman, rukun dan tidak berubah, melainkan banyak juga persaingan, perselisihan, dan perubahan seperti masyarakat lainnya.⁴

Perkembangan Wilayah dan Migrasi Penduduk.

Bilamana desa Maribaya didirikan, tak seorangpun mengetahuinya. Yang sudah jelas, nama desa ini telah tercantum dalam laporan kolonial mengenai pemilikan tanah dan kerjawajib negara pada tahun 1988.⁵ Pada jaman Belanda desa Maribaya masih terdiri dari 2 desa, yaitu desa Maribaya di sebelah Timur dan Desa Pengasinan di sebelah Barat. Kira-kira tahun 1930 Desa Pengasinan digabungkan pada Desa Maribaya. Penggabungan tersebut akibat persengketaan ke dua orang lurah dari kedua desa tersebut mengenai tanah bengkok (tanah jabatan pengganti gaji). Tanah bengkok lurah Pengasinan sebagian terletak di desa Maribaya, tetapi lurah Maribaya tidak mengakuinya. Hal

ini menjadi sengketa yang berlarut-larut. Pemerintah Kolonial akhirnya memutuskan penggabungan kedua desa. Karena Desa Pengasinan yang jauh lebih kecil, ialah yang digabungkan ke dalam Desa Maribaya. Dengan demikian hanya ada seorang kepala desa atau lurah, dengan tanah bengkok yang cukup besar⁶. Apakah dengan tindakan ini konflik berakhir, tidaklah jelas. Sejak itu tidak terjadi perubahan batas wilayah desa.

Migrasi penduduk rupanya terjadi sejak jaman dahulu. Migrasi alamiah terjadi akibat komunikasi antar desa. Seseorang bermukim di desa tangganya karena perkawinan, atau karena mendapat pekerjaan di desa tersebut, atau karena alasan pribadi ia lebih baik pindah ke desa lain. Namun sekali-sekali terjadi juga gelombang migrasi yang agak besar dari luar desa ke Desa Maribaya. Setelah penggabungan desa tahun 1930, pernah terjadi perpindahan penduduk dari Kali Prahi (daerah Pemalang) ke Maribaya. Sebab perpindahan tidak jelas. Pada waktu itu masih tersedia tanah kosong yang belum diolah, hingga para pendatang dapat mengerjakan tanah tersebut untuk nafkahnya. Gelombang ke dua perpindahan penduduk terjadi sekitar tahun enam puluhan, ketika mulai ditanam melati sebagai tanaman perdagangan. Usaha ini menarik buruh-buruh tani untuk bekerja di kebun melati, juga buruh tani dari luar desa. Banyak dari mereka kemudian bermukim di Maribaya karena perkawinan, dan mengusahakan juga tanaman melati kecil-kecilan, bila punya tanah. Usaha melati yang makin baik sampai saat penelitian dibuat (1979) menarik buruh-buruh tani ke desa ini yang merupakan migrasi musiman.

Selain gerakan dari luar desa ke desa terjadi pula perpindahan penduduk dari desa ke luar desa. Misalnya terjadi ketika masa packlik panjang sekitar tahun 1955 dan 1963. Berapa jumlah yang pergi tidak diketahui. Tidak jelas pula apakah mereka pindah untuk seterusnya, atau untuk sementara sampai pertanian kembali menjadi baik. Juga migrasi musiman ke kota pada waktu tidak banyak kerja pertanian tidak diketahui jumlahnya. Menurut kesan orang di desa jumlahnya tidak banyak, karena hanya 12 km dari kota besar (Tegal) dengan transportasi yang sangat mudah.

Pada tahun 1978 jumlah penduduk Maribaya adalah 2.603 orang, dengan luas desa 319,142 Ha, atau mencapai kepadatan penduduk 816/km².

Secara singkat perkembangan penduduk Maribaya dipengaruhi faktor alamiah (pertumbuhan karena bertambahnya anak dan perkawinan) maupun karena faktor ekonomis, dengan kadar yang lebih kecil.

Perkembangan Sosial Ekonomi : 1950 - 1978.

Seperti telah di singgung sebelumnya, Maribaya tidak berperanan dalam peristiwa sejarah di bidang politik, baik tingkat nasional, daerah maupun tingkat lokal. Demikian pula peranannya di bidang sosial budaya. Lain halnya dengan bidang sosial ekonomi. Bidang ini mencakup usaha-usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya yang dihadapi setiap hari, serta memelihara kehidupan bermasyarakat dengan orang-orang lain. Kondisi masyarakat dan lingkungan dapat sangat berbeda, sehingga menghasilkan perkembangan yang berbeda pula antara daerah yang satu dengan yang lain. Dinamika masyarakat akan nampak dalam bagaimana mereka memilih atau menciptakan alternatif-alternatif dalam kondisi tertentu. Bagaimana mereka menerima hal-hal baru yang baik dan menguntungkan, atau menolak hal-hal yang merugikan atau bertentangan dengan keadilan atau moralitas mereka.

Desa Maribaya terletak 12 km di sebelah Timur kota Tegal, ditepi jalan raya Jakarta - Semarang yang padat lalu lintas. Desa ini merupakan desa pantai, dari tipe desa pertanian, yaitu sebagian besar penduduknya mendapatkan nafkahnya dari pertanian. Sejak dahulu desa ini tak pernah menjadi pelabuhan nelayan, penduduknya pun tak pernah menjadi nelayan. Mungkin hal ini berhubungan erat dengan ekologi daerah Maribaya. Adanya dua sungai di batas Timur dan Barat yang bermuara di pantai menimbulkan endapan lumpur yang terus menerus, membentuk daratan baru kurang cocok untuk pendaratan perahu. Sebaliknya tanah di sini cocok untuk pertanian maupun tambak. Tanah desa bagian Utara yang terjadi dari endapan lumpur berair payau (campuran air asin dan air tawar), baik untuk usaha tambak atau pertanian bukan padi. Sedang tanah sebelah Selatan jalan raya, meliputi areal terbesar sangat baik untuk pertanian, karena berair tawar. Dari kondisi ekologis ini rakyat banyak mengusahakan pertanian dan pertambakan, dan perkembangan di bidang ini paling menonjol. Baru kemudian usaha lain, yang akan diuraikan seperti berikut.

a. Perkembangan pertanian dan pertambakan.

Sobelum tahun 1950 an petani Maribaya bertani padi dan pala-

wija, kacang tunggak dan cabai, serta bawang merah. Saluran tersier yang telah dibangun pada jaman Belanda mengairi 91 Ha sawah, sedang 32 Ha sawah mendapat air dari irigasi 1/2 teknis (sawah tadah hujan). Hasil panen selain untuk mencukupi kebutuhan sendiri dijual lewat tengkulak-tengkulak yang datang ke desa. Dengan demikian para petani telah memproduksi tanaman untuk pasar, meskipun merupakan kelebihan dari yang dikonsumsi, atau karena memerlukan uang kontan untuk membeli kebutuhan yang lain. Pertanian waktu itu masih terbatas pada pertanian subsistensi.

Setelah tahun 1950 petani mulai melihat kemungkinan pengembangan usaha lain, yaitu pertambakan. Kemungkinan mereka mencontoh desa-desa tetangganya, misalnya di Kecamatan Losari, di mana tambak sudah diusahakan sekitar tahun 1940 an, dengan menggunakan jenis tanah yang sama, yaitu tanah endapan lumpur yang telah mengeras. Terutama juga mereka mendapat dorongan dengan adanya tambak percontohan yang diusahakan Dinas Perikanan Kodya Tegal pada tahun 1954 di Maribaya. Karena usaha tambak memerlukan inventasi modal yang besar, maka terbatas kepada beberapa petani yang mampu saja. Di Maribaya hanya 6 orang pertambak dari sejumlah 565 keluarga. (1978). Usaha tambak bandeng menambah pendapatan petani, karena ikan bandeng sangat laku di pasar di kota-kota.

Namun usaha ini mengandung risiko besar, karena tingginya mortalitas bibit bandeng (nenor), disamping panen bandeng jauh lebih lama daripada panen padi (bandeng sotolah 6 - 8 bulan, sedang padi unggul 3 - 4 bulan). Maka meskipun sampai saat ini petani tambak masih terus mengusahakan tambak bandeng, namun usaha mereka tidak meningkat atau meluas di desa ini. Disamping karena faktor alam, produksi bandeng di sini lebih kecil daripada di desa-desa lain.

Perkembangan di bidang pertanian sangat baik setelah tahun 1966 setelah pemerintah mengusahakan peningkatan produksi pangan melalui Pelita I, II dan III. Hal ini terjadi pula di Maribaya. Para petani yang semula memakai bibit lokal seperti osog, andel, cempa, dapat panen 2 kali setahun, kini memakai bibit unggul seperti IR 36 dan IR 28 dapat menanam 3 kali setahun, karena penanaman padi sampai panen

hanya 3 bulan atau 4 bulan dengan pembibitan padi. Meskipun dalam kenyataan hanya 2 kali menanam dalam setahun, karena tanah harus diistirahatkan. Meskipun biaya menjadi tinggi karena ditambah pupuk dan obat hama, namun hasil yang diperoleh dapat 3 kali lipat daripada bibit yang lama. Hal yang menarik adalah bahwa petani cukup hati-hati untuk mengambil kesempatan kredit BIMAS. Setelah mendapat pengalaman yang pahit, misalnya bibit dan pupuk datang sangat terlambat, sebagian petani tidak lagi mengikuti BIMAS, melainkan mengusahakan sendiri bibit dan pupuk serta obat hama. Dengan demikian mereka mengambil alih teknologi padi tanpa harus terikat kepada hal-hal yang bisa merugikan. Tentu saja ini hanya dapat dilakukan oleh petani kaya yang dapat membeayai sendiri pengelolaan sawahnya.

Pada tahun 1966 petani Maribaya mengembangkan tanaman perdagangan secara besar-besaran, yaitu melati. Bunga melati yang belum mekar dipergunakan untuk campuran teh konsumsi dalam negeri, yang banyak diperlukan pabrik-pabrik teh di Jawa Tengah. Konsumsi teh yang makin naik di dalam negeri membutuhkan banyak bunga melati. Ternyata dengan pupuk buatan (urea) yang cukup, pohon melati dapat terus menerus berbunga lebat. Tanaman melati merupakan tanaman keras (perennial crop) yang mudah pemeliharaannya. Tidak perlu banyak air, tahan hujan, tahan air payau, dan cocok dengan tanah pasir bercampur tanah liat seperti banyak terdapat di Maribaya dan tanah pesisir Utara Jawa. Kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani. Tanaman yang telah ada sejak awal tahun lima puluhan ini dipacu oleh beberapa petani kaya dengan perluasan kebun, terutama tanah kering dimanfaatkan, penggunaan pupuk dan obat hama, penanaman bibit melati unggul. Setelah mulai berbunga (setelah 8 bulan), melati dapat berbunga setiap hari, hingga dapat memberikan pendapatan setiap hari. Usaha baru ini segera diikuti oleh petani-petani lain, kaya maupun miskin, hingga petani melati melebihi jumlah petani padi, meskipun untuk petani kecil sifatnya sebagai tanaman sampingan, yang dapat menambah sedikit uang setiap hari. Usaha melati mempunyai sifat yang luwes, dapat diusahakan dengan modal besar dan tanah yang luas, dapat pula dengan modal kecil. Karenanya dapat memberikan keuntungan kepada segala lapisan. Namun,

usaha ini sangat tergantung kepada kekuasaan pabrik-pabrik teh yang memerlukannya. Umur bunga melati tidak lebih dari 12 jam untuk dapat diproses di pabrik, lebih dari itu tidak dapat dipergunakan. Ketidakmampuan petani mempertahankan harga menyebabkan keuntungan dari melati adalah marginal. Bahkan makin sedikit produksi melati, makin tinggi dapat ia memberi harga.

Sejak tahun 1970 an pertanian di Maribaya makin banyak mengadakan diversifikasi, baik dari modal penduduk setempat, maupun modal dari luar desa. Perluasan areal tebu dari pabrik gula, menyebabkan beberapa petani kaya menyewakan tanahnya untuk penanaman tebu, baik sistem sewa biasa, maupun sistem bagi hasil (Tebu Rakyat Intensifikasi). Dibandingkan dengan tani padi, tebu pada umumnya kurang menguntungkan menurut petani yang bersangkutan. Namun ia memperoleh uang sewa, dan tidak perlu menanggung risiko.⁷ Selain tebu, penanaman bawang merah dan cabai secara komersial dilakukan di Maribaya oleh sebuah kongsi dari luar desa, dengan cara menyewa sawah penduduk per tahun. Tanah ini memerlukan modal yang lebih banyak daripada padi, karena bibit lebih mahal dan sangat peka terhadap hama. Namun juga padat karya seperti padi, dan hasil penjualan dapat lebih tinggi dari padi atau lebih rendah. Oleh karena itu petani kecil tidak tertarik menanam bawang, karena kurangnya modal, risiko tinggi dan tidak menguasai pasar.

Dengan makin banyaknya tanaman perdagangan (cash crops), luas tanam padi berkurang dibandingkan tahun-tahun 50 an. Demikian pula tanaman palawija, bahkan makin berkurang karena tordesak tanaman melati. Tetapi hal ini tidak mengakibatkan kekurangan pangan pada penduduk, karena produksi padi justru naik akibat teknologi, dan pendapatan petani baik dari hasil produksi maupun dari upah buruh dapat dibelikan bahan pangan dipasar desa lain.

Usaha di bidang peternakan nampaknya tidak mengalami banyak perubahan kuantitatif maupun kualitatif dari jaman sekitar tahun 50 an. Hewan besar yaitu **korbau** terutama berfungsi sebagai alat produksi pertanian. Sedang kambing dan ayam merupakan usaha sampingan, sebagai tabungan, yang dapat dijual apabila membutuhkan uang kontan yang agak besar. Pemeliharaan dilakukan dengan sistem gaduh, dimana seorang penggembala mendapat bagian dari anak hewan, sebagai imbalan dari pemeliharaannya.

b. Usaha non Pertanian.

Selain mengusahakan pertanian, pertambakan dan peternakan, rakyat desa juga melakukan usaha lain untuk mempertahankan hidup dan memperbaiki kualitas hidupnya.

Salah satu usaha yang menyolok adalah pembuatan bata merah. Menurut penduduk sekitar tahun 50 an telah ada pengusaha genting di desa ini, namun justru kemudian dihentikan dan berpindah ke usaha tani. Jenis tanah cukup baik untuk bata merah, hanya pemasaran waktu itu sangat terbatas. Usaha bata merah rupanya mulai dipacu setelah tahun 1966, dimana mulai dibangun banyak sarana fisik, hingga banyak membutuhkan bahan bangunan. Perkembangan usaha bata mempunyai kemiripan dengan perkembangan usaha melati. Usaha ini dilakukan baik oleh penduduk yang kaya maupun yang tidak kaya, karena pengolahannya yang relatif mudah, menggunakan teknologi tradisional yang dapat berjalan dengan modal kecil. Modal utama adalah tanah liat, yang banyak terdapat di pekarangan mereka, atau tanah sekitar desa. Pembuatan cukup dengan membentuk tanah dengan ukuran tertentu, kemudian dibakar di dalam tungku dari tanah, dengan menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Modal dapat diperoleh dengan murah, bahkan untuk keperluan membuat rumah sendiri, cukup dengan mengumpulkan kayu bakar dari ranting-ranting. Tetapi untuk menjadi usaha yang diperdagangkan tentu memerlukan modal besar, baik untuk bahan bakar, tenaga kerja, angkutan dan sebagainya. Keuntungan bagi petani kecil yang mempunyai usaha sampingan bata merah adalah dapat memperbaiki rumahnya dari dinding bambu menjadi tembok dengan murah. Tidak mengherankan bahwa di desa ini 90% rumah penduduk adalah rumah tembok, meski dengan bentuk dan isi yang sederhana. Sedang untuk usaha bata komersial hanya mungkin pada orang-orang kaya, yang jumlahnya tidak banyak.

Usaha non pertanian yang lain adalah berjualan kecil-kecilan, baik bakul di pasar atau membuka warung di rumahnya. Usaha ini memerlukan modal kecil atau besar, tergantung jenis yang dijual. Keuntungan sedikit, dan memakan waktu kerja penuh setiap hari. Profesi ini khusus dikelola oleh wanita, yang memiliki ketelitian dan kesabaran dalam pelayanan dan perhitungan kecil-kecil. Istri seorang buruh tani berjualan makanan kecil dari ketela jagung atau tepung

kanji. Dengan pinjaman uang, ia memutar modal untuk membeli bahan-bahan. Mungkin dia tidak mempunyai untung dalam bentuk uang, tetapi mereka sekeluarga dapat turut makan dari berjualan makanan tersebut. Bagi petani kaya usaha dagang adalah penanaman modal baru dari hasil keuntungan di bidang pertanian. Keuntungan lebih besar, meskipun dengan risiko rugi yang juga lebih besar. Usaha warung telah ada di desa ini sejak jaman Belanda. Pada tahun-tahun terakhir bertambah banyak warung-warung makan didirikan di tepi jalan raya, kebanyakan diusahakan oleh orang pendatang dari luar desa.

Beberapa Akibat Perkembangan Sosial Ekonomis

Perkembangan sosial ekonomis desa Maribaya selama kurang lebih 28 tahun memberi dampak ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang disamping akibat-akibat positif juga mengandung akibat-akibat negatif. Karena tidak mungkin untuk mengamati semua aspek, maka akan kami pusatkan ke beberapa aspek saja, yang akan diuraikan satu per satu.

a. Komersialisasi dan kesempatan kerja di desa

Dengan makin banyaknya penduduk desa terlibat dalam usaha tani maupun usaha non tani yang berorientasi kepada pasar, maka desa makin menjadi sasaran usaha, baik oleh orang di desa sendiri, maupun orang dari luar desa atau kota. Berkembanglah petani-petani wiraswasta yang memperluas usaha taninya untuk dijual di pasaran. Seorang petani kaya mengusahakan sawah padi sampai 10 hektar, mengusahakan tambak, tebu rakyat intensifikasi (TRIS I), menanam kelapa bibit unggul (kelapa genjah). Atau petani kaya usaha melati berhektar-hektar dengan menggunakan buruh tetap dan buruh tidak tetap, menjadi tengkulak melati bagi petani-petani kecil serta mengusahakan angkutan sendiri ke kota. Semuanya dilakukan secara komersial, dengan memakai buruh-buruh upahan dan hubungan jual beli yang lugas. Perkembangan ini membuka kesempatan kerja kepada buruh tani di desa yang mencapai jumlah 50% dari seluruh kepala keluarga (tahun 1978), dan buruh tani dari luar desa (bara) yang datang pada waktu banyak kerja pertanian. Untuk 1 hektar sawah digunakan 10 orang untuk mencangkul, 50 orang wanita untuk menanam,

15 wanita untuk menyiang dan sekitar 50 orang untuk panen. Kiranya juga petani kecil (pemilikan tanah 0,25 - 0,50 Ha) menggunakan tenaga buruh tani selain keluarganya sendiri⁸. Mereka ini untuk menekan biaya tidak mengadakan panen sendiri, melainkan diborongkan kepada orang lain dengan sekaligus menjual padinya (tebasan).

Selain berkembangnya wiraswasta petani setempat, juga orang-orang kota atau luar desa menjalankan usaha di desa, seperti penanaman bawang merah, mendirikan rumah makan, pabrik di tepi jalan besar, semuanya mendorong komersialisasi. Pertanyaan yang penting : apakah desa menjadi makin makmur, dalam arti apakah proses komersialisasi ini menambah pendapatan rakyat desa secara merata yang menjamin haridepan mereka? Dari gambaran di atas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pendapatan desa meningkat, lebih banyak kesempatan kerja diperoleh para buruh tani. Tetapi ternyata pendapatan ini tidak merata, bahkan secara proporsional terjadi perkembangan yang timpang, seperti nampak pada uraian berikut.

b. Polarisasi kekayaan

Berkat kemajuan teknologi pertanian, produksi pertanian meningkat pula (apabila tidak rusak oleh hama atau puso). Meskipun tidak diadakan perhitungan produksi dan perbandingan hasil dahulu dan sekarang, tetapi dari pengakuan petani sendiri terdapat kenaikan untuk petani pemilik di atas 100 % per hektar.⁹ Makin luas pemilikan tanah, makin banyak pula kenaikan produksi dan keuntungan petani. Sedang makin kecil pemilikan makin kecil pula kemampuan petani untuk memperoleh biaya produksi, hingga hasil bersih yang diperolehnyapun makin sedikit. Sedang bagi buruh tani, upah yang diperoleh dalam bentuk uang tidak menunjukkan kenaikan bila dinilai dengan beras¹⁰. Dengan demikian dapat digambarkan terjadinya akumulasi keuntungan, modal dan kekayaan pada beberapa orang kaya di desa, apakah itu petani padi atau melati, atau bawang merah. Secara umum pendapatan rakyat desa meningkat, baik petani, buruh tani, atau yang lain. Apalagi dengan timbulnya tanaman perdagangan serta meluasnya usaha-usaha lain. Namun hal ini belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, khusus-

nya golongan buruh tani, buruh non tani dan petani gurem (pemilikan tanah kurang dari 0,25 Ha) secara riil.

c. Pemilikan tanah dan pertumbuhan golongan buruh tani

Polarisasi kekayaan di desa juga merupakan akibat dari pemilikan tanah yang timpang, yaitu adanya orang-orang tertentu yang memiliki tanah yang luas, sedang sebagian besar penduduk bertanah sempit atau tidak bertanah. Keadaan ini juga berlaku di Maribaya. Menurut kesaksian seorang tua di Maribaya, pada jaman Belanda terdapat 3 macam tanah menurut status pemilikan, yaitu : tanah yasan, yaitu tanah yang dimiliki perorangan (dari warisan, hadiah, pambelian dan sebagainya). Macam kedua adalah tanah krajan, yaitu tanah yang dikuasai desa. Tanah ini dibagi-bagikan kepada petani secara permanen dengan luas yang kurang lebih sama besar. Tanah krajan ini tidak boleh dijual, dan membayar pajak lebih tinggi daripada pemilik tanah yasan. Yang ketiga adalah tanah bondo desa, tanah yang diperuntukkan sebagai bengkok lurah dan pamong desa, dan untuk keperluan-keperluan desa. Meskipun tidak ada keterangan berapa luas pemilikan tanah yasan (milik perorangan) serta berapa orang yang memilikinya, dari laporan desa tahun 1888 diketahui pada waktu itu seluruh tanah di dataran rendah adalah tanah komunal desa (=tanah krajan). Dengan demikian kita berasumsi bahwa sekitar tahun 1940 an jumlah tanah yasan yang lebih sedikit daripada tanah krajan. Sedang sebagian besar adalah tanah krajan yang luasnya kurang lebih sama. Setelah kemerdekaan, pemerintah menghapuskan semua tanah krajan dan tanah yasan dan dijadikan tanah milik kepada mereka yang bersangkutan. Dengan demikian pada awal tahun 50 an pemilikan tanah di desa Maribaya adalah lebih merata dan buruh tani masih lebih sedikit daripada pemilik tanah.

Dengan perkembangan ekonomi tumbuhlah petani-petani wiraswasta yang makin memperluas tanahnya. Para lurah dan keluarganya serta sebagian pamong desa termasuk dalam mereka yang memiliki tanah luas. Ini dapat dimengerti karena lurah dan pamong desa menguasai 15 % dari luas tanah desa seluruhnya, atau 28 % dari seluruh tanah pertanian (sawah dan tegal). Dengan makin meluasnya tanah pemilikan beberapa orang berarti makin banyak orang melepaskan tanahnya menjadi

buruh tani. Ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk, maka jumlah buruh tani pun makin bertambah lagi. Pada tahun 1978 jumlah keluarga buruh tani mencapai 50 % dari seluruh kepala keluarga, sedang petani pemilik hanya 31 %. (seluruhnya 586 kepala keluarga).¹¹ Dari jumlah ini 9 orang memiliki tanah lebih dari 1 Ha, dengan luas maksimum sekitar 11 Ha.

Dengan demikian proses polarisasi kekayaan yang terus menerus akan meningkatkan jumlah buruh tani maupun buruh non tani.

d. Kerusakan lingkungan

Perkembangan sosial ekonomi akibat pengolahan alam oleh manusia disamping mengembangkan lingkungan hidup juga merusakkan sebagian lingkungan hidup. Yang pertama adalah penggundulan hutan dan pohon-pohon di pantai. Pohon-pohon bakau (mangrove) yang tumbuh di sekitar pantai dan di tepi sungai yang sangat berguna untuk menahan erosi tanah dan tempat tinggal berbagai burung dan binatang laut tidak lagi terdapat. Demikian pula hutan pantai yang masih ada pada tahun 1950 an dan pohon-pohon kelapa telah habis ditebang penduduk untuk konsumsi kayu bakar penduduk. Hal ini berakibat pada kerusakan tanah dan kesehatan lingkungan.

Kerusakan lain adalah pengambilan tanah yang tidak teratur untuk pembuatan bata merah. Banyak pekarangan penduduk berlobang-lobang karena tanah dipakai untuk pembuatan bata. Bila dibiarkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain.

Sedikit Tentang Sosial Budaya

Meskipun bidang ini tidak termasuk dalam cakupan penelitian, namun sebagai kesan ingin juga dikemukakan. Bidang sosial budaya berkembang lebih lambat dan dinamika masyarakat, boleh dikatakan lamban menanggapi keadaan yang berubah. Hal ini berhubungan erat dengan kondisi setempat.

Awal tahun 1950 hanya ada satu sekolah formal, yaitu Sekolah Dasar 3 tahun warisan jaman Belanda. Keadaan ini tidak berubah sampai tahun 1970 an. Sekitar tahun itu pemerintah menambah lokal SD menjadi 6, dan

baru lengkap menjadi SD 6 tahun. Juga sekitar tahun itu dibuka madrasah dengan satu kelas (?) dengan 35 murid dan 1 guru.

Nampaknya seperti di desa-desa lain anak-anak putus sekolah setelah kelas 3 agak banyak. Hal ini berhubungan erat dengan kemiskinan penduduk, terutama keluarga buruh dan petani kecil. Anak kelas 3 sudah termasuk usia kerja (10 tahun) yang lebih bermanfaat untuk membantu bekerja untuk keluarganya daripada bersekolah yang mengeluarkan biaya.

Kegiatan keagamaan nampak mulai berkembang sejak tahun 1969 dengan adanya kelompok-kelompok pengajian, khususnya pengajian ibu-ibu, dan pengajian muda mudi yang diselengi secara gembira. Sebegitu jauh belum menonjol satu kehidupan beragama sehari-hari. Kiranya hal ini disebabkan keadaan golongan atas desa. Golongan atas desa di sini terutama adalah petani kaya, lurah dan pedagang. Nampaknya diantara mereka tidak ada yang berperanan sebagai pemelihara dan pembawa kebudayaan baru. Elite keagamaan nampak sangat kurang berperanan, meskipun ada satu dua orang haji. Yang juga menarik adalah tiadanya seorang guru yang tinggal di desa itu sejak jaman Belanda, meskipun mereka selalu datang mengajar. Maka desa ini kekurangan penggerak budaya atau modernisator di bidang sosial budaya, meskipun potensi pendukung cukup. Namun terlepas dari kelemahan tersebut rakyat desa cukup mempunyai nilai moral agama yang mereka pertahankan. Hal ini tercermin dari misalnya rasa tidak senang mereka dengan tumbuhnya rumah-rumah makan di tepi jalan yang nampaknya dipakai juga untuk tempat pelacuran. Dan sampai saat itu tidak ada seorang wanita desa tersebut bekerja di tempat-tempat itu.

Beberapa kesimpulan awal

Setelah menguraikan dengan agak panjang perkembangan suatu desa masa kini, kita kembali kepada topik makalah ini yaitu bagaimana dinamika masyarakat pedesaan menampakkan dirinya, faktor-faktor yang mempengaruhinya serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Suatu desa kecil telah berkembang dari desa subsisten, yaitu yang terutama hanya mencukupi kebutuhan pangan minimum, berkembang menjadi desa yang melayani pasar. Beberapa kesimpulan awal dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan masyarakat desa digerakkan oleh pendukung masyarakat pedesaan sendiri, yaitu manusia-manusia di desa itu sendiri. Khususnya perkembangan di bidang sosial ekonomis, dinamika masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern dan ekstern.

Faktor-faktor intern meliputi :

- a. Ekologis, adanya lingkungan alam tertentu, dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memungkinkan usaha-usaha tertentu. Dalam hal ini usaha tambak, sawah, melati, bata.
- b. Tekanan penduduk dan pemilikan tanah. Penduduk yang makin banyak dan tanah yang makin sempit, mendorong adanya diversifikasi pertanian dan usaha non pertanian.
- c. Elite desa, yaitu adanya orang terkemuka di desa yang kaya, yang mempunyai rangsangan inovatif untuk mencoba hal-hal baru dan berjiwa wiraswasta, yang kemudian diikuti orang banyak.

Faktor-faktor ekstern meliputi :

- a. Rangsangan pasar, yaitu adanya permintaan akan barang tertentu dari luar desa dalam jumlah besar secara terus menerus.
 - b. Komunikasi, yaitu adanya sarana perhubungan yang mudah dan lancar, sehingga mudah mendapatkan informasi dari tempat lain, memudahkan angkutan barang. Dalam hal desa ini adanya jalan raya antar kota.
 - c. Modernisasi, terutama diperkenalkannya teknologi pertanian, penggunaan pupuk buatan, obat hama dan bibit unggul, dapat meningkatkan produksi bermacam-macam tanaman.
2. Perubahan desa menjadi desa komersial membawa dampak yang positif maupun negatif bagi rakyat desa.
Dampak positif berupa meningkatnya pendapatan rakyat, baik dari hasil produksi yang meningkat, pendapatan buruh yang meningkat karena frekwensi kerja yang meningkat, kesempatan kerja yang makin luas. Dampak negatif berupa polarisasi kekayaan karena tidak meratanya pendapatan, hal ini menyebabkan juga pemilikan tanah yang makin luas untuk beberapa orang dan makin sempit untuk sebagian besar orang, serta jumlah buruh tani yang makin banyak.

3. Kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif juga, dan hal ini disebabkan tingkat ekonomi rakyat kebanyakan yang rendah, hingga guna menekan biaya hidup mereka memanfaatkan hutan dan tanah tanpa bertanggungjawab terhadap pelestariannya.
4. Dinamika masyarakat di bidang sosial budaya terasa lamban dan tertinggal jauh dengan perkembangan sosial ekonomi, karena kurang berpekerannya pemelihara kebudayaan dan pembawa kebudayaan baru. Keadaan demikian akan melemahkan masyarakat desa sebagai kesatuan budaya dalam menghadapi unsur-unsur luar desa yang mulai merebut ruang hidup rakyat desa, dan yang tumbuh dari perkembangan ekonomi yang cenderung timpang.

Yogyakarta/ 27-8-1982
Semarang

A.M. Djulianti Suroyo.

CATATAN BELAKANG

¹ Berdasarkan penelitian desa di Propinsi Jawa Tengah, dari 101 desa-desa pantai di Pantai Utara Jawa Tengah, 58 % merupakan desa tambak, 32 % desa nelayan dan 10 % desa pertanian.

Periksa Pusat Riset dan Pengembangan, Universitas Diponegoro/ADC, Deskripsi Umum Desa Pantai (Seri Penerbitan ke 4; Semarang; Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Diponegoro/ADC, 1980), h. 5-11.

² Robert Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture (Chicago: University of Chicago Press, 1963), h. 40-59.

³ Eric R. Wolff, Peasants (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966) h. 8-11.

⁴ Konsep desa yang statis, tenteram damai dikemukakan oleh para ahli yang konservatif seperti H.J. Boeke, D.H. Burger, bahkan Karl Marx. Selanjutnya periksa Ina E. Slamet, Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa (Djakarta: Bhratara, 1965), h. 136-137; juga periksa mengenai konsep desa yang dinamis dari Koentjaraningrat, Ciri-ciri dan Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia", (jilid 1 dari Sosiologi Pedesaan, ed. Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. 2 jilid.; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1982), h. 34-37; juga periksa Jack N. Potter, et. al., Peasant Society (Boston: Little Brown, 1967).

⁵ F.Fokkens, Einresume. Onderzoek naar de Verplichte Diensten der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Eerste Gedeelte: Heerendiensten (1888), h. 59-60.

⁶ Tahun 1930 adalah perkiraan yang mendekati kebenaran (menurut informan setempat adalah 1935), yaitu dengan melihat peraturan pemerintah Kolonial tentang penggabungan atau pemecahan desa-desa di Jawa berlaku tahun 1919. Proses ini berjalan kira-kira 10 tahun. Periksa Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa (Bandung: Sumur Bandung, 1965), h. 68-73.

⁷ Untuk sistem TRIS belum ada penilaian, karena waktu itu petani baru mencoba pertama kali.

⁸ Kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang luas mengenai pertanian di Jawa. Periksa Rudolf S. Sinaga & Benyamin White, Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Dalam Hubungannya Dengan Kemiskinan Struktural, (dari Kemiskinan Struktural, ed. Alfian et. al.; Jakarta, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980), h. 144-146.

⁹Dari penelitian di satu desa di Jawa Tengah Sinaga mendapatkan kenaikan bagian pendapatan petani pemilik yang menggarap sendiri sawahnya adalah 192 %. Ibid., h. 154.

¹⁰ Menurut seorang informan upah seorang buruh tani/hari tahun 1965 + Rp. 150,- (harga beras 50,-/kg). Tahun 1978 upah buruh tani + Rp.450,- (harga beras 150,-/kg). Menurut Sinaga bagian yang diperoleh buruh secara keseluruhan untuk penggarapan per Ha bahkan menurun sampai 20 %. Sinaga, loc.cit.

¹¹ Untuk data lengkap, periksa lampiran 1.

KEPUSTAKAAN

Fokkens, F. Eindresumé. Onderzoek naar de Verplichte Diensten der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. Eerste Gedeelte : Heerendiensten (1888)).

Ina E. Slamet. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Djakarta : Bhratara, 1965.

Koentjaraningrat. Ciri-ciri dan Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia. Jilid 1 dari Sosiologi Pedesaan. 2 jilid. Editor Sajogyo & Pudjiwati Sajogyo. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1982.

Potter, Jack M. et. al. Peasant Society. Boston: Little Brown. 1967.

Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Diponegoro/ADC. Seri laporan observasi. Studi Sosial Ekonomi Desa Pantai. Pantai Utara Jawa Tengah. Semarang: Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Diponegoro/ADC, 1979.

————— . Deskripsi Umum Desa Pantai. Seri Penerbitan ke 4. Studi Sosial Ekonomi Desa Pantai Utara Jawa Tengah. 1979.

————— . Laporan Penelitian. Sejarah Sosial Ekonomi Desa Pantai. Seri Penerbitan ke 2. Studi Sosial Ekonomi Desa Pantai Utara Jawa Tengah. 1979.

Redfield, Robert. The Little Community and Peasant Society and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1963.

Sinaga, Rudolf S & Benyamin White. Beberapa Aspek Kelembagaan di Pedesaan Jawa Dalam Hubungannya Dengan Kemiskinan Struktural. Dari Kemiskinan Struktural. Editor Alfian et. al. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1980.

Soetardjo Kartohadikoesoemo. Desa. Bandung: Sumur Bandung, 1965.

Wolff, Eric R. Peasants. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1966.

Vrie, E de. Masalah-masalah Petani Jawa. Jakarta: Bhratara, 1972. h. tentang data petani. 1930 - 8 juta petani

7,5 juga pemilik tanah. h. 12

LAMPIRAN 1.

DATA DESA MARIBAYA

Sumber : Monografi Desa, 1978.

a. Luas Wilayah.

Luas wilayah seluruhnya 319.142 Ha.

Tanah pertanian :

1. Sawah	138,115 Ha	
2. Tegal + kebun	48,129	
		186,244 Ha.

Tanah pekarangan 53,045

Tanah tambak 24,891

Tanah u. lain-lain 54,692

b. Tanah Bondo Deso.

Bengkok Lurah 10,895 Ha

" Carik 3,195

" Pamong Desa 9,069
(9 orang)Grantungan Ulu-Ulu 0,695

23.854 Ha

Tanah u SD 0,134

" Bale Desa 0,120

" Kuburan 2,905

Grantungan guru 1,270

Tanah u. lain-lain 19.375

Jumlah seluruh tanah

Bondo Deso 47,831 Ha.

Persentase tanah bengkok terhadap tanah pertanian seluruhnya 12,6 %

c. Penduduk dan pekerjaan Jumlah kepala Keluarga (KK) 586.

Jumlah KK Petani	155	——(persentase)	30 %
" Potembak	6	"	1
" Buruh Tani	292	"	50
" Brh non Tani	43	"	5
" Pedagang	41	"	5
" Lain-lain	49	"	9

Jumlah 586

100 %

Penduduk menurut pendidikan

	1. Belum bersekolah :	495	---	19,7
	2. Tidak bersekolah	1051	---	40,5
Murid $\frac{168}{6}$:	3. SD tidak/belum tamat	333	---	12,9
27	4. SD tamat	694	---	26,7
	5. Diatas SD	22	---	0,8

2595

Seminar Sejarah Lokal

Topik : II

ASPEK HISTORIS DARI PEMBANGUNAN PEDESAAN DI JAWA TENGAH

Oleh :

Soegijanto Padmo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL
1982

ASPEK HISTORIS DARI PEMBANGUNAN PEDESAAN DI JAWA TENGAH

Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri,¹⁾ pembangunan desa yang kini sedang dilaksanakan di Indonesia merupakan kegiatan untuk meletakkan dasar dan merupakan satu kesatuan dengan konsepsi pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN. Hal ini berarti bahwa tujuan pembangunan nasional yaitu : pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Mengingat bahwa sekitar 80 % penduduk Indonesia bermukim di pedesaan²⁾ yang merupakan sumber potensi human resources di samping sumber kekayaan alam, maka jelaslah betapa pentingnya kedudukan, peranan dan fungsi dari daerah pedesaan sebagai dasar atau basis pembangunan nasional.

Perhatian pemerintah terhadap pembangunan pedesaan telah tampak sejak negara ini memperoleh kedaulatannya, antara lain berupa program yang dilancarkan pada tahun 1951 dengan nama "Rencana Kesejahteraan Istimewa" (RKI). Sebenarnya RKI merupakan kombinasi dari apa yang disebut "Rencana Kasimo" yang dilancarkan oleh pemerintah RI di Yogyakarta pada tahun 1948 pada masa revolusi dan "Rencana Kesejahteraan" dari Pemerintah Hindia Belanda yang akan dilaksanakan di daerah yang dikuasainya. Setelah pengalihan kekuasaan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah RI pada Desember 1949, dua rencana tersebut dikombinasikan dan disebut RKI.³⁾ Sasaran utama dari RKI adalah sektor pertanian di mana rencana jangka panjang yang berupa melaksanakan intensifikasi dan perluasan areal tanaman padi di luar Jawa.

Program Pembangunan Pemerintah RI dilakukan secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Negara di bawah Dr. Juanda. Pada dasarnya Rencana ini merupakan kelanjutan dari RKI tetapi ditambah dengan pembangunan pertanian tanaman non-pangan seperti industri kehutanan, meningkatkan tanaman ekspor, dan sebagainya.⁴⁾

Sebelum Repelita 56-60 dilaksanakan seluruhnya, Rencana Pembangunan yang lain dicanangkan Pemerintah, yaitu Rencana Pembangunan Nasional Semesta 1961-1969.⁵⁾ Rencana Delapan Tahun ini telah memikirkan usaha untuk melaksanakan desentralisasi dalam pembangunan yaitu dengan memberi otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah serta menciptakan perekonomian Daerah yang ber-swasembada atau self reliant. Tiga tahun pertama tekanan kegiatan diletakkan pada penyediaan pangan dan sandang.

Apa yang dikemukakan di atas nyatalah bahwa selama dua dasa warsa pertama pembangunan di negeri ini menitikberatkan pada peningkatan produksi pangan dan devisa. Usaha untuk membenahi diri serta mencari pembayaran luar negeri yang diperoleh dari kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang mendesak, karena kebutuhan primer berupa pangan, sandang maupun papan bagi rakyat perlu segera dicukupi setelah rakyat menderita sekian lama pada perjuangan revolusi fisik. Bersamaan dengan itu pemerintah juga berbenah diri, di mana sektor agraria juga tak luput dari perhatiannya. Berbagai peraturan perundangan tentang pertanahan dikeluarkan, yaitu :

- a. Undang-undang tentang desa perdikan dikeluarkan tahun 1946
- b. Undang-undang tentang hak konversi (Vorstenlands Grondhuur Reglement) pada tahun 1948
- c. Undang-undang tentang klein land - en tuinbouw, tahun 1950
- d. Undang-undang tentang tanah yang dulu digunakan oleh Jepang tahun 1950
- e. Undang-undang tentang sewa tanah untuk pabrik gula (Grondhuur Ordonansi) tahun 1951
- f. Undang-undang tentang onwettige okupasi pada tahun 1952
- g. Undang-undang tentang tanah perkebunan yang digarap rakyat, tahun 1954

h. Undang-undang tentang tanah partikelir, tahun 1958

i. Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Bagi Hasil tahun 1960⁶⁾

Terkonsentrasinya 70 % penduduk Indonesia pada tanah seluas 7 % di Jawa, pemusatan pemilikan tanah di tangan beberapa gentir tuan tanah, memberi implikasi terjadinya struktur sosial dan ekonomi yang timpang. Berlangsungnya eksploitasi oleh perusahaan perkebunan atas petani, maupun penindasan tuan tanah atas buruh tani akan melengkapi causa bagi timbulnya gerakan protes atau bentuk-bentuk keresahan lain di kalangan masyarakat petani.⁷⁾

Paper ini berusaha membahas pembangunan pedesaan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama tiga dasa warsa sejak Indonesia memperoleh kedaulatannya. Cakupan spasial adalah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa hal yang akan dibahas antara lain apa sebenarnya pembangunan desa itu, bagaimanakah pendekatan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah serta seberapa jauh pembangunan pedesaan yang selama ini dilaksanakan telah dirasakan oleh masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa pembangunan pertanian merupakan titik-tolak bagi pembangunan tahap berikutnya yaitu industrialisasi; di mana pada fase tertentu peranan industri secara proporsional meningkat dan peranan pertanian secara proporsional menurun. Taraf produktivitas tertentu diperlukan dari berbagai komoditi pertanian yang relevan dari jenis industri yang akan dikembangkan.

Guna mencapai pembangunan pedesaan di mana sektor pertanian merupakan salah satu sasaran utama perlu diciptakan suatu kondisi yang favorable bagi masyarakat untuk membangun. Masyarakat pedesaan di Indonesia sebagaimana dari negara-negara berkembang masih memerlukan ditumbuhkannya suatu iklim sosial yang lebih baik. Di masyarakat pedesaan masih dapat dijumpai adanya eksploitasi oleh sekelompok kecil warga desa, upah yang tidak adil, bunga pinjaman yang tinggi, dan pembagian hasil panen antara penya

kap dan pemilik tanah yang tidak adil. Perombakan struktur sosial tanpa diikuti oleh perombakan struktur ekonomi maupun di tunjang oleh penyediaan yang cukup, kegiatan pembangunan juga tak bisa diharapkan berhasil.

Lebih baik kiranya bila terlebih dahulu diketengahkan apakah yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan itu. Menurut Heredero⁸⁾, pembangunan pedesaan adalah suatu upaya untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan diskriminasi, yang akan membantu masyarakat untuk mencapai sekurang-kurangnya standard hidup minimal. Hal yang sama dikemukakan oleh Jacoby⁹⁾ dengan mengatakan bahwa pembangunan pedesaan hanya bisa berhasil bila emansipasi telah ditegakkan di antara petani miskin di pedesaan. Jadi secara jelas Heredero maupun Jacoby menunjukkan bahwa sasaran pembangunan desa adalah petani miskin di pedesaan, sedangkan strategi yang harus dijalankan dalam pembangunan tersebut adalah melaksanakan perombakan struktur sosial yang dinilai timpang itu. Adapun pengertian pembangunan **dasa sendiri** adalah pembangunan yang ditujukan kepada sekelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang tinggal di pedesaan.¹⁰⁾

Semenjak Persatuan Bangsa-Bangsa mencanangkan awal Dasa Warsa Pembangunan yang pertama di tahun 1960, sejarah perkembangan ide-ide dan nilai pembangunan nampak mengalami perubahan kualitatif yang mendasar. Manifestasi perubahan tersebut tercermin di dalam ketidakpuasan para ahli di dalam menanggapi tentangan pembangunan. Apabila pada awal Dasa Warsa Pembangunan yang pertama para ahli dan negarawan terlalu ternateri dengan problema "what is development and how to develop" maka pada awal Dasa Warsa Pembangunan yang kedua wajah-wajah kemanusiaan dalam proses pembangunan tercermin dalam tantangan baru "development for what and for whom".¹¹⁾ Pergeseran tantangan pembangunan ini tidak lagi semata-mata menyangkut ikhtiar intelektual untuk mencapai tujuan tertentu, namun memperhitungkan pula siapa pengambil manfaat pembangunan dan bagaima-

na proses pembangunan dilaksanakan.

Perhatian terhadap kelompok the most economically deprived di pedesaan dalam berbagai program pembangunan, mulai diprioritaskan pada dasa warsa 1970-an.¹²⁾ Kelompok miskin di pedesaan seperti petani gurem, buruh tani, petani penyakap, maupun bakul kecil di pedesaan mulai memperoleh uluran tangan dari pemerintah.¹³⁾ Hal tersebut tak berarti bahwa kelompok termiskin itu harus diisolir dan dianggap kelompok yang homogeen dan dapat diperlakukan terlepas dari masyarakat yang mengelilinginya. Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok miskin di pedesaan berbeda di antara mereka sendiri dalam umur, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Di samping itu hubungan mereka dengan golongan kaya di pedesaan bervariasi menurut faktor yang berbeda seperti sejarah, geografi, dan hubungan sosial-ekonomi dan budaya. Situasi sosial itu erat sekali hubungannya dengan struktur agraria di pedesaan, di mana polarisasi penguasaan tanah atau sumber-sumber lain mengakibatkan timbulnya ketimpangan dalam lain seperti eksploitasi terhadap golongan miskin di desa atau disparitas dalam distribusi pendapatan.

Pada dasa warsa pertama setelah Pemerintah RI memperoleh kedaulatan, Pemerintah RI dihadapkan pada kenyataan yang sulit yaitu impor beras dalam jumlah besar dan menurunnya peranan ekspor pertanian. Dengan demikian perhatian pemerintah dipusatkan pada peningkatan produksi pangan dan menggalakkan produksi tanaman ekspor, sebagaimana tampak pada kebijakan pemerintah pada masa itu. Tekad untuk mencukupi kebutuhan beras sendiri telah pula dilontarkan sedini akhir dasa warsa 1950-an, yaitu dengan dicanangkannya program Menteri Pertanian dengan nama "Rencana Swa Sembada Beras" atau SSB.¹⁴⁾

Diperoleh kesan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejak memperoleh kedaulatan sampai dengan Pelita pertama 1969-1974, Pelita kedua, maupun Pelita ketiga, titik berat pembangunan masih diletakkan pada pembangunan fisik.¹⁵⁾ Berbagai pendapat dilontarkan oleh kelompok yang berbeda. Tak

kurang pihak pemerintah sendiri yang diwakili oleh Direktorat Pembangunan Daerah mencoba memberi semacam tanggapan terhadap pandangan yang datang baik dari cendekiawan maupun tokoh lembaga non-pemerintah yang aktif terlibat dalam pembangunan desa. Adapun pihak cendekiawan dari universitas maupun tokoh pembangunan desa dari lembaga non-pemerintah berpendapat bahwa orientasi pembangunan saat ini masih menekankan aspek kuantitatif, sedangkan aspek kualitatif seperti pendidikan kedesakan yang tak kalah pentingnya bagi kelanjutan pembangunan di masa depan belum memperoleh perhatian dari pemerintah. Sedangkan pihak pemerintah berpendapat bahwa untuk mendidik masyarakat dengan memberi kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan telah diberikan secara bertahap. Yang penting dalam hal ini adalah bahwa pemerintah seyogyanya menyadari bahwa selama ini masih ada titik lemah di dalam pembangunan dan secara jujur mengakuinya dan memperbaikinya di masa datang. Sejahtera ini memang pemerintah telah berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat ini dalam proyek Inpres, pemberian desentralisasi dalam perencanaan pembangunan, proses pencarian dan pengajuan proyek dari bawah, merupakan bukti dari niat pemerintah tersebut.¹⁶⁾ Apa yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah itu tak ada yang salah, tetapi perlu diingat bahwa umumnya proyek Inpres di mana masyarakat pada umumnya tinggal menerima saja, maka yang sering dijumpai di dalam kenyataan adalah bahwa proyek itu dibangun tanpa sepengetahuan rakyat.

Mengingat bahwa sektor pertanian masih merupakan kegiatan utama bagi masyarakat pedesaan, maka pembangunan pertanian dapat dipandang sebagai necessary condition meskipun bukan sufficient condition bagi pembangunan desa.¹⁷⁾ Sehubungan dengan itu pemerintah dengan giat menggalakkan program Bimbingan Massal sejak tahun 1960-an. Ribuan hektar tanah sawah berhasil di-Bimaskan setiap tahun, ribuan ton beras berhasil disimpan oleh Bulog guna mencukupi persediaan pangan di tahun mendatang. Namun dalam program Bimas ini dicantumkan suatu

syarat bahwa setiap peserta harus bisa menunjukkan Kartu Tanda Hak Milik Tanah yang digarapnya. Sebagai diketahui mayoritas petani pedesaan merupakan petani gurem yang pada umumnya mereka tak memiliki surat hak milik tanah atau sertifikat sebagai jaminan untuk memperoleh kredit Bimas tersebut. Dengan demikian petani gurem yang merupakan mayoritas petani di pedesaan terlepas dari jangkauan program ini. Di samping itu tak jarang pamong desa menggunakan sertifikat yang sama untuk memperoleh kredit di ~~bank~~ dalam program Bimas ini beberapa kali. Pengamatan yang dilakukan penulis di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya dominasi sumber atau pelayanan oleh sekelompok kecil masyarakat desa. Dengan modal sertifikat tanah pamong desa dan keluarganya bisa memanfaatkan kredit Bimas secara tidak wajar. Kemudian lewat relasi yang bekerja di lembaga pemerintah ia bisa menembus hambatan birokrasi dalam usahanya untuk memutar modalnya dalam usaha produktif seperti dalam bentuk penggilingan padi. Dengan demikian pamong desa dan keluarganya merupakan sebagian kecil dari kelompok yang secara ekonomis kuat yang semakin hari semakin kaya karena bisa memanfaatkan setiap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dengan diperkenalkannya teknologi baru di pedesaan cenderung mendorong timbulnya usaha tani yang luas, maupun usaha yang bersifat kapitalistis seperti penggunaan traktor tangan, penggunaan buruh upahan secara lebih banyak, dan memproduksi untuk keperluan pasar. Pengamatan di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pamong desa cenderung untuk menanam padi lokal yang hasilnya relatif lebih rendah daripada padi VUTW, karena harga padi lokal jauh lebih tinggi daripada padi VUTW. Munculnya golongan menengah dari lapisan masyarakat pedesaan merupakan gejala yang belum terlihat sebelum adanya teknologi baru.¹⁸⁾ Golongan menengah ini muncul sebagai penerima teknologi paling awal yang kemudian tampil sebagai kelompok yang secara ekonomis kuat dan berhasil memegang kekuasaan di pedesaan.

Erat kaitannya dengan kenaikan produksi pertanian adalah

pemasaran. Tebasan sebagai salah satu bentuk pemasaran hasil sudah ada sejak sebelum tahun 1950.¹⁹⁾ Pada dasa warsa terakhir tampak bahwa lembaga tebasan ini menunjukkan adanya perubahan dalam intensitas. Sebelum varietas unggul tahan wereng diperkenalkan para penebas yang beroperasi di desa pada umumnya adalah berasal dari desa di sekitarnya. Tetapi dengan diperkenalkannya padi jenis VUTW para penebas bukan saja beroperasi di desa sekitarnya tetapi sampai menembus batas kecamatan bahkan kabupaten. Pengamatan di daerah Banyumas menunjukkan bahwa pada musim-musim tertentu penebas dari daerah Kabupaten Tegal membeli padi di daerah ini. Meluasnya serta makin intensifnya sistem tebasan karena didorong oleh beberapa faktor pertama, karena salah satu sifat jenis VUTW adalah mudah rontok maka guna menghindarkan kerugian yang timbul karena padi yang rusak petani lebih suka menebaskan daripada memanen sendiri; kedua, dengan menebaskan petani tak direpotkan dengan mengatur peserta derep karena tak mungkin baginya untuk mengizinkan setiap orang di desanya untuk turut memanen, terutama bila sawah miliknya hanya sempit; ketiga, kewajiban untuk segera membayar hutang Bimas segera setelah panen memaksa petani untuk segera memperoleh uang kontan.

Para sarjana berpendapat, misalnya Sulistyono,²⁰⁾ bahwa penggunaan bibit dan cara bertanam modern bila disertai dengan pengairan, secara dramatis bisa mengubah sifat pokok dari kerja pertanian. Lebih banyak kerja yang diperlukan pada hampir tiap tahapan mengolah tanah pertanian. Namun bila ingat bahwa rata-rata kepemilikan tanah oleh penelitian LPIS bahwa rata-rata kepemilikan tanah di Kabupaten Klaten pada 1972 adalah 0,22 hektar; 4 kecamatan di Kab. Jepara pada 1971 adalah 0,54 hektar; Kab. Sragen pada 1974 adalah 1,11 hektar; Kab. Brebes pada 1974 adalah 0,51 hektar; 11 kecamatan di Kabupaten Demak pada 1973 adalah 0,64 hektar; 4 kecamatan di Kab. Grobogan pada 1973 adalah 0,80 hektar; 16 kecamatan di Lembah Juwono pada 1971 adalah 0,89 hektar; 5 kecamatan di Semarang Timur pada 1973 adalah 0,74 hektar; 11 kecamatan di

Glapan Sedadi pada 1973 adalah 0,85 hektar; 17 kecamatan di Lembah Lusi pada 1973 adalah 0,93 hektar.²¹⁾ Dalam keadaan rata-rata kepemilikan tanah semacam itu tidak menutup kemungkinan bagi terjadinya konsentrasi penguasaan tanah, seperti yang dijumpai penulis di Kecamatan Sayunf, Kabupaten Demak di mana beberapa orang petani menguasai sawah lebih dari 30 bau atau kurang-lebih 21 hektar. Namun apa yang dikemukakan oleh Sulistyono tersebut bisa terjadi dalam skala yang kecil, mengingat mayoritas petani di pedesaan memiliki tanah yang sempit. Data LPIS itu diperkuat pula oleh Sayogyo,²²⁾ yang menunjukkan bahwa petani di Jawa yang rata-rata kepemilikan tanahnya 0,20 hektar pada 1963 sebanyak 61 %. Jadi perbaikan taraf hidup bagi petani termiskin di pedesaan lewat tersedianya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masih harus dipertanyakan.

Persebaran teknologi di pedesaan dalam bidang pertanian, pemerintah menggunakan petani maju sebagai partisipan. Inovasi tersebut diharapkan akan tersebar ke segala penjuru dan ke segenap lapisan masyarakat desa. Pendekatan ini mengandikan bahwa proses pertebaran pengetahuan dan teknologi berjalan secara bertahap dan bahwa the best agent dalam proses evolusioner ini adalah orang yang paling maju di desa, yang biasanya berasal dari petani kaya atau well to do farmer yang mempunyai cukup pendidikan dan memberikan tanggapan baik terhadap saran-saran perbaikan produksi pertanian. Roewe²³⁾ berpendapat pula bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan orang pribumi di pedesaan tidak ada jalan lain kecuali lewat small elite yang mempunyai sifat-sifat the vigorous, energetic, advanced elements di dalam masyarakat pedesaan.

Usaha pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian lewat berbagai program selama Pelita I, mendapat tanggapan yang menggembirakan dari petani progresif, sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai. Sudah barang tentu keberhasilan ini melegakan hati. Akan tetapi di balik keberhasilan itu, per

lu dipertanyakan siapakah yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Masalah serupa telah pula dilontarkan oleh H. Ten Dam dalam penelitiannya di Desa Cibodas, Jawa Barat²⁴⁾ di mana ia menyatakan bahwa mereka yang tergolong the large landowners ialah yang paling banyak meneguk manfaat dari berbagai fasilitas pembangunan. Lewat koperasi mereka memperoleh pupuk buatan dan berbagai bahan kimia dengan harga yang telah ditentukan, sedangkan petani menengah harus membayar harga pupuk dengan harga lebih tinggi karena mereka harus membeli kepada petani kaya. Adapun buruh tani sebagai tenaga upahan tak memperoleh manfaat apa pun dari organisasi koperasi yang dinilai sebagai koperasi elit tersebut.

Sentuhan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sudah barang tentu mempunyai banyak segi, akan tetapi akan lebih jelas bila dilihat sentuhannya pada segi pelapisan sosial-ekonomi yang berlandaskan pada penguasaan tanah. Beberapa program yang memberi sentuhan antara lain introduksi bibit VITW, program Bimas, perbaikan prasarana pengairan, serta BUID/KUD.

Penelitian LPIS di Klaten pada tahun 1972²⁵⁾ menyimpulkan bahwa kenaikan produksi sebagai akibat pengetrapan teknologi baru kurang dirasakan oleh mereka yang tak mempunyai tanah sawah, yaitu kelompok penyakap murni dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sistem penyakapan yang umum berlaku ialah merat yang amat memberatkan penyakap. Selanjutnya disimpulkan bahwa kenaikan pendapatan sebagai akibat kenaikan produksi hanya akan memperkuat posisi petani pemilik sehingga oleh karena itu antara petani kaya pemilik tanah dengan golongan buruh tani semakin menyolok.

Lebih dari itu dilaporkan bahwa justru kelompok pemilik sawah garapanlah yang terbanyak memperoleh pendapatan dari sumber lain baik yang off farm maupun non-farm. Hal ini merupakan petunjuk bahwa jika posisi ekonomi menjadi lebih kuat, maka dari segi waktu dan tenaga terbukalah kelonggaran yang memungkinkan diusahakan sumber di luar usaha tani yang dapat memper

besar lagi pendapatannya. Dengan demikian terjadilah efek ku-mulatif.

Tentang siapa yang memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari program Bimas telah disinggung pada bagian depan, lihat halaman 5 dan 6. Adapaun intensitas penanaman juga naik. Dengan demikian akan memerlukan tenaga yang lebih banyak. Namun bila diperhatikan ketidakseimbangan penguasaan tanah, akan tampaklah segi lain dan akibat yang menyusuli perbaikan prasarana pengairan.

Tidaklah terlalu sulit dimengerti bahwa fasilitas air yang lumintu itu lebih banyak dinikmati oleh petani yang menguasai tanah luas, misalnya dalam hal volume air. Lumintunya fasilitas air ini membawa akibat naiknya nilai tanah. Naiknya nilai tanah ini tercermin dari naiknya harga sewa tanah dan berubahnya syarat penyakapan ke arah yang lebih menguntungkan petani pemilik. Beralihnya sistem maro ke mertelu atau mrapat seperti yang terjadi di Klaten atau Semarang merupakan contoh yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Jawa Tengah. Jadi perbaikan prasarana pengairan ini ikut pula memperlebar jurang perbedaan antara buruh tani dan petani miskin yang makin ter-desak di satu pihak dan petani kaya yang semakin kaya di pi-hak lain. Program BUUD/KUD nampaknya kurang-lebih juga mengha-silkan akibat yang sama.

Dalam penelitian di Kabupaten Demak, LPTS lebih jauh me-laporkan bahwa BUUD Kecamatan Gajah yang beranggotakan seba-manyak 34 orang terdiri dari 22 orang petani kaya, 6 orang pa-mong desa, 5 pegawai negeri, dan seorang purnawirawan ABRI. A-dapun dalam operasi kerjanya BUUD/KUD lebih banyak menguntung-kan para pedagang/tengkulak oleh karena ia lebih banyak beker-jasama dengan tengkulak daripada dengan petani. Gejala yang sama juga terjadi di Banyumas sebagai yang disaksikan sendiri oleh penulis.

Mengingat program pembangunan di negara kita adalah pro-gram yang menyeluruh, dengan demikian kecuali menyangkut pem-

bangunan ekonomi juga mencakup bidang lain seperti sosial, budaya, dan politik. Menyadari akan hal itu pemerintah telah berusaha menata kembali bidang agraria. Penataan kembali dalam bidang agraria bukan sekedar mendukung keberhasilan program pertanian dalam arti meningkatkan produksi, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan desa secara keseluruhan. Angka tuan tanah yang semakin tinggi, sudah barang tentu diikuti oleh konsentrasi penguasaan tanah di pihak lain. Dengan semakin banyak permintaan untuk memperoleh tanah garapan maka akan semakin berat persyaratan yang diajukan oleh pemilik tanah. Di satu pihak terhadap sekelompok petani miskin yang harus akan tanah garapan, masih pula dijumpai tanah bero yang tak sempat digarap oleh tuan tanah. Maka adalah bijaksana ketika pemerintah mengeluarkan UUPA dan UUBH pada tahun 1960-an, di mana dengan tandas Presiden Soekarno waktu itu menyatakan bahwa petani pemilik tanah akan menggarap tanahnya secara lebih intensif, serta UUPA akan mengubah tanah bero itu menjadi tanah yang produktif.²⁶⁾

Pemilikan tanah secara absentee merupakan kasus yang telah ada pada menjelang dasa warsa 1960-an. Kabupaten Brebes, tercatat sebagai pemilik tanah absentee yang paling luas di Jawa Tengah, kemudian diikuti oleh Kabupaten Purworejo.²⁷⁾ Adapun di Kabupaten Klaten landreform hanya dilaksanakan untuk mengatur tanah absentee saja, di tanah absentee yang dibagikan seluas 14.5235 hektar yang dimiliki oleh 34 orang dan dibagikan kepada 43 orang petani penerima.²⁸⁾ Meskipun tanah absentee telah ditata menurut perundang-undangan yang berlaku, tetapi orang masih bisa mempertanyakan siapa penerima tanah absentee tersebut. Kasus di daerah Klaten menunjukkan bahwa penerimaan tanah itu pada umumnya masih keluarga dekat dengan pemilik lama, yang sebelumnya tak pernah menggarap tanah tersebut. Adapun kasus di Purworejo menunjukkan bahwa karena pelaksanaan landreform itu dinilai sebagai kebijakan PKT setelah G30S tanah yang telah direstribusikan itu diminta kembali oleh pemilik lama. Petani tersebut tak bisa berbuat apa-apa ka

rena persyaratan membayar cicilan ganti rugi belum dilaksanakan, Jadi paling tidak dalam pelaksanaan landreform ini terdapat dua hambatan yaitu hambatan politis dan hambatan ekonomis. Jelaslah bahwa petani miskin masih terlalu sulit untuk menerima distribusi hasil pembangunan ini.

Perubahan struktur agraria ini diharapkan akan mendorong tercapainya atau terwujudnya kesempatan kerja yang produktif dalam lingkungan desa seperti peningkatan pendapatan golongan termiskin membendung perpindahan yang bisa mengosongkan pedesaan dari anggotanya yang paling dinamis serta bisa mempunyai prsarana ekonomi dan sosial.²⁹⁾ Dengan dilaksanakannya UUPA dan UUBH masyarakat diharapkan akan memperoleh kesempatan menggarap tanah yang lebih luas maupun pembagian hasil panen secara lebih adil, sehingga akan tercipta keadaan yang cukup favorable untuk melaksanakan program pembangunan prsarana yang mereka butuhkan.

Perlu disadari bahwa kegiatan pembangunan tidak akan seluruhnya ditangani pemerintah. Dalam batas-batas tertentu masyarakatlah yang harus membangun untuk dirinya. Keterbatasan dana dan personalia merupakan kendala bagi pemerintah untuk menangani semua masalah yang ada di masyarakat. Dengan kata lain pembangunan bukan hanya menjadi tanggung-jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung-jawab seluruh bangsa. Dalam konteks inilah kiranya bahwa pemerintah harus mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Sebagai dikatakan bahwa pembangunan bukan sekedar pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan manusia seutuhnya.³⁰⁾ Dengan demikian pemerintah perlu secara nyata merealisasikan kebijakan tersebut, dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi bisa terwujud dalam tahap-tahapan pembangunan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Karena sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses pembangunan maka pendekatan ini disebut bottom up.

Pada dasarnya strategi ini adalah dalam rangka mencipta-

kan mekanisme pembangunan yang berakar pada masyarakat, agar mekanisme yang sehat bisa melembaga yang pada gilirannya akan mendukung pemerintah guna mempercepat tercapainya desa swa-sembada lewat desa swa-daya ke swa-karya. Usaha dalam kaitannya dengan meletakkan dasar bagi mekanisme dalam pembangunan ini tampaknya telah dimulai sedini dasa warsa 1950-an dengan diintrodusirnya LSD. Menciptakan mekanisme yang sehat atau institusional building ini akan bermanfaat besar bagi masyarakat, karena dalam proses itu mereka bisa belajar memahami persoalan yang dihadapi, mengidentifikasi potensi yang ada di desanya serta mencari jalan keluar guna memecahkan persoalan yang dihadapi bersama. Di samping menanamkan rasa handarbeni terhadap setiap program pembangunan yang dilaksanakan di desanya, partisipasi masyarakat bisa memupuk rasa solidaritas sosial mereka. Di sinilah peranan partisipasi dalam membentuk masyarakat.

Partisipasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan merupakan strategi sentral dalam pembangunan nasional. Bagaimanakah dinamika masyarakat pedesaan dilihat dari partisipasi mereka dalam pembangunan akan terlihat antara lain dari hasil penelitian team dari Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada di Kabupaten Boyolali pada tahun 1978.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ini mencakup berbagai aspek, yaitu partisipasi masyarakat dalam bidang kredit, LSD, proyek Inpres, dan program Bantuan Desa atau Bandes. Dalam bidang kredit hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun fasilitas kredit tertentu hanya dimanfaatkan oleh lapisan masyarakat atas yaitu pengusaha kaya, seperti KIK misalnya, tetapi ternyata kelompok masyarakat dari lapisan menengahlah yang paling banyak menggunakan jasa fasilitas kredit formal.³¹⁾ Sebagaimana diketahui di Propinsi Jawa Tengah pemerintah daerah tingkat I memberi modal kepada Bank Kredit Kecamatan atau BKK untuk beroperasi di tiap kecamatan. Kredit Candak Kulak yaitu fasilitas kredit yang ditu-

jukan untuk lapisan miskin di pedesaan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat meskipun penggunaannya belum berorientasi produksi. Adapun KIK dan KMKP yang memberi kesempatan bagi calon nasabah mengambil kredit sampai sejumlah Rp. 5 juta pada umumnya dimanfaatkan oleh lapisan atas seperti pemilik rice mill, pedagang, dan sebagainya.

Adapun LSD di desa sampel telah menunjukkan adanya peranan yang positif yaitu ³²⁾:

1. Lembaga itu telah merupakan inovator, dalam arti menyampaikan hal-hal yang baru kepada masyarakat

2. Lembaga itu telah berperan sebagai penumbuh akan adanya kebutuhan baru. Sejak pendidikan modern belum masuk ke desa, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, gizi, dan sebagainya masih sangat rendah. Dalam kondisi yang demikian LSD sebagai lembaga kader yang dapat menggugah nurani masyarakat akan artinya hidup sehat, gizi yang baik, dan sebagainya.

3. LSD telah berhasil membina solidaritas masyarakat. Dengan lembaga ini masyarakat menyadari bahwa tujuan yang pada mulanya tak mereka bayangkan bisa tercapai, dengan kerjasama idaman itu bisa terrealisir. Lembaga ini telah berhasil meningkatkan gotong-royong masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sedangkan pada program Bantuan Desa partisipasi masyarakat dari lapisan paling bawah yaitu petani, pedagang, dan bakul cukup tinggi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap pemanfaatan. Bisa diduga bahwa dalam tahap perencanaan warga desa yang terdidiklah yang lebih banyak berperan, meskipun kelompok ini tak mampu menumbuhkan partisipasi dalam tahap implementasi dan pemanfaatan.³³⁾ Dalam tahap implementasi dari program Bandes ini dapat dikatakan segenap warga desa ikut terlibat, karena pada umumnya proyek yang dibiayai dengan dana Bandes pada umumnya selalu lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan yang dilakukan. Swadaya masyarakat

dipungut berupa tenaga, uang atau pun benda. Secara bergilir setiap warga desa wajib bekerja pada proyek pembangunan, bila seseorang berhalangan bisa mewakilkan kepada warga desa yang lain. Dengan demikian muncullah kesempatan kerja bagi buruh tani di desa tersebut. Adapun benda yang harus dibangun bisa berupa batu, semen atau apa saja yang diperlukan untuk pembangunan tersebut.

Proyek Inpres yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali adalah Program Bantuan Sarana Kesehatan, Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar maupun Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Karena program ini pada umumnya merupakan top down program, maka masyarakat hanya terlibat pada tahap pemanfaatan saja.³⁴⁾ Karena sejak awal masyarakat tak diikutsertakan dalam proses pembangunan maka kegagalan proyek ini sepenuhnya berada di pundak pemerintah. Pemilihan jenis proyek maupun lokasi yang seringkali tidak tepat merupakan akibat dari tiadanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Misalnya di satu desa terdapat satu gedung sekolah yang digunakn oleh tiga buah SD secara bersama-sama sehingga sejak pagi hingga sore tempat dan gedung tersebut tak pernah sepi, di lain pihak di dekat kecamatan terdapat empat buah gedung SD yang dibangun secara berderet-deret; merupakan contoh dari sekian banyak kegagalan dalam pelaksanaan program Inpres.

Dengan mengutip pendapat de Vries, Ki Hadjar Dewantoro berpendapat bahwa kebudayaan daerah dalam hal ini termasuk juga pedesaan bersumber kepada kebudayaan kota.³⁵⁾ Di samping adanya kecenderungan masyarakat desa untuk meniru apa saja yang berasal dari kota, dalam program pembangunan di negeri ini masih mencerminkan adanya urban-bias. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah dalam bidang pendidikan. Pengamatan menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita berskala barat dan cenderung untuk menciptakan pola tingkah-laku dan aspirasi yang konsisten dengan standard hidup dan budaya kota negara industri. Sistem pendidikan semacam itu akan mendorong

makin cepatnya perpindahan besar-besaran dari pedesaan ke kota dan pengrusakan komunitas petani tanpa memberi kesempatan bagi proses transformasi teknologi di daerah pedesaan yang merupakan dasar bagi jalan menuju industrialisasi.

Perasaan tidak puas terhadap situasi pedesaan yang dinilai tidak adil telah ada di kalangan masyarakat pedesaan. Reaksi yang diberikan terhadap keadaan tersebut bervariasi berkisar dari bersikap pasif tak memberikan tanggapan apa pun sampai pada tindakan agresif berupa aksi-aksi protes maupun gerakan massal lainnya. Gerakan sosial yang meletus sebagai reaksi terhadap keadaan masyarakat pedesaan yang tidak adil telah muncul pada abad XIX dan secara sporadis tampak pada abad XX.³⁶⁾

Gerakan protes yang muncul di daerah Klaten pada tahun 1960-an ditujukan kepada pemerintah dan tuan tanah.³⁷⁾ Aksi massal petani yang bertujuan untuk mengubah sistem persewaan tanah bagi kepentingan perusahaan perkebunan meletus pada tahun 1962. Dalam sistem persewaan tanah bagi kepentingan pabrik gula petani berada pada pihak yang dirugikan. Bukan saja harga sewa yang sedemikian rendah, tetapi juga sistem penanaman yang merugikan petani. Uang sewa tanah selama 14 bulan yang diterimakan kepada kira-kira sama dengan harga penjualan padi satu musim tanam untuk luas tanah yang sama. Jadi harga sewa tanah sama dengan sepertiga dari jumlah uang yang seharusnya diterima petani. Adapun sistem pertanaman yang dipraktekkan di daerah Klaten sampai dengan tahun 1961 adalah sistem 'walik lubang. Tetapi pada tahun 1962 Bupati mengeluarkan peraturan baru bahwa menurut peraturan tersebut petani diwajibkan menyerahkan tanah separuh dari miliknya sekali dalam dua tahun. Sistem ini dikenal dengan sistem glebagan. Dengan dikeluarkannya peraturan baru tersebut petani kecuali harus menerima uang sewa yang rendah dari perusahaan, juga harus direpotkan dengan membersihkan sawahnya dari tonggak pohon tebu setiap akan memulai menggarap tanahnya yang diterima dari perusahaan. Meskipun untuk membersihkan tonggak

tebu tersebut petani menerima uang dongkelan tetapi pada kenyataannya petani baru menerima uang lama setelah penggarapan selesai.

Sebagai reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah tersebut petani menolak dengan berbagai bentuk seperti memperlambat waktu penyerahan tanahnya kepada perusahaan, tidak mau menerima uang sewa, atau bahkan menolak sawahnya disewa oleh perusahaan.³⁸⁾ Gerakan protes timbul secara luas antara lain di Kecamatan Jogonelan, Kecamatan Karangnongko, dan Kecamatan Gantiwarno. Reaksi petanikecuali berbentuk sebagai dikemukakan di atas juga berupa pengrusakan dan pencurian tebu. Pembakaran kebun tebu terjadi antara lain di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper.

Sasaran gerakan massal protes petani terhadap perusahaan perkebunan bukan hanya ditujukan terhadap perusahaan perkebunan gula, tetapi juga terhadap perusahaan tembakau dan perusahaan rosella. Sehubungan dengan hal tersebut hasil penelitian penulis di daerah ini³⁹⁾ menunjukkan bahwa gudang penyimpanan tembakau milik perusahaan menjadi sasaran aksi petani. Sekurang-kurangnya dua gudang dan sebuah los milik PT Wedi Birit berhasil dibakar oleh petani. Kerugian ditaksir Rp. 3 juta. Adapun aksi protes petani terhadap perusahaan rosella terjadi di Kecamatan Tulung dan Karanganom. Petani yang terlibat dalam aksi massal ini mendekati angka 2000 orang.

Sebenarnya dalam menetapkan uang sewa tanah bagi kepentingan perusahaan, Bupati didampingi oleh semacam dewan pertimbangan yang beranggotakan wakil dari partai politik dan perusahaan. Saran dan anjuran agar besarnya ^{uang}sewa serta sistem pembayaran, maupun sistem pertanaman agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan nasib petani telah pula diberikan. Kenyataan menunjukkan bahwa petani telah keluar sebagai pihak yang dirugikan.

Gerakan massal yang ditujukan kepada tuan tanah di daerah Klaten dikenal dengan nama aksi sepihak. Tujuan dari gerakan ini ialah :

1. merebut kembali tanah yang disewakan
2. merebut kembali tanah yang digadaikan
3. merebut kembali tanah yang sudah dijual; dan
4. mempertahankan tanah OG yang telah dibeli oleh orang lain.⁴⁰⁾

Gerakan aksi sepihak meletus dengan skala yang lebih luas yaitu di 6 dari 23 kecamatan yang ada, pada tahap awal. Pada saat menjelang akhir bulan Maret 1964 gerakan mencapai puncaknya dari segi kuantitas, adapun pada bulan yang sama di tahun berikutnya gerakan mencapai puncaknya dari segi kualitas. Hasil dari gerakan aksi sepihak ini antara lain terdapat 26 keluarga petani berhasil memperoleh kembali tanah yang disewakan atau digadaikan.

Gerakan aksi sepihak di Klaten dilaksanakan secara serentak berkat campur-tangan BTI di dalamnya. Sedangkan aksi massa yang ditujukan terhadap perusahaan perkebunan masih dilakukan secara tidak teratur dan belum tampak adanya tanda-tanda keterlibatan BTI di dalamnya. Sehubungan dengan gerakan tersebut pemerintah berusaha menegakkan hukum di wilayah ini dengan cara mengadili pelaku dari gerakan tersebut.

Dinamika masyarakat pedesaan bukan saja diarahkan untuk memperbaiki keadaan yang timpang sebagai akibat dari anasir dari luar tetapi juga dapat berupa aksi yang ditujukan untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam penelitiannya di Purworejo, Gunawan Wiradi⁴¹⁾ melapor-

kan bahwa dengan kepemimpinan lurah petani Ngandagan berhasil merubah struktur penguasaan tanah sedemikian rupa sehingga petani miskin memperoleh kesempatan memperoleh garapan secara lebih besar. Dalam sistem baru itu, semua pemegang tanah kulian yang seluas 300 ubin harus dipotong 90 ubin untuk diserahkan kepada desa. Tetapi pajak tanah dari 300 ubin atau 0.3 hektar tetap dibayar oleh pemilik lama. Sebagai gantinya pemilik tanah itu bebas dari kewajiban dalam kerigan.

Setiap buruh tani memperoleh kesempatan menerima tanah garapan seluas 45 ubin atau 0.064 hektar. Pemegang tanah tersebut - tanah buruhan berkewajiban dalam kerigan dan mereka disebut buruh tani. Bila pemilik tanah ingin ikut dalam kerigan, ia juga berhak menerima tanah 45 ubin.

Reformasi yang dilaksanakan di desa Ngandagan ini dimaksudkan untuk mengetraokan prinsip bahwa setiap orang di desa harus bekerja; dan bahwa setiap penggarap mempunyai jaminan atas tanah dan setiap keluarga petani mempunyai tanah untuk digarap. Dengan cara demikian kurang lebih 40 % dari tanah desa yang dikuasai orang dari luar desa dikurangi untuk kepentingan warga desa. Demikian pula bengkok pamong desa berkisar antara 150 ubin sampai 700 ubin. Bengkok lurah Ngandagan seluas 700 ubin atau satu hektar, sedangkan bengkok lurah di desa Demak mencapai 12 hektar.

Pimpinan desa menyadari bahwa dalam sistem baru akan terdapat hubungan kerja, dimana tatanan baru secara konsisten harus pula diletakkan dengan prinsip bahwa setiap orang harus bekerja. Upah tak digunakan dalam kerja. Kerja harus dihargai dengan kerja. Dengan demikian sistem pertukaran tenaga telah diintrodusir di desa ini sejak 1948.

Sebagai kesimpulan dapat disebutkan bahwa pembangunan pedesaan yang selama ini dilaksanakan pemerintah masih lebih banyak ditekankan pada pembangunan materi, meskipun secara bertahap telah terlihat adanya usaha untuk meletakkan dasar bagi pembangunan manusia - human investment. Strategi pembangunan yang melibatkan masyarakat sedapat mungkin diusahakan dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan menyadari bahwa sumber yang dimiliki negara ini semakin menipis maka dilaksanakannya strategi ini tak bisa ditawar lagi. Tak bisa diingkari bahwa pembangunan yang selama ini berjalan telah berhasil menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan standar hidup, dan sebagainya; meskipun pada sisi lain golongan yang tertindas masih tertatih-tatih untuk turut menikmati manisnya hasil pembangunan.

C A T A T A N

1. Prisma, No. 3, Tahun V, April 1976.
2. Ibid.
3. Sie Kwat Soen, Prospects for Agricultural Development in Indonesia; With Special Reference to Java. Wageningen, Centre for Agricultural Publishing and Documentation, 1968.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Iman Sutiknyo, "Kebijaksanaan Agraria dan Ketahanan Nasional" Paper pada seminar Pembangunan Sosial Politik Menuju ke Arah Peningkatan Ketahanan Nasional, Fak. Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, 1981.
7. Ibid. Lihat pula Soegijanto Padmo, "Landreform dan Gerakan Protes di Daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah; 1959-1965" Skripsi Sarjana Fak. Sastra UGM, 1975; Ina E. Slamet, "Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa", Jakarta, Bhratara, 1965.
8. J.M. Heredero, Rural Development and Social Change; An Experiment in Non-Formal Education. Manohar, 1978.
9. Erich H. Jacoby, Man and Land; The Fundamental Issue in Development. Andre Deutsch, 1971.
10. Maurice J. William. Development Cooperation; Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee, Paris, 1978.
11. Pusat Penelitian dan Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Laporan Penelitian Persepsi Adopsi dari Pembangunan Desa. Seri Laporan R 33. Yogyakarta, PPSPK UGM, 1980.
12. M.J. William, op cit.
13. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program yang ditujukan untuk golongan miskin di pedesaan seperti Kredit Canda Kulak (KCK), Proyek Samijaga, pembangunan Puskesmas, dan sebagainya.
14. Sie Kwat Soen, op cit.
15. Lihat Kompas, edisi 5 - 10 Juli 1982.
16. Lihat Kompas, edisi 12-13 Juli 1982.
17. M. Yudelman, "The Role of Agriculture in Integrated Rural Development Projects: The Experience of the World Bank", T.Th.
18. V.K.R. Rao, Growth With Justice in Asian Agriculture; An Exercise in Policy Formulation, Geneva, 1974.

19. Safri Sairin, "Beberapa masalah Derep; Studi Kasus Yogyakarta" Prisma, No. 9. Th. V. September, 1976.
20. PPSPK UGM, Strategi Pembangunan Pedesaan . Ringkasan Seminar SEADAG 1975. Seri Kertas Kerja OP 5, Yogyakarta, PPSPK UGM, 1976.
21. MM. Billah, Loehoer WD, dan Aries Kristanto, "Segi Penguasaan Tanah dan Dinamika Sosial di Pedesaan di Jawa (Tengah)" Cakrawala, No. 4/VIII, Januari-Febr. 1976.
22. Sayogyo, Modernisazation Without Development in Rural Java. 1973
23. Boeke, 19'1 dikutip oleh Billah, dkk, op cit.
24. Ten Dam, 1961 lihat Billah, dkk, op cit.
25. Billah, dkk, op cit.
26. Utrecht, op cit.
27. Wawancara penulis dengan pejabat Bappeda Kab. Purworejo pada Desember 1981.
28. Soegijanto Padmo, op cit.
29. J.M. William, op cit.
30. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 - 1983/84. Jilid I
31. Sugijanto Padmo dan Guritno, Laporan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Desa di Dalam Lembaga Kredit. Yogyakarta. PPSPK UGM, 1978.
32. J. Slamet dan Sutarjo, Laporan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Desa di Dalam Lembaga Sosial Desa. Yogyakarta, PPSPK UGM, 1978.
33. Muchji Muljoharjo, Laporan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Bantuan Pembangunan Desa. Yogyakarta, PPSPK UGM, 1978.
34. RB. Sumanto dan Suratman, Laporan Penelitian Tentang Partisipasi Masyarakat Desa di Dalam Pembangunan Proyek-proyek Instruksi Presiden. Yogyakarta, PPSPK UGM, 1978.
35. Ki Hadjar Dewantoro, Karya Ki Hadjar Dewantoro : Kebudayaan. Jilid II A, Yogyakarta, Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1967.
36. Sartono Kartodirdjo, "Agrarian Radicalism in Java² It's Setting and Development." in Claire Holt, Culture and Politics in Indonesia. Ithaca, Cornell University Press, 1972. Lihat juga Soegijanto Padmo, op cit.
37. Soegijanto Padmo, op cit.
38. Ibid.
39. Ibid.
40. Ibid.
41. Gunawan Wiradi, "Landreform in a Javanese Village Ngandagan; A Case Study on the Role of Lurah in Decision Making Process; Rural Dinamic Study Agro Economic Survey, 1981.

Seminar Sejarah Lokal

Topik : II

"WONG CILIK", PROBLEMA DAN DINAMIKA SURABAYA ABAD 19

Oleh :
Suhartono

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL
1982

jelas.

Sekaligus sasaran pengamatan saya tertuju pada gambaran wong cilik dengan dinamika sosialnya di Vorstenlanden umumnya dan Surakarta khususnya. Di sini sejarawan harus sudah siap menerima pertanyaan mengenai sasaran sejarah lokal dengan gambaran sejarah mikro. Selanjutnya pertanyaan yang "mematikan" kalau ditanyakan mana sumbernya dan apakah sumber itu cukup representatif. Namun demikian hal ini dapat dijawab secara tuntas dengan menunjukkan sumber-sumbernya yang selalu diburu oleh setiap sejarawan yang menekankan pada penelitian arsip. Sementara dapat terjawab apabila apabila dapat menunjukkan Algemeen Verslag (AV) dan Politiek (PV), sehingga tidak sempat dikejar lagi. Sesungguhnya dua buah laporan itu hanya sedikit sekali menyebut dan membuat gambaran wong cilik, lebih-lebih kalau harus menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Oleh karena itu merekonstruksinya tidak semudah seperti yang diharapkan, sebab harus rajin mengumpulkan gambaran yang berserakan mengenai peranan wong cilik. Ceritera atau oleh-oleh perjalanan walau pun hanya kunjungan selintas dapat juga memberi gambaran kehidupan wong cilik.³⁾

Sementara dapat dilihat bahwa yang labil adalah di atas permukaan, yaitu golongan priyayi yang sempat melakukan mobolitas, sedangkan wong cilik tak tampak dinamikanya. Sesungguhnya wong cilik pun tidak berbeda dengan priyayi, bahwa mereka tidak tetap tinggal di desanya, tetapi melakukan perpindahan ke desa lain. Biasanya wong cilik yang sebagian besar petani, melakukan perpindahan karena desakan dari luar desa, atau atas kemauan mereka sendiri, menghindari tekanan gupermen dan ada yang secara bersama-sama me-

3) W.B. d'Almeida, Life in Java : With Sketches of the Javanese (London : (?), 1864); L.Th. Mayer, Een blik in het Javaansch volksleven (Leiden : E.J. Brill, 1897); P.P. Roorda van Eysinga, Verschillende reizen en lotgevalen van P.P. Roorda van Eysinga (Amsterdam : Johannes van der Hey & Zoon, 1832); H.E.B. Schalhausen, Over Java en de Javanen (Amsterdam : P.N. van Kampen & Zoon, 1909).

lakukan gerakan yang disebut perang desa. Jadi dapat dikatakan bahwa dinamikanya wong cilik disebabkan oleh beberapa dimensi yang berujud sosial-ekonomi, politik dan kultural; singkatnya bahwa dimensi kehidupan masyarakat pedesaan berbentuk multidimensional.⁴⁾

Dimensi Sosial-ekonomi

Orang harus menyebut pasar sebagai pusat kegiatan sosial-ekonomi. Di sinilah terjadi jual-beli barang-barang yang tidak dapat diproduksi di suatu tempat, termasuk ~~ba~~ han makanan dan karang kerajinan. Pada abad 19 di Vortenlan dan jumlah pasar selalu bertambah.⁵⁾ Pertambahan ini mengikuti tumbuhnya berbagai onderneming dan biasanya pasar-pasar ada di dekatnya, di tempat-tempat persimpangan jalan dan di perbatasan dengan karesidenan lain seperti Kedu, Semarang, dan Madiun.

Pedagang-pedagang menjual barang dagangannya dari satu pasar ke pasar lain, biasanya menyesuaikan dengan hari pasarannya, misalnya kliwon, pasaran Klaten, paing, pasaran Prambanan, pon, pasaran Bayat, demikian seterusnya sehingga setiap kliwon pasar Klaten banyak dikunjungi pedagang dari distrik-distrik sekitarnya. Kerajaan mendapatkan penghasilan dari pasar dan warung pada 1830 mencapai f 60.615,29; berasal dari pasar Klaten f 22.041,05, pasar Ampel f 22.292,60.⁶⁾

Perbedaan harga antara pasar satu dengan pasar lainnya untuk satu jenis barang atau bahan makanan menyebabkan para pedagang menuju ke pasar-pasar tempat menjual dagangannya

4) Mengenai multidimensional, lihat Sartono Kartodir - djo, "Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia abad 19 dan 20". Lembaran Sejarah, I, 1967.

5) Masih banyak pasar desa di Afdeeling Klaten, a.l. Gading, Sumopuro, Granting, Birin, Kembang, Potro, Pluneng, Glodogan, Kejamben, Karang, Balak, Suko, Waru, Pengkol, Babadan, dll.; lihat Solo, bundel 170.

6) i b i d.

yang lebih tinggi dengan maksud mendapatkan keuntungan. Perbedaan harga bahan makanan mencapai 1 - 3 sen untuk sepikul beras, 5 - 15 sen untuk setiap potong kain. Pasar-pasar seperti Jatinom, Jurangjero, Somopuro dan Pedan misalnya, karena sukar dicapai, di situ harga penjualan menjadi lebih tinggi.⁷⁾

Pengangkutan barang dagangan dilakukan dengan nyunggi, mikul, nggendong untuk barang-barang dagangan yang beratnya kurang dari 60 kg, tetapi yang lebih dengan menggunakan gerobag atau diangkut kuda. Jarak tempuh biasanya sekitar 3 hari perjalanan, misalnya pedagang garam dari Kuwu, Grobogan menjual garamnya ke daerah Sragen, Wonogiri atau Klaten. Mereka setiap hari hanya dapat menempuh jarak sekitar 20 km, sehingga setiap malam mereka menginap di koplakan. Tempat ini adalah untuk menginap pedagang dan juga untuk menggantikannya kuli pengangkut; biasanya letaknya di perbatasan, misalnya di Prambanan, Jatinom, Kedungbanteng, dll. Kalau garam atau beras dijual ke daerah Yogyakarta maka kembalinya, pedagang itu membawa minyak kelapa, gula kelapa, dll.⁸⁾

Jalan-jalan besar yang digunakan untuk pengangkutan barang ke arah Yogyakarta dan Semarang terdapat pusat-pusat perbengkelan untuk memperbaiki kereta atau gerobag. Desa Karangwuni dan Ngawonggo, di jalur jalan besar yang menuju Yogyakarta menjadi bengkel besar. Dua desa ini menghubungkan arah utara-selatan sehingga di sini menjadi pertemuan dan pergantian alat pengangkut. Sunggingan, Boyolali di jalan menuju Semarang menjadi koplakan dan sekaligus sebagai bengkel.

Perkembangan onderneming tebu dan pengolahannya memerlukan banyak tenaga kerja. Munculnya kerja glidigan (dag-loon) mengundang petani melepaskan sawah garapannya dan men-

7) i b i d; pada 1900 ada 286 pasar dan 3.451 warung.

8) Lihat tempat-tempat transit dalam AV., 1873, 1876, 1883.

jadi kuli-kuli patrik gula. Demikian pula perluasan tanaman kopi memerlukan tenaga kerja banyak, bukan saja tenaga laki-laki yang terlibat tetapi juga wanita dan anak-anak. Pada waktu-waktu musim tebang tebu dan petik kopi desa menjadi sepi, semuanya memburu uang harian di tebon dan kopen. Pada tahun 1875 kuli harian mendapat upah 24-40 sen/hari, wanita dan anak-anak 15 sen dan tukang-tukang antara 25-100 sen.⁹⁾ Pada 1887, masih dalam periode depresi pertanian, upah lebih rendah daripada 1875, tetapi kuli-kuli itu mendapat sedikit candu dan makan.¹⁰⁾ Selain itu mendapatkan uang dari hasil pembuatan keranjang, anyaman daun kelapa, penjualan pupuk kandang, dll.

Oleh karena peredaran uang sudah sampai ke desa-desa, maka orang-orang Cina menyerbu ke desa dengan maksud menyerap kembali uang yang masuk desa.

Desa-desa menjadi sasaran orang Cina. Mereka menjaja - kan barang-barang kelontong, dan kain. Barang-barang yang dijualnya dapat dibayar dengan cicilan. Oleh karena itu di desa muncul istilah cino klontong, cino mindring, dan yang membungkakan uang disebut cino notang. Pada musim paceklik, biasanya sebulan atau dua bulan sebelum panen, pinjaman uang harus dibayar dengan bunga sekitar 40 %. Di sekitar onderneming mereka membuka premben, tempat penjualan candu dan sekaligus tempat menghisapnya.

Desena terakhir abad 19 keadaan kehidupan masyarakat desa menjadi sangat jelek dan hal ini menurut gubernemen adalah karena aktivitas orang-orang Cina di pedesaan. Oleh karena itu gubernemen berusaha mencegahnya sehingga pada 1892 muncul laporan kegiatan ekonomi dan jumlah orang-orang Cina dipakai sebagai data untuk menangani lebih lanjut. Akhirnya timbul larangan kepada orang Cina agar mereka tidak

9) AV., 1875.

10) AV., 1887.

melakukan kegiatan ekonomi di desa. Di Surakarta tidak terjadi reaksi, tetapi di Yogyakarta terjadi kerusuhan. Sekitar 40 orang Cina bersenjatakan tongkat melakukan protes terhadap larangan beroperasi di desa.¹¹⁾ Namun dalam waktu singkat kerusuhan itu sudah dapat dipulihkan. Setelah itu orang Cina makin banyak diawasi. Setiap mereka pergi ke desa harus membawa layang pas yang diketahui oleh wijkmeester-nya. Larangan tegas terhadap orang Cina yang tinggal di desa dapat dikenakan hukuman.¹²⁾ Sebenarnya masuknya Cina ke desa-desa dan setelah kehidupan desa menjadi jelek kemudian gubernemen mengeluarkan larangan untuk mencegah mereka. Ini sebenarnya adalah sikap gubernemen yang ambivalen, terus terang saja merupakan sikap ragu-ragu dan oportunistik.

Dimensi politik

Kalau pedesaan dilihat seintas maka tak tampak adanya dinamika. Akan tetapi sesungguhnya tidak demikian, karena sejak lama sudah terjadi otodinamik bahwa wong cilik melakukan perubahan dan gerakan sendiri. Kurang dapat dibenarkan apabila masyarakat pedesaan statis dan tidak adil. Mereka sudah dapat menyesuaikan dirinya dengan alam sekitarnya, bukan hanya penyesuaian terhadap keganasan alam, banjir dan kekeringan, tetapi juga terhadap wabah dan penyakit menular. Dengan kata lain mereka sudah tanggap terhadap lingkungan dan langsung bereaksi untuk menghindari kesulitan dan bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Pada 1870-an orang-orang di lereng Lawu sebelah timur, di Karesidenan Madiun, melintasi perbatasan dengan menaiki Gunung Lawu dan menetap di Karesidenan Surakarta. Tidak diketahui motivasi perpindahan

11) Lihat dalam "Nota omtrent den economischen toestand der vreemde oosterlingen (Chineezen) in de afdeeling Woningiri", Verslag Resident Soerakarta, 1862.

12) J. Groneman, Wit en over Midden Java : over opium pacht, Chineezen woeker, en andere Javaansche belangen (Zuthphen : W.J. van Thieme & Co., 1891), h. 297-305.

nya, tetapi yang jelas orang-orang itu masih ada kebebasan untuk memilih tempat tinggal baru.¹³⁾

Contoh lain, perpindahan menurut kemauannya sendiri dapat ditunjukkan pada petani yang mengalami kekurangan air pada musim kemarau. Sebenarnya keperluan air bukan hanya menyangkut dirinya, tetapi yang lebih penting adalah untuk ternaknya. Kerbau, sapi, dan kambing merupakan satu-satunya kekayaan petani yang mudah dibawa berpindah. Ternak dan pemiliknya merupakan kesatuan. Perhitungan mengenai cacah, sebenarnya bukan hanya jumlah tenaga laki-laki dewasa yang kuat bekerja tetapi termasuk anggota keluarga lain yang dapat membantu dan juga sepasang atau dua pasang kerbau atau sapi yang mempercepat proses penggarapan sawah. Perpindahan disertai ternaknya secara musiman terjadi di daerah yang kurang air, misalnya di Distrik Wonogiri, Baturetno. Setelah datang musim hujan mereka kembali ke desa asalnya.¹⁴⁾

Di daerah onderneming penggunaan hewan sebagai tenaga angkut sudah tidak asing lagi. Terutama di tebon, kerbau dan sapi mempunyai saham besar pada musim tebang, mengangkut tebu yang sudah ditebang dari sawah ke penggilingan-penggilingan. Sebagai tenaga angkut biasa, sebagai penarik gerobak atau kereta juga tak kalah pentingnya, kerbau, sapi atau kuda sudah lama berperan membantu pemiliknya menjadi dinamis. Di sawah-sawah yang jauh dari desanya, hewan-hewan itu diajak menginap sampai berbulan-bulan. Di koplakan, mereka diajak menunggu muatan dan mengangkutnya sekaligus sampai ber-singgu-minggu, baru keudian pulang ke desanya. Demikian pu

13) Penduduk Surakarta pada 1870 ada 72.896 Jawa, 2.138 Eropa, 4.963 Cina, 42 Arab dan 214 Timur Asing; Lihat pula pusat-pusat permukiman dalam Landbouwatlas van Java en Madoera (Wetlevreden : Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1926.

14) AV., 1876.

la di hutan jati di daerah Sukowati banyak memerlukan hewan pengangkut yang pelaksanaannya di bawah pengawasan priyayi blandong.¹⁵⁾

Sudah disinggung di muka bahwa yang menyebabkan makin dinamisnya wong cilik terutama adanya tekanan dari luar yaitu setelah onderneming menggantikan kedudukan para patuh, sehingga hak-haknya yang semula diterima oleh patuh kemudian digantikan oleh onderneming. Berbagai jenis pajak, baik berupa uang, tenaga kerja dan pundhutan yang berlebihan menjadikan beban berat bagi wong cilik. Cara-cara yang lazim untuk menghindarinya adalah minggat, meninggalkan desanya sekaligus melepaskan diri dari pajak. Tentu saja desa-desa lain tidak mau menerima karena sudah diketahui bahwa orang itu mbangkang, menolak kewajibannya sebagai kuli. Orang-orang semacam ini tidak mempunyai tempat tinggal tetap sehingga mereka disebut wong angin. Biasanya mereka hidup dengan cara yang tidak legal, bergabung dengan para bajingan dan benggol-benggolnya.¹⁶⁾

Para pembangkang pajak ternyata lebih reaktif menghadapi i gupermen dan mereka lebih dinamis dalam menghindari polisi. Bagaimana tidak, mereka yang kemudian menjadi maling, begal dan kecu¹⁷⁾ beroperasi di daerah perbatasan, dengan Yo

15) R.M.A.K. Pringgodigdo, Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenegorosche Rijk (Batavia-C. : G. Kolff & Co., 1939), h. 111.

16) Pada 1870-an daerah Surakarta terancam oleh gerombolan kecu, pimpinan Jodongso dari Sragen, lihat Mailra-pport 1873, no. 697; di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkū Buwono V (1828-1855) bahkan terdapat nama-nama benggolan ulung, seperti Gobang, Kinosek, Kandang Jinongkeng, Pentung Pinanggul, lihat J. Groneman, Een ketjoe geschiedenis : Vorstenlandsche toestanden II (Dordrecht : (?), h. 193.

17) Gerombolan kecu lebih cocok disebut bandit sosial politik; bandingkandengan E.J. Hobsbawm, Bandits (Penguin Books, 1975), h. 13.

gyakarta, Kedu, dan Semarang. Setiap kali melakukan pengke-
cuan, mereka menghilang masuk ke karesidenan lain; dari
sebelah timur Kali Opak mudah sekali menghilang di sebelah
barat. Demikian pula mereka bersembunyi di desa-desa yang
ada di luar kepatuhan yang letaknya masih tumpang-naruk.

Di dalam Koloniaal Verslag (KV) dimuat banyaknya peng-
kecuan, dan antara 1855-1900 jumlahnya cukup tinggi kalau
dibandingkan dengan karesidenan lain. Hal ini dianggap meng-
ganggu ketenteraman masyarakat pedesaan khususnya karena
di situ berdiam landhuurders yang terancam harta dan nyawa-
nya dan pada suatu ketika keduanya lenyap tanpa diduga le-
bih dahulu. Gubermen maupun penguasa setempat tidak mampu
berbuat banyak dan baru pada 1875 usaha untuk mencegah me-
luasnya kecu digalakkan di pedesaan.¹⁸⁾ Ronda malam digiat-
kan, jalan-jalan masuk ke desa dan pekarangan harus ditutup
pada waktu malam. Namun usahanya tidak membawa hasil, se-
bab ternyata seperti pada tabel di bawah ini jumlah pengke-
cuan cukup tinggi, sedangkan pencurian dan pembegalan men-
capai dua atau tiga kali jumlahnya kalau dibandingkan de-
ngan pengkecuan.

Pengkecuan, 1885-1900

Kabupaten	1885	1887	1892	1895	1898	1900	Jumlah
Surakarta	8	-	1	3	1	2	15
Klaten	2	8	11	2	-	-	23
Boyolali	-	1	1	1	6	4	13
Sragen	10	-	1	1	2	2	16
Wonogiri	5	3	-	-	-	-	8
Jumlah	25	12	14	7	9	8	75

Sumber : Angka-angka di atas dikumpulkan dari AV., 1885-
1900.

18) Kab. Geh. 31/no. 151, 18 Desember 1875.

Di Vorstenlander, setelah Palihan Nagari (1755) sering sekali terjadi prang desa (desa oorlog), yang disebabkan oleh pembagian lungguh yang tumpang-paruk. Di desa-desa sering terjadi pergantian patuh sehingga para kawulo tidak tahu lagi siapa patuh-nya. Demikian pula banyaknya nemancasan desa sebagai akibat tambahnya birokrat baru, muncul pikiran di kalangan wong cilik bahwa mereka kehilangan pegangan yaitu gusti-nya yang melindungi mereka. Krisis ini tidak menguntungkan wong cilik sehingga memudahkan mereka terseret dalam tindakan-tindakan kekerasan. Perselisihan kecil antar desa atau patuh menimbulkan tindakan agresif berupa bentrokan pisik yang disebut prang desa.¹⁹⁾ Ekses yang tidak baik dari perang ini adalah terjadinya perampokan terhadap desa yang lemah. Demikian banyaknya perampokan di daerah Yogyakarta disebutkannya bahwa perampokan itu hampir setiap hari terjadi.²⁰⁾

Beberapa kasus prang desa dapat ditunjukkan dari sebuah laporan yang khusus memuat kejadian itu antara Pebruari sampai dengan Mei 1836.²¹⁾ Di dalam prang desa Wedi yang terjadi sebab utama adalah karena pergantian patuh, sedangkan demand desa itu menggunakan kesempatan untuk tidak membayar sewa sebanyak yang dibayarkan kepada patuh sebelumnya. Prang desa Cepoko terjadi karena pergantian status desa, yang semula desa perdikan kemudian dijadikan desa biasa yang harus membayar pajak. Demikian prang desa Macanan, Jiwonalan, Simping, dan Joso, penyebabnya tidak berbeda dengan yang terjadi di Wedi dan Cepoko. Yang perlu diperhatikan bahwa penerangan sampai melibatkan seperti di Wedi, 500 orang dengan membawa beraneka ragam senjata.

19) G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", Adatrechtbundel, no. 34, 1931, h. 84; Solo, bundel 166/4.

20) Lihat Yogya, bundel 9. 9a/8; AV., 1845.

21) Lihat Solo, bundel 130/6.

Elite agama pedesaan rupanya tidak senang melihat kapitalis asing sangat dominan di pedesaan. Oleh karena itu mereka mendekati wong cilik yang dieksploitasikan oleh kapitalis dan diajak menahan atau menentang gerakannya. Banyak haji melakukan pengembaraan di desa-desa, sambil mengajarkan agama dan mengkritik penguasa. Pada 1881, Haji Abdulkadir yang berasal dari Semarang mengembara di daerah Surakarta. Akan tetapi rupanya ia dicurigai gupermen dan akhirnya ditangkap.²²⁾ Di desa-desa berkembang guru-guru ngelmu yang ajarannya banyak diikuti orang desa sekelilingnya maupun dari afdeeling lain. Selain diajarkan ilmu agama juga ilmu kekebalan, kawedhugan, kadigdayan dan disertai jimat-jimat. Murid-murid itu berpindah-pindah perguruan karena guru yang satu dianggap mempunyai kelebihan dibanding dengan guru lain. Oleh karena itu seorang murid bertahun-tahun menyelesaikan atau ikut dalam beberapa perguruan. Jadi yang melakukan pengembaraan bukan saja guru-gurunya tetapi juga murid-muridnya.

Guru-guru ngelmu banyak terdapat di desa-desa, misalnya pada 1883 seorang bernama Subuh yang tinggal di Desa Kajoran, Klaten, mengajarkan ngelmu kebal. Oleh karena muridnya makin banyak maka ia dicurigai gupermen dan akhirnya dibuang ke luar Jawa.²³⁾ Pada 1884, Somorejo dan Jaimin menjadi guru pula, tetapi nasibnya juga tidak berbeda dengan guru-guru lain.²⁴⁾ Rupanya kecurigaan gupermen terhadap para haji dan guru menyebabkan ketatnya pengawasan terhadap kegiatan mereka sehingga di dalam AV selalu dimuat banyaknya peziarah yang pergi dan datang dari tanah suci.²⁵⁾

22) AV., 1881.

23) AV., 1883.

24) AV., 1884.

25) Lihat surat peringatan konsul Belanda di Singapur kepada gubernur jenderal, dalam Mailrapport 1881, no. 259, 309, 519.

Sejak desa-desa mempunyai kehidupannya sendiri maka faksi politik akan terjadi dan tidak dapat dihindarkan; beberapa kelompok yang timbul misalnya faksinya penguasa desa, durjono, elite agama dan masih banyak lagi yang kecil-kecil. Persekutuan dapat terjadi antara penguasa desa dengan para durjono, penguasa desa dengan kiai dan santrinya. Dengan demikian maka persekutuan itu sebenarnya merupakan perimbangan kekuatan-kekuatan politik pada tingkat desa. Apabila ada ancaman kerusakan maka dengan segera **timbul kekuatan menentang**nya. Salah satu kelompok dapat memenangkan yang dianggap penentangnya apabila mendapatkan bantuan dari luar desa.²⁶⁾

Dalam menghadapi kekuatan atau tekanan dari luar desa, khususnya memanifestasikan dirinya dalam bentuk onderneming, memaksa kekuatan-kekuatan politik di desa untuk bergabung dan menentangnya. Tekanan onderneming yang merekatkan lembaga dan kehidupan desa menggerakkan gabungan elite desa untuk mencegahnya. Oleh karena perubahan-perubahan terus-menerus terjadi maka gerakan protes terjadi secara sporadis.²⁷⁾ Pada 1865, terjadi gerakan sosial keagamaan di Desa Merbung, Klaten.²⁸⁾ Demikian pula gerakan Srikaton pada 1888 melibatkan persekutuan elite desa setempat.²⁹⁾ Selanjutnya masih terdapat gerakan penentang perubahan walaupun bentuknya jauh lebih kecil.³⁰⁾

26) Bandingkan dengan keadaan di pedesaan di daerah kopen dalam Boeka, Uit Java Binnenland : Pah Troena (Amsterdam : F. van Roosen, 1901)

27) Sartono Kartodirdjo, Protest Movements in Rural Java (Singapore : Oxford University Press, 1973).

28) PV., 1865; Ag. 13265/65, 8 Juli 1865; Ag. 14327/66, 9 Agustus 1866.

29) Besluit 14 Pebruari 1890, no. 1.

30) PV., 1871, 1885, 1886, 1888.

Dimensi kultural

Tidak diragukan bahwa wong cilik juga memiliki budayanya sendiri yang lahir dan berkembang di pedesaan. Tentu saja jenis budaya ini menunjukkan tempat asalnya yang serba kasar gerakanya, bahasa dan tingkah-lakunya. Ini mewakili pandangan yang berpusat di keraton yang menganggap bahwa di luar keraton, desa atau sabrang memiliki budaya non priyayi, tetapi sebenarnya budayanya wong cilik di pedesaan ini otonom dalam arti berdiri sendiri. Sebenarnya budaya pedesaan justru menjadi wadah budaya keraton atau kota, yang kalau ditinjau dari kelahirannya bahwa budaya kota diangkat dari desa, demikian pula timbulnya penguasa-penguasa pada tahap pertama.³¹⁾

Sehubungan dengan pedesaan yang memiliki budayanya sendiri maka yang banyak dipengaruhi oleh lingkungannya akan menghasilkan jenis seni gerak misalnya yang sesuai dengan ketinggian. Salah satu jenis tarian yang biasa disebut ronggeng³²⁾ atau teledek adalah jenis tontonan populer di pedesaan. Semacam tarian massal yang melibatkan orang banyak disebut tayuban yang diselenggarakan pada upacara dan pesta-pesta. Ini adalah salah satu ciri pertunjukan rakyat yang mementingkan kebersamaan dan kepolosan sesuai dengan pandangan hidup wong cilik.

Yang agak menarik teledek itu menjadi barangan, melakukan pertunjukan keliling dari satu desa ke desa lain. Biasanya mereka mbarang pada musim-musim naceklik di desanya dan setelah musim tanam atau musim panen mereka kembali. Bagi rombongan-

31) Agak berbeda dengan Redfield, maka di sini justru sebaliknya; yang memiliki tradisi besar adalah wong cilik, sedangkan tradisi kecil yang ada di keraton diangkat dari tradisi besar di pedesaan. Lihat R. Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture (Chicago : The University of Chicago Press, 1963).

32) Th. S. Raffles, The History of Java, I (London : Bock Porbuy and Allen Bookseller, 1817), h. 342-344.

an teledek yang tidak terikat oleh sawahnya, mereka mengembara sepanjang tahun. Rombongan ini tidak tentu mendapat bayaran uang tetapi cukup mendapat imbalan makan dan penginapan dan bahkan pecandunya dapat menahan sampai berbulan-bulan.

Dengan demikian fungsi rombongan teledek memberi hiburan pada masyarakat. Pengusaha-pengusaha desa pun tertarik oleh rombongan ini untuk menyajikan pertunjukan di rumahnya.³³⁾ Banyak di antara penonton yang jatuh hati pada teledek itu sehingga tidak jarang terjadi persaingan untuk memperebutkan kekasihnya. Perkelahian sampai pada pembunuhan mengakhiri perebutan itu. Oleh karena itu untuk mencegahnya pemerintah Kasunanan tetap mempertahankan berlakunya angger yang melarang birokrat istana dari tingkat desa sampai penewu dan kliwon dikenakan denda yang cukup tinggi.³⁴⁾

Sebagai pengunci paper ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat pedesaan ternyata memiliki dimensi kehidupan yang multidimensional. Hal ini diperlukan karena masyarakat desa pun menginginkan keseimbangan berbagai dimensi. Jadi bukan dimensi politik saja yang dominan tetapi masih banyak dimensi yang tak kalah peranannya. Tentu saja kalau keseimbangan itu terganggu, masyarakat desa yang semuanya adalah wong cilik sebenarnya sudah cukup sensitif dan mereka akan menentang perubahan-perubahan apabila tekanan-tekanan dari luar itu betul-betul meretakkan kehidupan lembaga-lembaga tradisional.

33) Brooshoofit menegaskan bahwa timbulnya kerusuhan di pedesaan, terutama di sekitar onderneming adalah pengaruh uang yang kemudian mengakibatkan jeleknya kehidupan sosial yang tak ada ujung-pangkalnya; candu, perjudian, rentenir, kecu, semuanya ada di sekitar onderneming. Lihat P. Brooshoofit, Solosche Catechismus cetak lebih de Locomotief, 10-12 Desember 1888, 34.

34) Angger Nawolo Pradoto, TNI, I, 1844, h. 200; "Ja-vaansche danseressen", IG., II, 1890, h. 1364.

Di dalam keseimbangan itu, wong cilik juga memerlukan kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan kultural berjalan sejajar dan masing-masing kehidupan ini saling mengisi. Bukankah aktivitas pasar berasal dari pedagang-pedagang yang berpindah-pindah dan menyesuaikan hari pasaran. Wong cilik akan menolak beban pajak yang terlalu berat, lebih-lebih dengan masuknya onderneming ke pedesaan. Di sela-sela kehidupan ekonomi dan politik, mereka juga memerlukan hiburan yang sekaligus bahwa kehidupan kultural juga tidak kalah penting. Jadi gambaran masyarakat pedesaan juga tidak berbeda jauh dengan sekarang. Wong cilik sudah dinamis menghadapi problemanya dan selalu menyesuaikan dengan lingkungannya. Namun untuk mengungkapkannya diperlukan penggarapan sejarah pedesaan dengan menampilkan peranan wong cilik yang tentu saja tidak lepas dari sumber-sumber yang mendukungnya.³⁵⁾

35) Lihat karya-karya yang mengungkap kehidupan wong cilik, tulisan Marc Bloch, French Rural History (London and Henley : Routledge and Kegan Paul, 1978); Bernard Slicher van Bath, Bijdragen tot de agrarische geschiedenis (Aula - boeken 624, 1978).

Seminar Sejarah Lokal

Topik : II

GERAKAN PROTES MASYARAKAT PEDESAAN DI ACEH
TERHADAP MILITERISME JEPANG:
KAUS BAYU DAN PANDRAH

Oleh :

Drc. Muhammad Ibrahim

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
SEMINAR SEJARAH LOKAL

1982

GERAKAN PROTES MASYARAKAT PEDESAAN DI ACEH
TERHADAP MILITERISME JEPANG DI ACEH
KASUS BAYU DAN PANDAAN

I

Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 1942 sekitar jam 12.00 siang telah dilancarkan suatu penyarangan terhadap pesantren (dayah) Cot Plieng, Bayu (termasuk wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara, sekarang) oleh sepasukan tentara Jepang dengan persenjataan lengkap yang khusus didatangkan dari kota Bireun, Lhok Seumawe dan Lhok Sukon. Sebelumnya, yaitu pada pagi hari, rakyat yang sedang berkumpul di sana ($\pm$ 400 orang terdiri dari para santri dan warga kampung di sekitar pesantren tersebut¹⁾ telah diminta oleh komandan pasukan agar menyerah saja. Permintaan itu disampaikan melalui utusan yang bernama Hayasi, seorang kenpeitai (polisi militer) yang bertugas di Lhok Seumawe dan pada hari itu ikut serta dalam pasukan. Namun permintaan komandan pasukan tentara Jepang itu tidak digubris, bahkan Hayasi sempat ditikan - kelompok pelawan yang semangat tempurnya sedang "mendidih" itu hanya memiliki senjata rencong, tombak dan pedang -, sehingga menderita luka parah.²⁾ Kejadian ini menyebabkan suasana semakin panas: kedua belah pihak tenggelam dalam emosi yang meluap, sehingga pertempuran tidak terelakkan lagi.

Segera tentara Jepang memuntahkan pelurunya ke arah dayah Cot Plieng yang rupanya telah dipersiapkan untuk dijadikan sebagai basis konsentrasi kekuatan dalam rangka melancarkan serangan terhadap tentara Jepang yang dianggap lebih kaphee (kafir) dari Belanda³⁾ yang telah pergi dari Aceh sejak 8 bulan yang lalu (direncanakan, bertolak dari sini akan dilakukan penyerangan terhadap tangsi-tangsi tentara Jepang di kota-kota sekitarnya, seperti Lhok Seumawe, Lhok Sukon, Bireun dan lain-lain. Tetapi sedang mereka mempersiapkan rencana tersebut, rupanya telah lebih dahulu diketahuhi oleh pihak inteligen Jepang). Peluru yang dimuntahkan itu disambut oleh pihak rakyat dengan pekikan takbir Allahu Akbar, Ya'juj dan Ma'juj telah datang; mereka menyerbu dalam kawananan musuh sambil mempermainkan rencong, tombak dan pedang. Tampaknya mereka tidak sedikitpun gentar menghadapi maut, mereka

telah nekat syahid untuk menghalau tentara Jepang sebagaimana nekatnya Dzulqarnain memenuhi perintah Tuhan -- tertera dalam Al-Quran -- menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj.⁴⁾

Pertempuran pada hari Selasa itu tidak berlangsung lama, sekitar jam 16.00 sore tentara Jepang berhasil menghancurkan seluruh komplek pesantren Cot Plieng dengan membakar habis bangunan pesantren dan mesjid serta 11 buah rumah penduduk yang berdekatan dengan pesantren.⁵⁾ Selama pertempuran berlangsung dipihak rakyat telah gugur 86 orang sedang selebihnya berhasil meloloskan diri.⁶⁾

Yang menjadi pemimpin dari aksi perlawanan tersebut ialah Teungku Abdul Jalil, pengaruh pesantren Cot Plieng, sehingga karenanya ia lebih dikenal dengan panggilan Teungku Di Cot Plieng. Ia dilahirkan pada tahun 1909 di kampung Buloh Blong Ara (termasuk Wilayah Kecamatan Kutamakmur, Aceh Utara, sekarang), sehingga ia dikenal juga dengan panggilan Teungku Di Buloh. Ayahnya bernama Teungku Peutua Hasan, Kepala Kampung (Keuchiek) Cot Seumoyong (Kecamatan Kutamakmur) dan ibunya Nyak Cut Buleun, seorang guru mengaji agama di kampungnya.

Teungku Abdul Jalil pada mulanya belajar di Volksschool dan tamat pada tahun 1921. Tetapi kemudian ia lebih memusatkan perhatiannya di bidang pendidikan agama Islam. Untuk ini ia dengan tekun belajar dari satu pesantren ke pesantren lain. Pesantren-pesantren yang pernah ia kunjungi, antara lain: Dayah Ie Rhot Bungkaih (Muar Batu), Dayah Tonjong Samalanga, Mon Geudong, Cot Plieng, Teupin Punti, Krueng Kaloe (Aceh Besar) dan kemudian kembali lagi ke Dayah Cot Plieng.⁷⁾

Selama di Pesantren ia rajin membaca Hikayat Prang Sabi, sehingga tidak mengherankan apabila ia sangat benci dan anti kepada penjajahan (pada waktu itu penjajahan Belanda). Ia menghayati benar-benar kewajiban seorang muslim untuk memerangi kaum penjajah (diungkapkan dengan indah secara puitis) dalam Hikayat Prang Sabi) sebagaimana diperintahkan oleh agama yang dianutnya.⁸⁾

Sebagai hasil dari ketekunannya, Teungku Abdul Jalil dalam waktu yang relatif singkat telah menjadi seorang ulama yang di-

segani. Ia pahan dalam berbagai bidang ilmu Islam, seperti: ilmu fiqh, tafsir, hadist, tasawuf dan sebagainya. Karena itu ia mampu berdiskusi dengan ulama-ulama terkemuka di Aceh pada waktu itu, terutama dalam memecahkan berbagai masalah keagamaan yang rumit. Bahkan ia pernah berdialog dengan Hamka pada akhir tahun 1929 dalam rapat akbar di Lhok Seumawe mengenai paham Mazhab Salaf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah.⁹⁾

Tengku Abdul Jalil mulai memimpin pesantren Cot Plieng sejak tahun 1937. Sebelum itu pesantren tersebut dipimpin oleh Tengku Ahmad, guru dan juga mertuanya. Selama arahan Tengku Abdul Jalil pesantren Cot Plieng mengalami banyak kemajuan. Ia berusaha mengadakan beberapa pembaharuan, terutama dalam struktur organisasi pesantren dan kurikulum. Untuk ini ia mengadakan peninjauan dalam rangka studi perbandingan ke beberapa pesantren yang dianggap lebih maju sampai ke Aceh Selatan.

Masuknya Jepang ke Aceh tampaknya tidak merubah sikap anti penjajah Tengku Abdul Jalil. Ia sedikitpun tidak terpengaruh oleh propaganda Jepang dan janji-janji muluk, berupa kemerdekaan dan kebebasan syiar Islam di Aceh. Secara intuitif Tengku Abdul Jalil telah dapat meraba bahwa pada akhirnya Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan yang dijanjikan itu, bahkan kalau keadaan memungkinkan penyiaran syiar Islam-pun akan dihambat. Karena itu ia sejak semula tidak sependapat dengan para pemimpin PUSA yang mendukung dan melompahkan jalan masuknya Jepang ke Aceh.¹⁰⁾

Dalam rangka menghadapi kemungkinan tindakan sewenang-wenang militer Jepang, apalagi kalau tindakannya itu bisa mengarah kepada penghambatan syiar Islam, Tengku Abdul Jalil sejak awal kedatangan Jepang telah memompakan semangat patriotisme kepada santri-santrinya di pesantren Cot Plieng. Selain itu ia giat mengadakan dalah ke pelosok-pelosok kampung, terutama di Aceh Utara. Dalahnya yang dianggap paling berbahaya bagi Jepang - adalah yang dilakukan di kampung Krueng Lingka pada bulan Juli 1942 (jadi 5 bulan setelah Jepang masuk ke Aceh). Dalam pidatonya di sana ia mengemukakan bahwa agama Islam dalam bahaya, ekonomi rakyat semakin merosot, hak-hak rakyat diperkosa oleh

tentara Jepang yang tidak mengenal perikemanusiaan. Ditegaskan lagi, seperti yang selalu diingatkan kepada santri-santrinya, bahwa Jepang itu adalah setan yang jahat, kafir laknatullah. Karenanya fardhu 'ain bagi setiap muslim mengangkat senjata melawan Jepang; jihad fisabilillah harus segera dimulai.¹¹⁾ Akibat dari pidatonya itu, Teungku Abdul Jalil menjadi intaian pihak intelijen Jepang, gerak-geriknya selalu diawasi, bahkan telah diperintahkan untuk menanyakannya. Tetapi berkat pembelaan dari beberapa pemimpin Aceh (seperti Teuku Abdul Aziz, bekas gurunya, Teungku Haji Hasan Krueng Kaloe, dll.)¹²⁾ penangkapan itu ditangguhkan setelah bulan Puasa (kira-kira satu setengah bulan kemudian).

Dalam pada itu Teungku Abdul Jalil telah nekat untuk tidak membiarkan dirinya ditangkap atau menyerahkan diri kepada Jepang tanpa perlawanan. Sejak saat itu ia mulai menyiapkan pasukan perlawanan yang selama ini telah dipompa dengan semangat jihad di samping latihan secara sembunyi-sembunyi terutama untuk melatih keterampilan teknik menggunakan rencong, tombak dan pedang. Selain itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dalam rangka menghadapi perang suci, linabelas hari menjelang bulan Puasa Teungku Abdul Jalil melakukan sewadi (berkhalwat) di pesantrennya yang kemudian dilanjutkan dengan ibadah puasa selama bulan Ramadhan. Di pihak lain masyarakat desa di sekitar dayah Cot Plieng juga memberi dukungan kuat kepadanya. Secara spontan mereka mendaftarkan diri untuk turut berperang, di samping sumbangan material lainnya.¹³⁾

Pada dasarnya sejak bulan Juli itu Teungku Abdul Jalil bersama pengikutnya telah terkurung dalam kompleks pesantren Cot Plieng. Sejak waktu itu mereka tidak leluasa lagi bergerak keluar. Hal ini, selain disebabkan oleh adanya ancaman penangkapan terhadap diri Teungku Abdul Jalil, juga disebabkan bocornya rencana perlawanan yang telah dipersiapkan. Karena itu satu-satunya kegiatan mereka yang cukup berarti bagi peningkatan daya tempur adalah membaca Hikayat Prang Sabi. Keadaan ini baru berakhir -- mereka meloloskan diri dari sana -- setelah pertempuran tanggal 7 Nopember sebagaimana telah diutarakan di muka.

Meroka -- termasuk Teungku Abdul Jalil -- yang berhasil meloloskan diri pada waktu pesantren Cot Plieng terbakar, menyingkir ke mesjid Paya Kambok (Kecamatan Mourah Mulia sekarang) untuk seterusnya menuju kampung Neuheun dan bernarkas di rumah Panglima Prang Ahmad. Pada tanggal 8 Nopember 1942 untuk kedua kali terjadi lagi pertempuran di sini yang menyebabkan 4 orang gugur (dua pria dan dua wanita).¹⁴⁾ Dari kampung Neuheun Teungku Abdul Jalil bersama pengikutnya mengundurkan diri ke Buloh Gampong Teungoh. Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 10 Nopember setelah senbahyang Jumat di Meunasah Blang Buloh Gampong Teungoh Teungku Abdul Jalil dan para pengikutnya kembali harus menghadapi serangan tentara Jepang yang dilancarkan untuk ketiga kalinya. Pertempuran sengit tidak bisa dielakkan sampai jam 18.00 sore. Selama pertempuran berlangsung, di pihak rakyat telah gugur 19 orang, termasuk Teungku Abdul Jalil.¹⁵⁾ Jenazahnya bersama 5 orang tawanan -- yang tidak pernah dikembalikan (ditombak?) -- diangkut ke Lhok Seumawe. Dan baru belakangan, yaitu tanggal 11 Nopember diserahkan kembali kepada keluarga untuk dikuburkan di kompleks pesantren Cot Plieng, Bayu. Dengan demikian berakhir pula perlawanan yang telah menggemparkan pemerintah militer Jepang, tidak saja di Aceh Utara tetapi juga sampai ke ibukota Kutaraja.

Apabila diperhatikan secara selintas perlawanan tersebut kelihatannya lebih merupakan sebagai suatu mata rantai perjuangan rakyat Aceh yang tidak pernah terputus sejak zaman kolonial Belanda. Perlawanan bertujuan untuk mengusir penjajahan dan digerakkan oleh ulama yang mempunyai kharisma serta bertopang kepada kekuatan masyarakat pedesaan setempat (setidaknya-tidaknya ada 14 kampung yang terlibat secara langsung¹⁶⁾). Adapun sebagai motor penggeraknya, seperti juga pada zaman kolonial Belanda, ialah: Kekuatan sosial agama (Religious social force).

Tetapi apabila diteliti lebih jauh perlawanan yang dilancarkan itu pada dasarnya dilatar-belakangi oleh faktor-faktor lain yang lebih mendasar. Setelah 8 bulan Jepang berkuasa, pada masyarakat Aceh, terutama di daerah pedesaan, terlihat ada gejala-gejala kegoncayaan sosial-budaya; ada perasaan tertindas yang melampaui batas, khususnya di bidang kehidupan agama, pendidikan dan peradatan yang dapat di-

perhatikan dari uraian berikut ini.

Pada awal kedatangannya di Aceh, Jepang dielu-elukan oleh rakyat, seakan-akan "dewa penyelamat" telah datang untuk melepaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Namun kemudian setelah beberapa bulan berkuasa Jepang bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat Aceh yang sudah berurat berakar sejak lama. Para ulama, terutama yang tergabung dalam organisasi PUSA, yang berjasa dalam proses pendaratan Jepang ke Aceh tidak didudukkan dalam birokrasi, bahkan ada gejala yang menunjukkan bahwa Jepang sedang berusaha untuk menyingkirkan dan mematahkan kekuatan mereka.¹⁷⁾ Padahal para ulama itu adalah merupakan kelompok elite yang paling akrab -- lahiriah dan batiniah -- dengan rakyat. Sementara itu tentara Jepang yang hampir tiap hari beroperasi di desa-desa berlaku kasar, melampaui batas-batas adat dan ajaran agama Islam yang dihayati dan dimuliakan masyarakat Aceh. Penduduk desa pada pagi hari dikumpulkan, diperintahkan menghadap ke Timur (anggapan orang Aceh disuruh menyembah matahari yang sangat terlarang menurut agama Islam) sambil menyanyikan lagu-lagu Jepang yang sama sekali tidak dimengerti makna dan maksudnya (antara lain lagu kebangsaan Jepang, Kinikoyo). Demikian juga yang diperlakukan terhadap anak-anak sekolah, sambil di sekolah tidak diperkenankan tulisan Arab-Melayu untuk diajarkannya. Selain itu ada gejala, bahwa Jepang sedang menghambat perkembangan pendidikan Islam. Memang benar pesantren (dayah) masih diizinkan hidup dan melangsungkan kegiatan mengajar-belajar seperti biasa, namun kegiatannya itu tidak luput dari pengawasan dan pengawasan pihak Jepang.¹⁸⁾

Adanya kenyataan-kenyataan seperti diungkapkan di atas telah memberi kesan yang sungguh menyakinkan pada masyarakat Aceh, bahwa Jepang sedang mengembangkan agama majusi (agama penyembah berhala) dan berusaha untuk menghancurkan agama Islam di Aceh. Akibatnya timbul kegiatan sosial dalam masyarakat yang pada gilirannya menjadi eksplosif untuk segera berobah, apabila muncul seorang pemimpin sebagai penggeralnya, menjadi perang terbuka, seperti yang telah terjadi di Bayu. Selanjutnya bagaimana dengan perlawanan Pandrah, akan dipaparkan di bawah ini.

Pada malam hari tanggal 2 Mei 1945 sejumlah warga kampung Lheue Simpang (sekitar 40 orang) di bawah pimpinan Pang Akob (Panglima Prang Teungku Yakob) dan Keuchiek Johan melancarkan serangan terhadap tangsi tentara Jepang di Pandrah (termasuk wilayah Kecamatan Jounib, Aceh Utara, sekarang). Tentara Jepang yang kebotulan berjumlah tiga orang saja tidak dapat berbuat banyak selain dari pada berusaha menyelamatkan diri, namun hanya satu orang yang berhasil meloloskan diri dan lari ke tangsi Jounib. Peristiwa ini segera dilaporkan ke Bireun, Lhok Seumawe, Sigli dan Kutaraja (sekarang Banda Aceh).¹⁹⁾

Sebelumnya, yaitu pada bulan April 1945 telah terjadi pemukulan terhadap kemukiman Pang Akob, Mayk Umar, di depan matanya sendiri. Atas kejadian itu Pang Akob bersumpah untuk melawan Jepang. Maka, dalam rangka menepati sumpahnya itu, pada tanggal 24 April di rumah kepala kampung (Keuchiek) Lheue, Usman, diadakan suatu rapat guna merencanakan pelaksanaan perlawanan dalam waktu secepat mungkin. Rapat yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat kampung di sekitar daerah itu membahas hal-hal yang menyangkut dengan tempat konsentrasi kekuatan dan waktu yang lebih tepat untuk melaksanakan perlawanan serta masalah persenjataan yang lebih memungkinkan untuk menghadapi perang. Telah diputuskan bahwa sebagai tempat konsentrasi kekuatan ialah Glee (gunung) Bangsalang. Ditentukan juga, bahwa di sana akan diadakan pembacaan Hikayat Prang Sabi dan sebelum perlawanan dimulai, lebih dahulu akan dilakukan khalwat (somedi) selama tujuh hari. Kemudian, tepat setelah masa somedi berakhir, malamnya seperti telah disebutkan di muka dilancarkanlah serangan terhadap tangsi Pandrah sebagai awal dimulainya aksi perlawanan mereka.²⁰⁾

Satu hari setelah peristiwa penyerangan tersebut, pada tanggal 3 Mei 1945 satu kompi tentara Jepang yang didatangkan dari Bireun bersana dengan pasukan dari Jounib tiba di Pandrah. Dalam pasukan itu turut serta juga Guntyo Bireun, Teuku Muhammad Yakob, dengan dua regu Polisi.²¹⁾ Seluruh pasukan ditempatkan di kampung Lheue Simpang yang dianggap sebagai sumber kekuatan gerakan perlawanan. Tetapi rupanya mereka yang turut melakukan penyerangan pada malam hari tanggal 2 Mei yang lalu telah menyinkir ke Glee Bangsalang. Karena itu komandan

pasukan Jepang memerintahkan agar mereka yang menyangkang segera turun untuk menyerah. Perintah itu tidak dihiraukan, sehingga tentara Jepang menangkap keluarga mereka serta sejumlah penduduk kampung Lheue Simpang dan sekitarnya.

Tindakan kejam tentara Jepang terhadap warga kampung yang tidak bersalah itu mendorong para pejuang rakyat yang berpusat di Glee Banggalan untuk segera bertindak. Pada tanggal 5 Mei 1945 dengan didahului oleh gema suara azan para pejuang itu sambil mengundang tah-lil dan takbir (Subhanallah - Allahu Akbar) menyerbu ke tempat penempatan tentara Jepang di kampung Lheue Simpang. Pertempuran seru berlangsung selama beberapa jam dan telah menyebabkan jatuh korban sejumlah besar serdadu Jepang (104 orang) dan juga Guntyo Bireun, Teulau Muhammad Yakob.²² Di pihak rakyat telah gugur 43 orang, di antaranya terdapat seorang wanita (Siti Aminah) yang sedang dalam keadaan hamil tua.²³ Mereka yang gugur ini dikuburikan di kampung Lheue Simpang, sekaran dikenal dengan nama Kuburan Peuet Plooh Peuet (kuburan empat puluh empat), karena diperhitungkan bayi dalam kandungan Siti Aminah (di sini kita lihat adanya kecenderungan untuk menjadikan jumlah 44, berhubung pada masyarakat Aceh angka 44 itu mempunyai nilai magis -- dalam hal ini dengan jumlah 44 orang yang gugur, kondutipun seorang dalam kandungan, berarti perjuangan mereka diridhai Allah Swt dan sebagai imbalannya adalah surga jannatun-nain sehingga tidak mustahil kuburan mereka dianggap keramat).

Setelah pertempuran berakhir tentara Jepang melakukan penangkapan terhadap penduduk kampung yang diduga terlibat dalam aksi-aksi perlawanan selama ini. Adapun mereka yang ditangkap itu berjumlah 33 orang; 9 di antaranya ditawan di Jeunib dan selebihnya (24 orang) dibawa ke Bireun untuk seterusnya ke Medan. Dari 9 orang yang ditawan di Jeunib, tiga di antaranya dihukum²⁴; sedang yang dibawa ke Medan 12 orang dihukum mati²⁵ dan selebihnya dihukum antara 5 - 15 tahun. Mereka ini kemudian dipenjarakan di Penatan Siantar dan setelah Jepang menyerah hanya 6 orang yang selamat kembali ke kampung halaman mereka.²⁶

Dari uraian di atas nampak, bahwa perlawanan Pandrah terjadi menjelang berakhirnya pendudukan militer Jepang di Aceh; jadi kobalikan

dari perlawanan Bayu yang meletus pada awal kedatangannya. Selain itu, yang juga erat kaitannya dengan faktor waktu, faktor-faktor yang melatar-belakangi terjadinya kedua perlawanan tersebut juga nampak berbeda, di samping tidak dapat dimungkiri adanya faktor-faktor yang sama.

Kalau pada awal pendudukannya di Aceh, penindasan-penindasan dari segi kehidupan sosial-ekonomi belum terasa, kendatipun sudah ada, pada masyarakat Aceh, maka setelah tiga tahun mendarat keadaannya akan berlainan sekali. Setelah tiga tahun Jepang berkuasa berbagai tindakan kekerasan, khususnya di bidang ekonomi, telah diporlakukakan terhadap rakyat Aceh. Penduduk dikerahkan sebagai romusha bagi kepentingan militer. Mereka dipaksa bekerja membuat kubu-kubu pertahanan (pertahanan Gunung Setan di Tanah Alas, pertahanan pantai), lapangan-lapangan terbang (Lhek Nga, Tanjoe yang tidak seberapa jauh dari tempat kejadian peristiwa Pandrah), jalan-jalan raya dan sebagainya, sehingga praktis kegiatan produksi tidak berjalan secara wajar. Sebagian besar sawah-ladang menjadi terlantar; walaupun ada petani yang sempat mengerjakan sawahnya sebagian besar hasil panen harus diserahkan kepada Jepang. Dalam keadaan demikian bahaya kelaparan tidak bisa terelakkan lagi, sementara kebutuhan akan sandang praktis tidak dapat terpenuhi sebagian besar penduduk kampung pada waktu itu telah memaknai goni)²⁷.

Semua faktor-faktor yang dikemukakan di atas telah menyebabkan terjadinya semacam tekanan psikologis -- lebih-lebih pada masyarakat pedesaan -- yang pada gilirannya bisa meledak melalui berbagai bentuk aksi perlawanan yang semata-mata ditujukan untuk melepaskan diri dari keadaan yang tidak menentu itu. Dari segi inilah kiranya dapat dipahani kenekatan rakyat di daerah Pandrah bertempur menentang kekejaman militerisme Jepang. Rupanya tekanan ekonomi yang telah melampaui batas peri kemanusiaan dan yang seakan-akan tidak tertahankan lagi pada waktu itu telah memotivisir perjuangan mereka, kendatipun untuk itu mereka rela memilih alternatif mati dari pada hidup dalam keadaan hak miliknya diperkosa oleh pihak lain (Jepang). Dengan menportaruhkan jiwa, mereka men harapkan akan segera tiba masa keadilan dan kemerdekaan yang selalu dirindukannya.

III

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa aksi perlawanan yang dilancarkan rakyat di daerah Bayu dan Pandrah itu agaknya kurang tepat apabila dikaitkan sebagai suatu mata rantai perjuangan rakyat Aceh yang tidak pernah terputus dalam menentang penjajahan sejak zaman kolonial Belanda dulu. Tetapi nampaknya kedua aksi perlawanan tersebut lebih merupakan gerakan protes masyarakat setempat terhadap penguasa (dalam hal ini pemerintah militer Jepang) yang dirasakan akan membawa mala petaka bagi kelangsungan hidup rakyat Aceh secara keseluruhannya. Ini tidak berarti bahwa dalam gerakan protes itu sama sekali tidak mengandung anasir anti penjajahan; hanya saja di sini yang dapat membedakannya adalah faktor-faktor yang melatar-belakangi digerakkannya aksi protes tersebut serta tujuan utama dan harapan yang hendak diwujudkan dalam waktu sesingkat mungkin oleh penggerak-penggerakannya. Selain itu juga proses keberlangsungan perlawanan yang relatif tidak lama dan kemudian berakhir tanpa kelanjutannya.

Rakyat Aceh yang menyambut kedatangan Jepang dengan penuh kegembiraan, kemudian dikecewakan sebagai akibat dari berbagai kekejaman yang dipraktekkannya. Bahkan berbagai kebijakan pemerintah militer Jepang itu dirasakan oleh rakyat Aceh sangat membahayakan dalam keseluruhan aspek keberlangsungan kehidupan mereka (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Hal ini telah menumbuhkan konflik kejiwaan dan kegelisahan eksplosif dalam masyarakat yang menjadi pangkal pecahnya perang terbuka. Kalau pada aksi protes yang pertama (perlawanan Bayu) lebih digerakkan oleh faktor kegelisahan sosial-budaya, maka pada yang kedua (perlawanan Pandrah) rupanya faktor kegelisahan sosial-ekonomilah yang telah memotivisir melotusnya gerakan tersebut. Namun sebagai motor penggerak utama kedua aksi protes yang dilancarkan itu adalah sama, yakni faktor kekuatan sosial agama (religious sosial force).

Di samping dua gerakan protes yang telah diutarakan, sebenarnya masih ada beberapa gerakan protes lain, kendatipun tidak

sebesar kedua gerakan tersebut, yang pernah muncul selama masa pendudukan militer Jepang di Aceh. Umpamanya dapat disebutkan, yang digerakkan rakyat Blang Ara tahun 1943, rakyat di daerah Lhong tahun 1944, pemberontakan dua peleton Giyugun tahun 1944 di bawah pimpinan Teuku A. Hamid Meureudu dan beberapa lagi yang semestinya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sebagai akibat dari gerakan protes itu, pemerintah militer Jepang telah menempuh beberapa kebijaksanaan baru dalam urusan pemerintahan yang diharapkan dapat membendung kegelisahan masyarakat Aceh. Kiranya pengangkatan Teuku Abdul Aziz (seorang tokoh masyarakat yang disegani sebagai penasehat pemerintah dalam urusan agama Islam pada bulan Januari 1943, pembentukan MAIBKATRA (Majlis Agama Islam untuk Bantuan Kemakmuran Asia Timur Raya), Maret 1943, dan pemberian kesempatan menjalankan ibadah puasa kepada para tawanan, tidak dapat dipisahkan dari aksi perlawanan rakyat Bayu yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Namun kebijaksanaan apa yang akan ditempuh agar peristiwa Pandrah tidak terulang lagi nampaknya belum sempat terpikirkan, berhubung beberapa bulan kemudian pemerintah militer Jepang berakhir di Aceh untuk tidak pernah terulang lagi.

Denpasar, Bali, 1-4 September 1982

CATATAN

- 1) Kabin Kebudayaan Departemen P. dan K. Kabupaten Aceh, Sejarah Pertempuran Cot Plieng Bayu Lheue Simpang Pandrah melawan Fascisme Jepang, Laporan Hasil Penelitian, 1974, hal. 3; Bandingkan juga dengan, Anthony Reid, The Flood of the People, Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra, Oxford University Press, 1979, hal. 113.
- 2) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K, Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Jakarta, 1977/1978, hal. 194.
- 3) Dalam masyarakat Aceh waktu itu muncul ungkapan: Talét Buita-peutameng Aseoi Pungot, artinya kita usir babi, kemudian kita masukkan anjing gila (yang lebih berbahaya dan sama-sama najis).
- 4) Ya'juj dan Ma'juj menurut Al-Quran, XVIII: 94, adalah dua bangsa yang selalu membuat kerusakan di bumi.
- 5) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 195.
- 6) Ibid. juga dalam, T. Sabi Oebit, "Rakyat yang berjiwa patriotik melawan penjajahan Fascisme Jepang", Berita Buana, Jakarta, 22 Mei 1975; Kabin Kebudayaan Dep. P. dan K. Kab. Aceh Utara, op.cit., hal. 4.
- 7) Selintas riwayat hidup Teungku Abdul Jalil, lihat, ibid.; lihat juga kegiatan dan peranannya dalam masyarakat, Abdullah Hussain, Terjebak, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1965, hal. 245-6; A.J. Piekaar, Atjeh en de Oorlog met Japan, Van Hoeve, 's Gravenhage - Bandung, 1949, hal. 304-307.
- 8) Ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tiap muslim memerangi penjajah serta menghentikannya apabila mereka menawarkan perdamaian, antara lain, ialah: Sوره II : 190; IX : 41; IV : 90.
- 9) Hamka, "Kenang-kenangan di Aceh", Panji Masyarakat, No. 313, 1 Pebruari 1981, hal. 49-53.
- 10) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., Hal. 191; Mengenai peranan PUSA sehubungan dengan masuknya Jepang ke Aceh, lihat, a.l. M. Joenoes Djamil, Riwayat Barisan "FW" (Fudjiwara Kikan) di Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Aceh, 1975, hal. 4-6; A.J. Piekaar, op.cit., hal. 274-5; Anthony Reid, op.cit., hal. 84-7; 94-6.
- 11) Hamka, loc.cit.; Pusat Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 192.
- 12) Ibid., hal. 194.
- 13) Kabin Kebudayaan Dep. P. dan K. Aceh Utara, loc.cit.; T. Sabi Oebit, loc.cit.
- 14) Pusat Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 195.

- 15) Dari 109 orang yang gugur selama tiga kali pertempuran, yang masih tercatat namanya, ialah: Teungku Abdul Jalil, Teuku Pon, Teuku Baday, Teungku Bidin, Teungku Mat Syam, Teungku Husin hasyim, Teungku Husin Hasan, Teuku Muda Yusuf, Nyak Mirah, Saleh, Taman Mee, Abu Bakar Imum Ok, Ubit Pang Meureudu, Teungku Bansu Haji Adam Gadeng, Teungku Imum Ok, Teungku Itam Lancok, Muhammad Langa, Teungku Usman ben Garong, Teungku Muhammad Abbas Peuntuet, Teunngku Muhammad Hanafiah, Teungku Muhammad Din, Teungku Syekh Rahman, Teungku Wahi Muhammad, Teungku Abdullah Ahmad, Nyak Din Ben Hasyim, Muhammad Daud ben Peutua Latch, Nyak Itam, Teungku Usman Buloh, Teungku Abdul Hamid, Teungku Leubu, Teungku Imum pii, Teungku Cut Ahmad, Teungku di Blang, Teungku Leman, Tgk. Imum Usman, Cut Ben Matsyam, Tgk. Rahman Puteh Tulot, Abu, Tgk. Ben Blang, Tgk. Johan Linga, Tgk. Ali Ben, dan Tgk. Ben Teh.
- 16) Kampung-kampung tersebut ialah: Meunasah Glong, Meunasah Blang Bayu, Meunasah Dayah Baro, Meunasah Blang Rimeung, Meunasah Punti, Meunasah Dayah Tuha, Meunasah Nibong, Meunasah Baro Kulam Gajah, Meunasah Brandang, Meunasah Kajee Panyang, Meunasah Dayah Blang Seurikui, Meunasah Beuringen Blang Me, Meunasah Baloo dan Meunasah Bi Bayu.
- 17) Kecuali dalam lembaga keagamaan, para ulama tidak didudukkan dalam lembaga pemerintahan umum, lihat lebih lanjut, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 163-172.
- 19) Muhammad Abdul Muthalib, Piwajat Prang Pandrah Masa Djiduek Djepang 1945, Maktabah Atjeh Raya, Kutaredja, 1960, hal. 27.
- 20) Kabin Kebudayaan Dep. P. dan K. Aceh Utara, loc.cit.; T. Sabi Oebit, loc.cit.
- 21) Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 197.
- 18) Mengenai keadaan kehidupan sosial-budaya pada masa Jepang, lihat lebih lanjut, Ibid., hal. 178-190; 199-200.
- 22) Ismuha, Ulama Aceh Dalam Perspektip Sejarah, LEKNAS-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 65.
- 23) Adapun ke 43 orang yang gugur itu, ialah: Keuchiek Johan, Pang Akob, Keuchiek Usman Lheu, Teungku Jalil ben Langa, M. Yusuf ben Dayah, Peutua Jalil, Kasim, Tgk. Nyak Isa Peudada, Sulaiman ben Ali, M. Hasan ben Banta, Teungku Meulaboh, Tgk. Mat Kasem, Tgk. M. Amin, Nyak Abu Bakar Amin, M. Yusuf Gagap Lheu, Ibrahim Yusuf, M. Adam Peufin, Usman Lheu, Sabon Piah, Ismail Rahman, Mahmud ben Beungga, Ibrahim Meulaboh, Saleh ben Rahman, Nyak Zulkifli Yusuf, Saleh Gampong Blang, Su'ud Trienggadeng, Ibrahim Hasan Cot Bada, Saleh ben Tulot, Abdullah Gampong Blang, Ismail Reufin, Ibrahim Yusuf, Ahmad Usman, Ahmad Gampong Blang, Sulaiman Lheu, Abdullah ben Gampong Blang, Nyak Umar Adam, Ibrahim Ali, Ahmad Itam, Mahmud ben Dorahman, Ismail Ahmad, Saleh Ismail Bandar Dua, M. Gam Meunasah Keutapang, Siti Aminah dan ditambah seorang anak dalam kandungannya.

- 24) Sembilan orang yang ditawan di Jeunib, ialah Teungku Arbi (dibunuh), Sulaiman Lheu (dibunuh), Amin Beureujuk Jeumpa Sikureung (dibunuh); dan yang dibebaskan: Waki Seuman, Amin Lambot, Ibrahim Thaib, Tgk. Bileu Hasan, Umar Pante Raja dan Hasyim ben Kama.
 - 25) Kedua belas orang yang dihukum mati di Medan, ialah: A. Wahab Ali, Usman Yusuf, Tgk. H. Yakob, Abu Thaleb, M. Hamzah, M. Husin Bungong, Gam Tjut, Abdullah, Harun, Husen ben Pawang Seuman, Dolah Jeupa Sikureung dan A. Jalil Teung Pang.
 - 26) Kedua belas orang yang dipenjarakan di Pematang Siantar, ialah: Tgk. Yahya, Keuchiek M. Ali Lheu Simpang, M. Ali Neubok Jeumpa, Ishak Banta Panyang, Tgk. Ibrahim Beungga, Tgk. M. Hasan Ali, Thaleb Beungga, Badal Husen Peusangan, M. Aji Yusuf, Zul Reufin, Sufi Lheue Simpang dan Ilyas Yusuf Lheu Barat.
 - 27) Uraian secara lebih terperinci mengenai kehidupan masyarakat Aceh di bidang ekonomi pada masa pendudukan militer Jepang, lihat antara lain, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, op.cit., hal. 172-177; A.J. Piekaar, op.cit., jilid II.
-

Pe
Jo